



## **BUPATI MAROS**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MAROS**

**NOMOR: 41 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ...);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2016);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3),

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Biaya Masukan Tahun 2022 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.
6. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indeks adalah parameter penyesuaian yang digunakan untuk menghitung kebutuhan alokasi biaya tahun yang direncanakan dan prakiraan maju tahun anggaran berikutnya.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Rencana Keuangan Tahunan yang disusun menurut bagian anggaran.
10. Komponen Biaya Keluaran adalah bagian dari biaya untuk menghasilkan keluaran/sub keluaran.
11. Komponen Biaya masukan adalah bagian dari biaya untuk menyusun biaya keluaran.

## **BAB II**

### **STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2022**

#### **Pasal 2**

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun 2022 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.

#### **Pasal 3**

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar Biaya Masukan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai Estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 7 Juni 2021

**BUPATI MAROS,**

  
**A. S. CHAIDIR SYAM**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 7 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 41

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR : 41 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 7 Juni 2021**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN**  
**KABUPATEN MAROS TAHUN 2022**

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2022**  
**YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**

| NO       | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1        | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>1</b> | <b>HONORARIUM/JASA PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>  |        |                    |     |
| 1.1      | <b>Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>   | OB     | 6.000.000          |     |
| 1.2      | <b>Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>   | OB     | 5.500.000          |     |
| 1.3      | <b>Bendahara Umum Daerah (BUD)</b>  | OB     | 5.000.000          |     |
| 1.4      | <b>Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)</b>   | OB     | 3.500.000          |     |
| 1.5      | <b>Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b> |        |                    |     |
|          | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta  | OB     | 1.040.000          |     |
|          | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta   | OB     | 1.250.000          |     |
|          | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta   | OB     | 1.450.000          |     |
|          | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar   | OB     | 1.660.000          |     |
|          | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar   | OB     | 1.970.000          |     |
|          | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar   | OB     | 2.280.000          |     |
|          | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar  | OB     | 2.590.000          |     |
|          | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar   | OB     | 3.010.000          |     |
|          | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar   | OB     | 3.420.000          |     |
|          | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar   | OB     | 3.840.000          |     |
|          | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar  | OB     | 4.250.000          |     |
|          | l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 50 miliar  | OB     | 4.770.000          |     |
|          | m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar   | OB     | 5.290.000          |     |
|          | n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar   | OB     | 5.810.000          |     |
|          | o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun  | OB     | 6.330.000          |     |
|          | p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun  | OB     | 7.370.000          |     |
| 1.6      | <b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);</b>  |        |                    |     |
|          | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta  | OB     | 1.010.000          |     |
|          | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta   | OB     | 1.210.000          |     |
|          | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta   | OB     | 1.410.000          |     |
|          | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar   | OB     | 1.610.000          |     |
|          | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar   | OB     | 1.910.000          |     |
|          | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar   | OB     | 2.210.000          |     |
|          | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar  | OB     | 2.520.000          |     |

|  |            |  |    |           |  |
|--|------------|--|----|-----------|--|
|  |            | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar                    | OB | 2.920.000 |  |
|  |            | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar                    | OB | 3.320.000 |  |
|  |            | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar                    | OB | 3.720.000 |  |
|  |            | k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar                    | OB | 4.130.000 |  |
|  |            | l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar                   | OB | 4.630.000 |  |
|  |            | m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar                   | OB | 5.130.000 |  |
|  |            | n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar                   | OB | 5.640.000 |  |
|  |            | o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun                    | OB | 6.140.000 |  |
|  |            | p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun                                       | OB | 7.140.000 |  |
|  | <b>1.7</b> | <b>Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)</b> |    |           |  |
|  |            | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta   | OB | 400.000   |  |
|  |            | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta                       | OB | 480.000   |  |
|  |            | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 Juta                      | OB | 570.000   |  |
|  |            | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar                       | OB | 660.000   |  |
|  |            | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar                    | OB | 770.000   |  |
|  |            | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar                     | OB | 880.000   |  |
|  |            | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar                      | OB | 990.000   |  |
|  |            | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar                    | OB | 1.250.000 |  |
|  |            | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar                     | OB | 1.520.000 |  |
|  |            | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar                     | OB | 1.780.000 |  |
|  |            | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar                    | OB | 2.040.000 |  |
|  |            | l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar                  | OB | 2.440.000 |  |
|  |            | m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar                  | OB | 2.830.000 |  |
|  |            | n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar                  | OB | 3.230.000 |  |
|  |            | o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun                   | OB | 3.620.000 |  |
|  |            | p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun                                       | OB | 4.420.000 |  |
|  | <b>1.8</b> | <b>Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan</b>                         |    |           |  |
|  |            | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta   | OB | 340.000   |  |
|  |            | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta                       | OB | 420.000   |  |
|  |            | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 Juta                      | OB | 500.000   |  |
|  |            | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar                       | OB | 570.000   |  |
|  |            | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar                    | OB | 670.000   |  |
|  |            | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar                     | OB | 770.000   |  |
|  |            | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar                      | OB | 860.000   |  |
|  |            | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar                    | OB | 1.090.000 |  |
|  |            | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar                     | OB | 1.320.000 |  |

|  |             |  |    |           |  |
|--|-------------|--|----|-----------|--|
|  |             | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar               | OB | 1.550.000 |  |
|  |             | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar              | OB | 1.780.000 |  |
|  |             | l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar            | OB | 2.120.000 |  |
|  |             | m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar            | OB | 2.470.000 |  |
|  |             | n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 50 miliar             | OB | 2.810.000 |  |
|  |             | o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun             | OB | 3.160.000 |  |
|  |             | p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun                                 | OB | 3.840.000 |  |
|  | <b>1.9</b>  | <b>Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu</b> |    |           |  |
|  |             | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta                                     | OB | 260.000   |  |
|  |             | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta                 | OB | 310.000   |  |
|  |             | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 Juta                | OB | 370.000   |  |
|  |             | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar                 | OB | 430.000   |  |
|  |             | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar              | OB | 500.000   |  |
|  |             | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar               | OB | 570.000   |  |
|  |             | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar                | OB | 640.000   |  |
|  |             | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar              | OB | 810.000   |  |
|  |             | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar               | OB | 980.000   |  |
|  |             | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar               | OB | 1.150.000 |  |
|  |             | k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar              | OB | 1.330.000 |  |
|  |             | l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar            | OB | 1.580.000 |  |
|  |             | m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar            | OB | 1.840.000 |  |
|  |             | n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 50 miliar             | OB | 2.090.000 |  |
|  |             | o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun             | OB | 2.350.000 |  |
|  |             | p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun                                 | OB | 2.860.000 |  |
|  | <b>1.10</b> | <b>Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)</b>                           | OB | 1.200.000 |  |
|  | <b>1.11</b> | <b>Tim Pendukung Kegiatan Rumah Sakit Umum dr. La Palaloi (RSUD)</b>     |    |           |  |
|  |             | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta                                     | OB | 960.000   |  |
|  |             | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta                | OB | 1.160.000 |  |
|  |             | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta                | OB | 1.360.000 |  |
|  |             | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar                 | OB | 1.560.000 |  |
|  |             | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar              | OB | 1.860.000 |  |
|  |             | f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar               | OB | 2.160.000 |  |
|  |             | g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar               | OB | 2.470.000 |  |
|  |             | h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar              | OB | 2.870.000 |  |
|  |             | i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar              | OB | 3.270.000 |  |
|  |             | j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar              | OB | 3.670.000 |  |



|  |  |   |    |           |  |
|--|--|---|----|-----------|--|
|  |  | k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar | OB | 4.080.000 |  |
|--|--|---|----|-----------|--|

**Penjelasan :**

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan adalah Honorarium yang diberikan kepada Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa bendahara Umum Daerah (KBUD), Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji, diberikan berdasarkan Pagu yang dikelola, sedangkan Honorarium Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) diberikan perbulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Bupati;
- b. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Wakil Bupati;
- c. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
- e. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- f. Kepada Pejabat Pengguna Anggaran yang mengelola lebih dari satu DPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- g. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya diperkenankan menerima salah satu honorarium. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung;
- h. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan per bulan hanya selama kegiatan berlangsung/atau perpaket kegiatan;
- i. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran dan atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- j. Bendahara Gaji termasuk dalam kategori Bendahara Pengeluaran Pembantu. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung;
- k. Nilai pagu yang digunakan untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu non Bendahara Gaji adalah pagu Belanja Langsung, sedangkan untuk Bendahara Gaji pagu yang digunakan adalah Belanja Pegawai;
- l. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu yang dikelolanya;
- m. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium; dan
- n. Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- o. Tim Pendukung Rumah Sakit Umum dr. LA PALALOI (RSUD) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

**2. HONORARIUM/JASA PENGADAAN BARANG/JASA**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 2  | <b>HONORARIUM/JASA PENGADAAN BARANG/JASA</b>  |        |                    |     |
|    | <b>2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa</b>                | OB     | 680.000            |     |
|    | <b>2.1.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ</b>                    |        |                    |     |
|    | a. Pejabat Pengadaan (Barang)   | OP     | 250.000            |     |
|    | b. Pejabat Pengadaan (Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya)                                | OP     | 150.000            |     |
|    | c. Pejabat Pengadaan (Konstruksi)   | OP     | 230.000            |     |
|    | d. Pejabat Pengadaan (e-Purchasing)   | OP     | 50.000             |     |
|    | <b>2.1.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)</b> |        |                    |     |
|    | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta                                  | OP     | 680.000            |     |

|  |              |  |    |           |  |
|--|--------------|--|----|-----------|--|
|  |              | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 iuta   | OP | 850.000   |  |
|  |              | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar  | OP | 1.020.000 |  |
|  |              | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar  | OP | 1.270.000 |  |
|  |              | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar   | OP | 1.520.000 |  |
|  |              | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar   | OP | 1.780.000 |  |
|  |              | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar   | OP | 2.120.000 |  |
|  |              | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar   | OP | 2.450.000 |  |
|  | <b>2.1.3</b> | <b>Honorarium/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>              |    |           |  |
|  |              | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta   | OP | 760.000   |  |
|  |              | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 iuta   | OP | 760.000   |  |
|  |              | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 miliar  | OP | 920.000   |  |
|  |              | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar  | OP | 1.140.000 |  |
|  |              | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar   | OP | 1.370.000 |  |
|  |              | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar   | OP | 1.600.000 |  |
|  |              | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar   | OP | 1.910.000 |  |
|  |              | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar   | OP | 2.210.000 |  |
|  | <b>2.1.4</b> | <b>Honorarium/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</b> |    |           |  |
|  |              | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp. 50 juta   | OP | 450.000   |  |
|  |              | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta   | OP | 450.000   |  |
|  |              | c. Nitai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 juta  | OP | 450.000   |  |
|  |              | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta                                | OP | 480.000   |  |
|  |              | e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta                                | OP | 600.000   |  |
|  |              | f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar                               | OP | 720.000   |  |
|  |              | g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar                              | OP | 910.000   |  |
|  |              | h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 5 miliar                                | OP | 1.090.000 |  |
|  |              | i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar                               | OP | 1.270.000 |  |
|  |              | j. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar                              | OP | 1.510.000 |  |
|  |              | k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar                             | OP | 1.750.000 |  |

|  |              |   |    |           |  |
|--|--------------|---|----|-----------|--|
|  | <b>2.2</b>   | <b>Honorarium/Jasa Pengguna Anggaran</b>  |    |           |  |
|  | <b>2.2.1</b> | <b>Honorarium/Jasa Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi)</b>                    |    |           |  |
|  |              | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar                               | OP | 3.580.000 |  |
|  | <b>2.2.2</b> | <b>Honorarium/Jasa Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>                    |    |           |  |
|  |              | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar                               | OP | 3.230.000 |  |
|  | <b>2.2.3</b> | <b>Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)</b>                           |    |           |  |
|  |              | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar  | OP | 1.510.000 |  |
|  |              | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar | OP | 1.510.000 |  |

**Penjelasan :**

- 2,1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2,2 Honorarium Pengguna Anggaran diberikan kepada Pengguna anggaran dalam hal :
- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

**3. HONORARIUM/JASA UPAH PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**

| NO       | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----------|--|--------|--------------------|-----|
| 1        | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>3</b> | <b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)</b> |        |                    |     |
| 3.1      | Kepala   | OB     | 1.000.000          |     |
| 3.2      | Sekretaris/Staf Pendukung  | OB     | 750.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

**4. HONORARIUM/JASA UPAH KERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PERANGKAT PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA**

| NO       | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----------|--|--------|--------------------|-----|
| 1        | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>4</b> | <b>HONORARIUM/JASA UPAH KERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PERANGKAT PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA</b> |        |                    |     |
| 4.1      | Penanggung Jawab Perangkat Pengelola Layanan   | OB     | 10.000.000         |     |
| 4.2      | Koordinator Perangkat Pengelola Layanan  | OB     | 8.000.000          |     |
| 4.3      | Ketua  | OB     | 7.000.000          |     |
| 4.4      | Sekretaris   | OB     | 6.000.000          |     |
| 4.5      | Koordinator Teknis Bidang Monitoring dan Evaluasi  | OB     | 5.000.000          |     |
| 4.6      | Koordinator Teknis Bidang Pembinaan  | OB     | 5.000.000          |     |
| 4.7      | Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan  | OB     | 3.000.000          |     |

|  |      |  |    |            |                                    |
|--|------|--|----|------------|------------------------------------|
|  | 4.8  | Kelompok Kerja Khusus Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan | OB | 3.000.000  | ditambah perpaket sesuai ketentuan |
|  | 4.9  | Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama         | OB | 6.000.000  |                                    |
|  | 4.10 | Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda            | OB | 8.000.000  |                                    |
|  | 4.11 | Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya           | OB | 10.000.000 |                                    |

**Penjelasan :**

**4.1. Penanggung Jawab Perangkat Pengelola Layanan**

Honorarium yang diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Penanggung Jawab Perangkat Daerah untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

**4.2 Honorarium Koordinator Perangkat Pengelola Layanan**

Honorarium yang diberikan kepada Sekretaris Daerah/Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai koordinator Perangkat Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan monitoring persiapan dan pelaksanaan kontrak kepada Bupati, serta pimpinan Perangkat Daerah selaku PA/KPA lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

**4.3 Honorarium Ketua**

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Ketua Perangkat Pengelola layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat dan Pokja Pemilihan pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa.

**4.4 Honorarium Sekretaris**

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Subbagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Sekretaris Perangkat Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mengadakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatusahaan, perlengkapan dan rumah tangga perangkat dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada menugaskan anggota Kelompok Kerja(Pokja) Pemilihan sesuai dengan beban kerja masing-masing.

**4.5 Honorarium Koordinator Teknis Bidang Monitoring dan Evaluasi**

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Subbagian Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Teknis bidang Monitoring dan Evaluasi untuk mengoordinasikan laporan hasil proses pemilihan PBJ pada Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan tata kelola Adminstrasi Pengelolaan Barang/Jasa.

**4.6 Honorarium Koordinator Teknis Bidang Pembinaan**

Honorarium yang diberikan kepada Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai Koordinator Teknis Bidang Pembinaan untuk melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terutama para pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.

**4.7 Honorarium Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan**

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan untuk mendukung perangkat Pengelola layanan Pengadaan dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan :

Yang termasuk Pendukung Pengelola Layanan Pengadaan adalah :

1. Tim Teknis;
2. Tim Ahli;
3. Pengelola LPSE; dan
4. Pengelola Administrasi Pemilihan.

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### 4.8 Kelompok Kerja Khusus Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Kelompok Kerja Khusus Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4.9 Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

#### 5. HONORARIUM/JASA NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBWA ACARA/PANITIA

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 5  | <b>HONORARIUM/JASA NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA</b>        |        |                    |     |
|    | <b>5.1 Honorarium/Jasa Narasumber/ Pembahas</b>                                   |        |                    |     |
|    | a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Pembicara Profesional | OJ     | 1.700.000          |     |
|    | b. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan  | OJ     | 1.400.000          |     |
|    | c. Pejabat Eselon I/Tenaga Ahli/Pakar/yang disetarakan                            | OJ     | 1.200.000          |     |
|    | d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan   | OJ     | 1.000.000          |     |
|    | e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan                                   | OJ     | 900.000            |     |
|    | <b>5.2 Honorarium/Jasa Moderator</b>  | OK     | 700.000            |     |
|    | <b>5.3 Honorarium/Jasa Pembawa Acara</b>  | OK     | 400.000            |     |
|    | <b>5.4 Honorarium/Jasa Panitia</b>  |        |                    |     |
|    | a. Penanggung Jawab   | OK     | 450.000            |     |
|    | b. Ketua/Wakil ketua  | OK     | 400.000            |     |
|    | c. Sekretaris   | OK     | 300.000            |     |
|    | d. Anggota  | OK     | 300.000            |     |

#### Penjelasan :

- 5.1 Honorarium/Jasa Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) melalui tatap muka langsung maupun zoom meeting.

Honorarium/jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
  - narasumber atau pembahas berasal dari:
    - luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
    - dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.
- 5.2 Honorarium/jasa moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium/jasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

- 5.3 Honorarium/jasa pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
- 5.4 Honorarium/jasa panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

**6. HONORARIUM/JASA TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**

| NO       | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----------|--|--------|--------------------|-----|
| 1        | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>6</b> | <b>HONORARIUM/JASA TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b> |        |                    |     |
|          | <b>6.1 Honorarium/Jasa Tim Pelaksana Kegiatan</b>                                    |        |                    |     |
|          | <b>6.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah</b>                                      |        |                    |     |
|          | a. Pengarah  | OB     | 1.500.000          |     |
|          | b. Penanggung Jawab  | OB     | 1.250.000          |     |
|          | c. Ketua   | OB     | 1.000.000          |     |
|          | d. Wakil ketua   | OB     | 850.000            |     |
|          | e. Sekretaris  | OB     | 750.000            |     |
|          | f. Anggota   | OB     | 750.000            |     |
|          | <b>6.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>                                  |        |                    |     |
|          | a. Pengarah  | OB     | 750.000            |     |
|          | b. Penanggung Jawab  | OB     | 700.000            |     |
|          | c. Ketua   | OB     | 650.000            |     |
|          | d. Wakil ketua   | OB     | 600.000            |     |
|          | e. Sekretaris  | OB     | 500.000            |     |
|          | f. Anggota   | OB     | 500.000            |     |
|          | <b>6.2. Honorarium/Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>                       |        |                    |     |
|          | <b>6.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>                                  |        |                    |     |
|          | a. Ketua/Wakil Ketua   | OB     | 250.000            |     |
|          | b. Anggota   | OB     | 220.000            |     |
|          | <b>6.3. Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>                |        |                    |     |
|          | <b>6.3.1 Nilai Pagu Anggaran sampai dengan 25 Miliar</b>                             |        |                    |     |
|          | a. Penanggung Jawab  | OB     | 500.000,-          |     |
|          | b. Ketua   | OB     | 450.000,-          |     |
|          | c. Sekretaris  | OB     | 400.000,-          |     |
|          | d. Anggota   | OB     | 350.000,-          |     |
|          | <b>6.3.2 Nilai Pagu Anggaran di atas 25 Miliar</b>                                   |        |                    |     |
|          | a. Penanggung Jawab  | OB     | 1.000.000,-        |     |
|          | b. Ketua   | OB     | 900.000,-          |     |
|          | c. Sekretaris  | OB     | 800.000,-          |     |
|          | d. Anggota   | OB     | 650.000,-          |     |

**Penjelasan :**

- 6.1 Honorarium/Jasa Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
  - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
    1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
    2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
  - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;□
  - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 6.2 Honorarium/Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

- 6.3 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Honorarium diberikan perbulan berdasarkan Pagu.

**7. HONORARIUM/JASA PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA**

| NO | URAIAN   |  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  |  | 3      | 4                  | 5   |
| 7  | <b>HONORARIUM/JASA PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA</b> |  |        |                    |     |
|    | 7.1  | Honorarium/Jasa Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli | OK     | 1.800.000          |     |
|    | 7.2  | Honorarium Beracara                                | OK     | 1.800.000          |     |

**Penjelasan :**

- 7.1 Honorarium/Jasa Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

- 7.2 Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

**8. HONORARIUM/JASA PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

| NO | URAIAN   |                             | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|-----------------------------|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  |                             | 3      | 4                  | 5   |
| 8  | <b>HONORARIUM/JASA PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b> |                             |        |                    |     |
|    | 8.1  | SLTA                        | OB     | 2.100.000          |     |
|    | 8.2  | DI/DII/DIII/Sarjana Terapan | OB     | 2.400.000          |     |
|    | 8.3  | Sarjana (S1)                | OB     | 2.600.000          |     |
|    | 8.4  | Master (S2)                 | OB     | 2.800.000          |     |
|    | 8.5  | Doktor (S3)                 | OB     | 3.000.000          |     |

**Penjelasan :**

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133 % (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

**9. HONORARIUM/JASA ROHANIAWAN**

| NO | URAIAN                     | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|----------------------------|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3      | 4                  | 5   |
| 9  | HONORARIUM/JASA ROHANIAWAN | OK     | 400.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

**10. HONORARIUM/JASA TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE**

| NO | URAIAN  | SATUAN      | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|-------------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3           | 4                  | 5   |
| 10 | HONORARIUM/JASA TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE |             |                    |     |
|    | <b>10.1 Honorarium/Jasa Tim Penyusunan Jurnal</b>   |             |                    |     |
|    | a. Penanggung Jawab   | Oter        | 500.000            |     |
|    | b. Redaktur   | Oter        | 400.000            |     |
|    | c. Penyunting/ Editor   | Oter        | 300.000            |     |
|    | d. Desain Grafis  | Oter        | 180.000            |     |
|    | e. Fotografer   | Oter        | 180.000            |     |
|    | f. Sekretariat  | Oter        | 150.000            |     |
|    | g. Pembuat Artikel  | Per Halaman | 200.000            |     |
|    | <b>10.2 Honorarium/Jasa Tim Penyusunan Buletin/Majalah</b>  |             |                    |     |
|    | a. Penanggung Jawab   | Oter        | 400.000            |     |
|    | b. Redaktur   | Oter        | 300.000            |     |
|    | c. Penyunting/ Editor   | Oter        | 250.000            |     |
|    | d. Desain Grafis  | Oter        | 180.000            |     |
|    | e. Fotografer   | Oter        | 180.000            |     |
|    | f. Sekretariat  | Oter        | 150.000            |     |
|    | g. Pembuat Artikel  | Per Halaman | 100.000            |     |
|    | <b>10.3 Honorarium/Jasa Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website</b>                       |             |                    |     |
|    | a. Penanggung Jawab   | OB          | 500.000            |     |
|    | b. Redaktur   | OB          | 450.000            |     |
|    | c. Editor   | OB          | 400.000            |     |
|    | d. Web Admin  | OB          | 350.000            |     |
|    | e. Web Developer  | OB          | 300.000            |     |
|    | f. Pembuat Artikel  | Per Halaman | 100.000            |     |



|  |             |  |      |           |  |
|--|-------------|--|------|-----------|--|
|  |             | g. Fotografer                          | OB   | 1.000.000 |  |
|  | <b>10.4</b> | Pengelola Website                      | OB   | 800.000   |  |
|  | <b>10.5</b> | Operator Publikasi                     | OB   | 1.000.000 |  |
|  | <b>10.6</b> | Pembuatan Video Iklan                  | Kali | 3.000.000 |  |
|  | <b>10.7</b> | Jasa Publikasi melalui Media Cetak     | Kali | 2.000.000 |  |
|  | <b>10.8</b> | Jasa Publikasi melalui Media Eletronik | Kali | 2.500.000 |  |
|  | <b>10.9</b> | Jasa Publikasi melalui Media Online    | Kali | 1.000.000 |  |

Penjelasan :

- 10.1 Honorarium/Jasa Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
- 10.2 Honorarium/Jasa Tim Penyusunan Buletin/Majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- 10.3 Honorarium/Jasa Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
- Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 10.4 Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pengelola Website.
- 10.5 Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Operator Publikasi.
- 10.6 Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pembuatan Video Iklan.
- 10.7 Biaya yang diberikan untuk Jasa Publikasi melalui Media Cetak.
- 10.8 Biaya yang diberikan untuk Jasa Publikasi melalui Media Elektronik.
- 10.9 Biaya yang diberikan untuk Jasa Publikasi melalui Media Online.

#### 11. HONORARIUM/JASA PENYELENGGARA UJIAN

| NO        | URAIAN  | SATUAN               | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|----------------------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3                    | 4                  | 5   |
| <b>11</b> | <b>HONORARIUM/JASA PENYELENGGARA UJIAN</b>                                  |                      |                    |     |
|           | <b>11.1 Honorarium/Jasa Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar</b>    |                      |                    |     |
|           | a. Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian                                      | Naskah/<br>Pelajaran | 150.000            |     |
|           | b. Pengawas Ujian   | OH                   | 240.000            |     |
|           | c. Pemeriksa Hasil Ujian  | Siswa/<br>Mata Ujian | 5.000              |     |
|           | <b>11.2 Honorarium/Jasa Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah</b> |                      |                    |     |
|           | a. Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian                                      | Naskah/<br>Pelajaran | 190.000            |     |
|           | b. Pengawas Ujian   | OH                   | 270.000            |     |
|           | c. Pemeriksa Hasil Ujian  | Siswa/<br>Mata Ujian | 7.500              |     |
|           | <b>11.3 Kegiatan Tambahan Pembelajaran</b>                                  |                      |                    |     |
|           | a. Non PNS  | OJP                  | 7.500              |     |
|           | b. PNS  | OJP                  | 5.000              |     |
|           | <b>11.4 Kegiatan Ekstrakurikuler</b>  |                      |                    |     |
|           | a. Non PNS  | OJP                  | 7.500              |     |
|           | b. PNS  | OJP                  | 5.000              |     |
|           | c. Tenaga Ahli/Pelatih (dari instansi terkait)                              | OJP                  | 200.000            |     |
|           | <b>11.5 Kegiatan Tambahan Pembelajaran</b>                                  |                      |                    |     |

|  |              |   |                  |           |  |
|--|--------------|---|------------------|-----------|--|
|  |              | a. Non PNS  | OH               | 100.000   |  |
|  |              | b. PNS  | OH               | 100.000   |  |
|  | <b>11.6</b>  | <b>Kegiatan Ulangan, Ujian Sekolah dan Pelaksanaan US Berbasis Komputer</b>                                 |                  |           |  |
|  |              | a. Pengawas Ujian Sekolah Tingkat SD  | OH               | 100.000   |  |
|  |              | b. Pengawas Ujian Sekolah Tingkat SMP   | OH               | 150.000   |  |
|  |              | b.1. Teknisi  | OH               | 250.000   |  |
|  |              | b.2. Proktor  | OH               | 300.000   |  |
|  | <b>11.7</b>  | <b>Jasa Penulis Ijazah</b>  | Siswa/<br>Lembar | 7.500     |  |
|  | <b>11.8</b>  | <b>Honorarium/Jasa Prestasi Kerja Non PNS</b>   |                  |           |  |
|  |              | a. Guru Honoror   | OB               | 300.000   |  |
|  |              | b. Tenaga Administrasi  | OB               | 300.000   |  |
|  | <b>11.9</b>  | <b>Tambahan Jasa Upah Tenaga Honoror Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkup Pemkab Maros</b> |                  |           |  |
|  |              | 1. Jasa Upah Guru Honoror   | OB               | 600.000   |  |
|  |              | 2. Tambahan Jasa Upah Daerah Khusus dan Sekolah dengan jumlah Siswa paling banyak 50 orang.                 | OB               | 400.000   |  |
|  | <b>11.10</b> | Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ)  | Orang            | 7.500.000 |  |
|  | <b>11.11</b> | Honor Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional   | Org/Kali         | 2.000.000 |  |
|  | <b>11.12</b> | Jasa Upah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Honoror  | OB               | 600.000   |  |

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Jasa Upah diberikan kepada Honoror Guru Kelas, Guru Pendidikan Agama, Guru Penjaskes dan Mata Pelajaran Lainnya pada jenjang SD, Guru mata Pelajaran pada Jenjang SMP serta tenaga kependidikan pada SD dan SMP yang tidak menerima dana BOS Reguler. Tambahan Jasa Upah yang diberikan kepada Guru Kelas, Guru Pendidikan Agama, Guru Penjaskes dan Mata Pelajaran lainnya pada jenjang SD, Guru Mata Pelajaran jenjang SMP di Daerah Khusus serta kepada Guru Honoror pada SD dan SMP dengan Jumlah Siswa paling banyak 50 Orang, sesuai Ketentuan yang berlaku.

## 12 HONORARIUM/JASA PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA

| NO        | URAIAN  | SATUAN         | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|----------------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3              | 4                  | 5   |
| <b>12</b> | <b>HONORARIUM/JASA PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA</b> |                |                    |     |
|           | 12.1 Honorarium/Jasa Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota  | Per Butir Soal | 100.000            |     |
|           | 12.2 Honorarium/Jasa Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota      |                |                    |     |
|           | a. Telaah Materi Soal   | Per Butir Soal | 45.000             |     |
|           | b. Telaah Bahasa Soal   | Per Butir Soal | 20.000             |     |

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penJrusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparaturn sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

**13. HONORARIUM/JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)**

| NO        | URAIAN  | SATUAN    | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|-----------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3         | 4                  | 5   |
| <b>13</b> | <b>HONORARIUM/JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>                 |           |                    |     |
|           | 13.1 Honorarium/Jasa Penceramah   | OJP       | 1.000.000          |     |
|           | 13.2 Honorarium/Jasa Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  | OJP       | 300.000            |     |
|           | 13.3 Honorarium/Jasa Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | OJP       | 200.000            |     |
|           | 13.4 Honorarium/Jasa Penyusunan Modul Diklat  | Per Modul | 5.000.000          |     |
|           | 13.5 Honorarium/Jasa Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat  |           |                    |     |
|           | a. Lama Diklat s.d. 5 hari:   |           |                    |     |
|           | 1) Penanggung Jawab   | OK        | 450.000            |     |
|           | 2) Ketua/Wakil ketua  | OK        | 400.000            |     |
|           | 3) Sekretaris   | OK        | 300.000            |     |
|           | 4) Anggota  | OK        | 300.000            |     |
|           | b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:  |           |                    |     |
|           | 1) Penanggung Jawab   | OK        | 675.000            |     |
|           | 2) Ketua/Wakil ketua  | OK        | 600.000            |     |
|           | 3) Sekretaris   | OK        | 450.000            |     |
|           | 4) Anggota  | OK        | 450.000            |     |
|           | c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:  |           |                    |     |
|           | 1) Penanggung Jawab   | OK        | 900.000            |     |
|           | 2) Ketua/Wakil ketua  | OK        | 800.000            |     |
|           | 3) Sekretaris   | OK        | 600.000            |     |
|           | 4) Anggota  | OK        | 600.000            |     |
|           | 13.6 Bantuan Uang Pembinaan untuk diserahkan kepada Wirausaha Muda                                | OK        | 500.000            |     |

Penjelasan :

- 13,1 Honorarium/Jasa Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
  - berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
  - dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- 13,2 Honorarium/Jasa Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- 13,3 Honorarium/Jasa Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13,4 Honorarium/Jasa Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 13.5 Honorarium/Jasa Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- 13.6 Uang Pembinaan diberikan kepada peserta Pelatihan Wirausaha Muda.

**14. HONORARIUM/JASA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>14</b> | <b>HONORARIUM/JASA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>           |        |                    |     |
|           | 14.1 Honorarium/Jasa Tim Anggaran Pemerintah Daerah             |        |                    |     |
|           | a. Pembina  | OB     | 3.500.000          |     |
|           | b. Pengarah   | OB     | 3.000.000          |     |
|           | c. Ketua/Koordinator  | OB     | 2.500.000          |     |
|           | d. Wakil Ketua  | OB     | 2.000.000          |     |
|           | e. Sekretaris   | OB     | 1.500.000          |     |
|           | f. Anggota  | OB     | 1.300.000          |     |
|           | 14.2 Honorarium/Jasa Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah |        |                    |     |
|           | a. Ketua  | OB     | 1.000.000          |     |
|           | b. Wakil Ketua  | OB     | 900.000            |     |
|           | c. Anggota  | OB     | 600.000            |     |

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

**15. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>15</b> | <b>HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)</b>  |        |                    |     |
|           | <b>15.1 Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung Bendahara</b> |        |                    |     |
|           | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta  | OB     | 420.000            |     |
|           | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta   | OB     | 510.000            |     |
|           | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta   | OB     | 610.000            |     |
|           | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar   | OB     | 700.000            |     |
|           | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar   | OB     | 890.000            |     |
|           | f. Nilai pagu dana. diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar   | OB     | 1.070.000          |     |
|           | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar   | OB     | 1.260.000          |     |

|  |             |   |    |           |  |
|--|-------------|---|----|-----------|--|
|  |             | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar  | OB | 1.540.000 |  |
|  | <b>15.2</b> | <b>Bendahara Penerimaan</b>                                 |    |           |  |
|  |             | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta                        | OB | 340.000   |  |
|  |             | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta   | OB | 420.000   |  |
|  |             | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta   | OB | 500.000   |  |
|  |             | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar   | OB | 570.000   |  |
|  |             | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | OB | 730.000   |  |
|  |             | f. Nilai pagu dana. diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar | OB | 880.000   |  |
|  |             | g. Nilai pagu dana. diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar  | OB | 1.030.000 |  |
|  |             | h. Nilai pagu dana. diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | OB | 1.260.000 |  |
|  | <b>15.3</b> | <b>Petugas Penerimaan PNBPN atau Anggota</b>                |    |           |  |
|  |             | a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta                        | OB | 260.000   |  |
|  |             | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta   | OB | 310.000   |  |
|  |             | c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta   | OB | 370.000   |  |
|  |             | d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar   | OB | 430.000   |  |
|  |             | e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | OB | 540.000   |  |
|  |             | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar   | OB | 660.000   |  |
|  |             | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar   | OB | 770.000   |  |
|  |             | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar  | OB | 940.000   |  |

Penjelasan :

Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/ TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBPN fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- jumlah petugas penerima PNBPN atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBPN dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBPN fungsional.

Catatan:

Dalam hal Pengelola PNBPN telah diberikan tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola PNBPN.

**16. HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH / PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN**

| NO          | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-------------|--|--------|--------------------|-----|
| 1           | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>16</b>   | <b>HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH / PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN</b> |        |                    |     |
| <b>16.1</b> | <b>Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 500 Juta</b>   |        |                    |     |
|             | a. Ketua Merangkap Anggota   | OBP    | 1.000.000          |     |
|             | b. Sekretaris Merangkap Anggota  | OBP    | 700.000            |     |
|             | c. Anggota   | OBP    | 600.000            |     |
|             | d. Sekretariat   | OBP    | 400.000            |     |
| <b>16.2</b> | <b>Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar</b>                           |        |                    |     |
|             | a. Ketua Merangkap Anggota   | OBP    | 1.200.000          |     |
|             | b. Sekretaris Merangkap Anggota  | OBP    | 1.000.000          |     |
|             | c. Anggota   | OBP    | 800.000            |     |
|             | d. Sekretariat   | OBP    | 600.000            |     |

|  |             |   |     |           |  |
|--|-------------|---|-----|-----------|--|
|  | <b>16.3</b> | <b>Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar</b>  |     |           |  |
|  |             | a. Ketua Merangkap Anggota  | OBP | 1.400.000 |  |
|  |             | b. Sekretaris Merangkap Anggota                                   | OBP | 1.200.000 |  |
|  |             | c. Anggota  | OBP | 1.000.000 |  |
|  |             | d. Sekretariat  | OBP | 700.000   |  |
|  | <b>16.4</b> | <b>Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar</b> |     |           |  |
|  |             | a. Ketua Merangkap Anggota  | OBP | 1.600.000 |  |
|  |             | b. Sekretaris Merangkap Anggota                                   | OBP | 1.400.000 |  |
|  |             | c. Anggota  | OBP | 1.200.000 |  |
|  |             | d. Sekretariat  | OBP | 800.000   |  |
|  | <b>16.5</b> | <b>TIM KAJIAN</b>   |     |           |  |
|  |             | a. Ketua Merangkap Anggota  | OBP | 1.100.000 |  |
|  |             | b. Sekretaris Merangkap Anggota                                   | OBP | 800.000   |  |
|  |             | c. Anggota  | OBP | 750.000   |  |

Penjelasan :

Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Persiapan pengadaan Tanah/melaksanakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum. Honorarium diberikan sejak penyiapan pelaksanaan Tanah sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.

Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi Pengadaan Tanah dan Sekretaris adalah Pejabat pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pengadaan Tanah, sedangkan Anggota adalah Kepala Bagian Hukum SETDA Maros dan Perangkat Daerah yang membutuhkan Pengadaan Tanah serta Camat, Lurah/Desa Lokasi Pengadaan Tanah.

Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Pegawai yang diberi tugas untuk membantu Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Ketua adalah Pejabat/staf yang membidangi Pengadaan Tanah dan anggota adalah Staf yang membidang Pengadaan Tanah dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

#### **17. HONORARIUM/JASA PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/ PENGAWASAN BANGUNAN**

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>  | <b>SATUAN</b> | <b>BIAYA TA 2022 (Rp)</b> | <b>KET</b> |
|-----------|--|---------------|---------------------------|------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>      | <b>4</b>                  | <b>5</b>   |
| <b>17</b> | <b>HONORARIUM/JASA PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/ PENGAWASAN BANGUNAN</b> |               |                           |            |
|           | <b>17.1 Narasumber</b>   |               |                           |            |
|           | a. Bupati  | OJ            | 2.000.000,-               |            |
|           | b. Wakil Bupati  | OJ            | 1.500.000,-               |            |
|           | <b>17.2 Pengarah</b>   |               |                           |            |
|           | a. Kepala Perangkat Daerah   | OP            | 1.000.000                 |            |
|           | b. Sekretaris Perangkat Daerah   | OP            | 800.000                   |            |
|           | <b>17.3 Asistensi</b>  |               |                           |            |
|           | a. Kepala Bidang   | OP            | 600.000                   |            |
|           | b. Kepala Seksi  | OP            | 400.000                   |            |
|           | <b>17.4 Honorarium Perencana Bangunan</b>                                      |               |                           |            |
|           | <b>17.4.1 Perencana Bangunan Gedung</b>  |               |                           |            |
|           | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta                             |               |                           |            |
|           | Estimator (Penghitung RAB)   | OP            | 700.000                   |            |
|           | Drafter  | OP            | 900.000                   |            |
|           | Surveyor (per orang)   | OP            | 300.000                   |            |
|           | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta        |               |                           |            |
|           | Estimator (Penghitung RAB)   | OP            | 1.200.000                 |            |
|           | Drafter  | OP            | 1.400.000                 |            |

|  |  |   |    |           |  |
|--|--|---|----|-----------|--|
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |  | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 s/d Rp. 2 miliar        |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.500.000 |  |
|  |  | Drafter   | OP | 1.800.000 |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |  | d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2 miliar                                   |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 2.000.000 |  |
|  |  | Drafter   | OP | 2.250.000 |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |  | <b>17.4.2 Perencana Bangunan Non Gedung</b>                               |    |           |  |
|  |  | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                        |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 500.000   |  |
|  |  | Drafter   | OP | 600.000   |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 400.000   |  |
|  |  | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 s/d Rp. 2 miliar        |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 750.000   |  |
|  |  | Drafter   | OP | 900.000   |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |  | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar                    |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.300.000 |  |
|  |  | Drafter   | OP | 1.500.000 |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |  | <b>17.4.3 Perencana Bangunan Sipil Jalan</b>                              |    |           |  |
|  |  | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta                        |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 750.000   |  |
|  |  | Drafter   | OP | 600.000   |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |  | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta   |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.000.000 |  |
|  |  | Drafter   | OP | 800.000   |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |  | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.200.000 |  |
|  |  | Drafter   | OP | 900.000   |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |  | d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar                |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.500.000 |  |
|  |  | Drafter   | OP | 1.200.000 |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 600.000   |  |
|  |  | e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar                                   |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.800.000 |  |
|  |  | Drafter   | OP | 1.500.000 |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 700.000   |  |
|  |  | <b>17.4.4 Perencana Bangunan Sipil Jembatan</b>                           |    |           |  |
|  |  | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta                        |    |           |  |
|  |  | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.200.000 |  |
|  |  | Drafter   | OP | 1.000.000 |  |
|  |  | Surveyor (per orang)  | OP | 600.000   |  |

|  |               |   |    |           |  |
|--|---------------|---|----|-----------|--|
|  |               | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta   |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.500.000 |  |
|  |               | Drafter   | OP | 1.200.000 |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 700.000   |  |
|  |               | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.750.000 |  |
|  |               | Drafter   | OP | 1.400.000 |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 800.000   |  |
|  |               | d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar                |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 2.000.000 |  |
|  |               | Drafter   | OP | 1.500.000 |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 1.000.000 |  |
|  |               | e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar                                   |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 2.200.000 |  |
|  |               | Drafter   | OP | 1.800.000 |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 1.000.000 |  |
|  | <b>17.4.5</b> | <b>Perencana Penerangan Jalan Umum (PJU)</b>                              |    |           |  |
|  |               | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                        |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.000.000 |  |
|  |               | Drafter   | OP | 900.000   |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |               | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.300.000 |  |
|  |               | Drafter   | OP | 1.000.000 |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |               | c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar                |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.500.000 |  |
|  |               | Drafter   | OP | 1.250.000 |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |               | d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar                                   |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.750.000 |  |
|  |               | Drafter   | OP | 1.300.000 |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  | <b>17.4.6</b> | <b>Perencana Sumber Daya Air</b>  |    |           |  |
|  |               | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta                        |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 750.000   |  |
|  |               | Drafter   | OP | 600.000   |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |               | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta   |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.000.000 |  |
|  |               | Drafter   | OP | 800.000   |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |               | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar |    |           |  |
|  |               | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.200.000 |  |
|  |               | Drafter   | OP | 900.000   |  |
|  |               | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |
|  |               | d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar                |    |           |  |



|  |   |    |           |  |
|--|---|----|-----------|--|
|  | Estimator (Penghitung RAB)              | OP | 1.500.000 |  |
|  | Drafter                                 | OP | 1.200.000 |  |
|  | Surveyor (per orang)                    | OP | 600.000   |  |
|  | e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar |    |           |  |
|  | Estimator (Penghitung RAB)              | OP | 1.500.000 |  |
|  | Drafter                                 | OP | 1.200.000 |  |
|  | Surveyor (per orang)                    | OP | 600.000   |  |

Penjelasan :

Honorarium Narasumber diberikan berdasarkan jumlah jam pembahasan setiap program/kegiatan dengan perincian :

- Setengah jam untuk pembahasan dengan nilai total anggaran s/d 500 juta
- Satu jam untuk pembahasan dengan nilai total anggaran di atas 500 juta

Honorarium pengarah atau asistensi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengarah atau asistensi pada perencanaan dan pengawasan bangunan. Honorarium diberikan per paket.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai perencana bangunan. Honorarium diberikan per paket.

**18. HONORARIUM/JASA PENGAWAS BANGUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>18</b> | <b>HONORARIUM/JASA PENGAWAS BANGUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS</b> |        |                    |     |
|           | <b>18.1 Pengawas Bangunan Gedung/Non Gedung</b>                                 |        |                    |     |
|           | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                              | OBP    | 500.000            |     |
|           | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp.500 juta s/d Rp. 2 miliar          | OBP    | 600.000            |     |
|           | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar                          | OBP    | 600.000            |     |
|           | <b>18.2 Pengawas Bangunan Sipil Jalan/SDA</b>                                   |        |                    |     |
|           | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                              | OBP    | 600.000            |     |
|           | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar         | OBP    | 700.000            |     |
|           | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar         | OBP    | 700.000            |     |
|           | d. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar                          | OBP    | 750.000            |     |
|           | <b>18.3 Pengawas Bangunan Sipil Jembatan</b>                                    |        |                    |     |
|           | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                              | OBP    | 600.000            |     |
|           | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp.500 juta s/d Rp. 2 miliar          | OBP    | 700.000            |     |
|           | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar         | OBP    | 750.000            |     |
|           | d. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar                          | OBP    | 800.000            |     |
|           | <b>18.4 Pengawas Penerangan Jalan Umum (PJU)</b>                                |        |                    |     |
|           | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                              | OBP    | 500.000            |     |
|           | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp.500 juta s/d Rp. 2 miliar          | OBP    | 550.000            |     |
|           | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar         | OBP    | 600.000            |     |
|           | d. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar                          | OBP    | 650.000            |     |

**19. HONORARIUM/JASA PERENCANA BANGUNAN NON ASN**

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--------|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2      | 3      | 4                  | 5   |

|           |   |   |    |           |  |  |
|-----------|---|---|----|-----------|--|--|
| <b>19</b> | <b>HONORARIUM/JASA PERENCANAAN/BANGUNAN NON ASN</b> |   |    |           |  |  |
|           | <b>19.1</b>   | <b>Perencana Bangunan Gedung</b>  |    |           |  |  |
|           |   | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                        |    |           |  |  |
|           |   | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.400.000 |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 1.500.000 |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 800.000   |  |  |
|           |   | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar   |    |           |  |  |
|           |   | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.900.000 |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 2.000.000 |  |  |
|           |   | Surveyor  | OP | 1.000.000 |  |  |
|           |   | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar                    |    |           |  |  |
|           |   | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 2.400.000 |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 2.500.000 |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 1.200.000 |  |  |
|           | <b>19.2</b>   | <b>Perencana Non Bangunan</b>   |    |           |  |  |
|           |   | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                        |    |           |  |  |
|           |   | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 650.000   |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 750.000   |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 500.000   |  |  |
|           |   | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 s/d Rp. 2 miliar        |    |           |  |  |
|           |   | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 900.000   |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 1.000.000 |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 600.000   |  |  |
|           |   | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar                    |    |           |  |  |
|           |   | Estimator (Penghitung RAB)  | OP | 1.400.000 |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 1.500.000 |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 750.000   |  |  |
|           | <b>19.3</b>   | <b>Perencana Bangunan Sipil Jalan</b>                                     |    |           |  |  |
|           |   | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                        |    |           |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 650.000   |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 450.000   |  |  |
|           |   | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar |    |           |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 800.000   |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 550.000   |  |  |
|           |   | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar |    |           |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 900.000   |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 650.000   |  |  |
|           |   | d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar                                   |    |           |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 950.000   |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 750.000   |  |  |
|           | <b>19.4</b>   | <b>Perencana Bangunan Sipil Jembatan</b>                                  |    |           |  |  |
|           |   | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                        |    |           |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 800.000   |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 550.000   |  |  |
|           |   | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar |    |           |  |  |
|           |   | Drafter   | OP | 900.000   |  |  |
|           |   | Surveyor (per orang)  | OP | 650.000   |  |  |

|  |             |   |    |           |  |
|--|-------------|---|----|-----------|--|
|  |             | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar |    |           |  |
|  |             | Drafter   | OP | 1.000.000 |  |
|  |             | Surveyor (per orang)  | OP | 750.000   |  |
|  |             | d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar                                   |    |           |  |
|  |             | Drafter   | OP | 1.200.000 |  |
|  |             | Surveyor (per orang)  | OP | 850.000   |  |
|  | <b>19.5</b> | <b>Perencana Penerangan Jalan Umum (PJU)</b>                              |    |           |  |
|  |             | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                        |    |           |  |
|  |             | Drafter   | OP | 650.000   |  |
|  |             | Surveyor (per orang)  | OP | 450.000   |  |
|  |             | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar |    |           |  |
|  |             | Drafter   | OP | 800.000   |  |
|  |             | Surveyor (per orang)  | OP | 550.000   |  |
|  |             | c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2.5 milyar s/d Rp. 5 miliar                |    |           |  |
|  |             | Drafter   | OP | 900.000   |  |
|  |             | Surveyor (per orang)  | OP | 650.000   |  |
|  |             | d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar                                   |    |           |  |
|  |             | Drafter   | OP | 950.000   |  |
|  |             | Surveyor (per orang)  | OP | 750.000   |  |
|  | <b>19.6</b> | <b>Perencana Sumber Daya Air</b>  |    |           |  |
|  |             | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta                        |    |           |  |
|  |             | Drafter   | OP | 650.000   |  |
|  |             | Surveyor (per orang)  | OP | 450.000   |  |
|  |             | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2.5 miliar |    |           |  |
|  |             | Drafter   | OP | 800.000   |  |
|  |             | Surveyor (per orang)  | OP | 550.000   |  |
|  |             | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar |    |           |  |
|  |             | Drafter   | OP | 900.000   |  |
|  |             | Surveyor (per orang)  | OP | 650.000   |  |
|  |             | d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 milyar                                   |    |           |  |
|  |             | Drafter   | OP | 950.000   |  |
|  |             | Surveyor (per orang)  | OP | 750.000   |  |

**Penjelasan :**

Honorarium yang diberikan kepada personil Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati dan melaksanakan tugas sebagai perencana bangunan/non bangunan, honorarium diberikan per paket. Apabila perencana bangunan/non bangunan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka honorarium yang berlaku adalah honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

**20. HONORARIUM/JASA PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA**

| NO          | URAIAN  | SATUAN    | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-------------|---|-----------|--------------------|-----|
| 1           | 2   | 3         | 4                  | 5   |
| <b>20</b>   | <b>HONORARIUM/JASA PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA</b> |           |                    |     |
| <b>20.1</b> | <b>Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b>       |           |                    |     |
|             | Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta                               | Per Paket | 400.000,-          |     |
| <b>20.2</b> | <b>Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan/- Pengadaan Barang/Jasa</b>     |           |                    |     |
|             | a. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 1 miliar       | OP        | 300.000            |     |

|  |  |   |    |           |  |
|--|--|---|----|-----------|--|
|  |  | b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar | OP | 600.000   |  |
|  |  | c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar                  | OP | 1.000.000 |  |

**Penjelasan :**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk memeriksa/menerima barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket dengan jumlah pejabat maksimal 3 orang, sedangkan honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan diberikan per paket. Jumlah Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa sebanyak-banyaknya 5 orang

**Catatan :**

Dalam hal Pemeriksaan/Penerimaan Barang/jasa Paket Pekerjaan Konstruksi, Panitia Penerima hasil Pekerjaan dalam melakukan Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Akhir Pekerjaan (FHO), dapat diberikan Honorarium Tambahan maksimal sebesar 50% dari nilai Honorarium paket.

**21. HONORARIUM/JASA TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENDUKUNG PEKERJAAN INFRASTRUKTUR**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 21 | <b>HONORARIUM/JASA TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENDUKUNG PEKERJAAN INFRASTRUKTUR</b> |        |                    |     |
|    | 21.1 Tim Ahli Bangunan Gedung   | OK     | 1.250.000          |     |
|    | 21.2 Penilik Bangunan Gedung  | OB     | 650.000            |     |
|    | 21.3 Tim Teknis Sertifikasi Layak Fungsi  | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 21.4 Tim Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung  | OB     | 600.000            |     |
|    | 21.5 Tim Teknis Pendukung Pekerjaan Infrastruktur   | OB     | 750.000            |     |

**Penjelasan :**

- 21,1 Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Asosiasi, Profesi, Masyarakat Ahli Jasa Konstruksi, Dinas PUPR dan Instansi Teknis lainnya yang terkait. Tim ahli bangunan gedung mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan masukan dalam hal penelitian dokumen teknis bangunan dan lingkungan, Bangunan Cagar Budaya serta masalah penyelenggaraan bangunan gedung lainnya. Tim ini juga bertugas memberi pertimbangan guna penyempurnaan Peraturan Perundangan-undangan terkait Bangunan Gedung tingkat Kabupaten/Kota.
- 21,2 Penilik Bangunan Gedung adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas memastikan bahwa penyelenggaraan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan baik pada fase konstruksi maupun dalam masa pemanfaatan.
- 21,3 Tim Teknis Sertifikasi Layak Fungsi adalah Aparatur Sipil Negara adalah yang bertugas memeriksa dan mengevaluasi teknis bangunan gedung sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan dengan menganalisis kelengkapan dokumen teknis dan administratif serta verifikasi faktual di lapangan terhadap objek yang dinilai kelayakannya.
- 21,4 Tim Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertugas memfasilitasi, mengoordinasikan, mendokumentasikan seluruh tahapan , tugas dan fungsi penyelenggaraan bangunan oleh instansi penilai bangunan gedung terdiri atas Aparatur Sipil Negara dari instansi penilai bangunan gedung ditambah unsur teknis lainnya yang terkait.
- 21,5 Tim Teknis Pendukung Pekerjaan Infrastruktur bertugas membantu PPK melaksanakan pemeriksaan bersama atas kondisi lokasi pekerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan.

**22. HONORARIUM/JASA PELAKSANA/PENGELOLA PROGRAM INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PIP)**

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 22 | <b>HONORARIUM/JASA PELAKSANA/ PENGELOLA PROGRAM INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PIP)</b>   |        |                    |     |
|    | 22.1 <b>Honorarium/Jasa Panitia Kemitraan Program Infrastruktur Pedesaan (PIP)</b> |        |                    |     |
|    | a. Penanggung jawab  | OB     | 1.000.000          |     |
|    | b. Ketua   | OB     | 800.000            |     |

|  |             |   |    |           |  |
|--|-------------|---|----|-----------|--|
|  |             | c. Wakil Ketua  | OB | 600.000   |  |
|  |             | d. Anggota  | OB | 500.000   |  |
|  | <b>22,2</b> | <b>Honorarium/Jasa District Project Management Unit (DPMU) Program Infrastruktur Pedesaan (PIP)</b> |    |           |  |
|  |             | a. Penanggung jawab   | OB | 1.000.000 |  |
|  |             | b. Ketua  | OB | 800.000   |  |
|  |             | c. Anggota  | OB | 600.000   |  |

**Penjelasan :**

Honorarium Pelaksana/Pengelola Infrastruktur Permukiman (PIP) yaitu honorarium yang diberikan untuk Panitia Kemitraan (PAKEM) dan District Project Management Unit (DPMU). Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan PAMSIMAS dan KOTAKU . Kedua kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

**23. HONORARIUM/JASA PENGELOLA SISTEM AKUTANSI INSTANSI (SAI)**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>23</b> | <b>HONORARIUM/JASA PENGELOLA SISTEM AKUTANSI INSTANSI (SAI)</b> |        |                    |     |
|           | <b>23.1 Unit Akutansi Pengguna Anggaran/Barang</b>              |        |                    |     |
|           | a. Penanggung jawab   | OB     | 600.000            |     |
|           | b. Ketua  | OB     | 500.000            |     |
|           | c. Sekretaris   | OB     | 400.000            |     |
|           | d. Anggota/Petugas  | OB     | 350.000            |     |
|           | <b>23.2 Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang</b>     |        |                    |     |
|           | a. Penanggung jawab   | OB     | 450.000            |     |
|           | b. Ketua  | OB     | 350.000            |     |
|           | c. Anggota/Petugas  | OB     | 300.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan, sesuai dengan unit akutansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akutansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akutansi Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan mengenai jumlah Pengelola SAI adalah paling banyak 7 (tujuh) orang.

**Catatan :**

Perangkat Daerah tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

**24. HONORARIUM/JASA PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>24</b> | <b>HONORARIUM/JASA PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG</b> |        |                    |     |
|           | <b>24.1 Honorarium/Jasa Pengurus Barang Pengelola</b>   |        |                    |     |
|           | a. Nilai Perolehan Aset tetap di atas Rp. 50 Miliar   | OB     | 1.200.000          |     |
|           | b. Nilai Perolehan Aset tetap s/d Rp. 50 Miliar   | OB     | 1.000.000          |     |
|           | <b>24.2 Honorarium/Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengelola</b>                                |        |                    |     |
|           | a. Nilai Perolehan Aset tetap di atas Rp. 50 Miliar   | OB     | 1.000.000          |     |
|           | b. Nilai Perolehan Aset tetap s/d Rp. 50 Miliar   | OB     | 800.000            |     |
|           | <b>24.3 Honorarium/Jasa Pengurus Barang Pengguna</b>  |        |                    |     |
|           | a. Nilai Perolehan Aset tetap diatas Rp. 50 Miliar  | OB     | 1.000.000          |     |

|  |             |   |    |         |  |
|--|-------------|---|----|---------|--|
|  |             | b. Nilai Perolehan Aset tetap s/d Rp. 50 Miliar | OB | 800.000 |  |
|  | <b>24.4</b> | <b>Honorarium/Jasa Pembantu Pengurus Barang</b> | OB | 500.000 |  |
|  | <b>24.5</b> | <b>Honorarium/Jasa Pengurus Barang Pembantu</b> | OB | 400.000 |  |

**Penjelasan :**

24,1 Honorarium Pengurus Barang Pengelola adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang, yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
- i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

24,2 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

24,3 Honorarium Pengurus Barang Pengguna adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah serta berwenang dan bertanggung jawab :

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

24,4 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

24,5 Honorarium Pengurus Barang Pembantu adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang serta berwenang dan bertanggung jawab :

- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang.
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

#### 25. HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 25 | <b>HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA</b> |        |                    |     |
|    | 25.1 SLTA  | OB     | 2.100.000          |     |
|    | 25.2 Sarjana Muda  | OB     | 2.400.000          |     |
|    | 25.3 Sarjana   | OB     | 2.600.000          |     |
|    | 25.4 Master (S2)   | OB     | 2.800.000          |     |

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan tertentu yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

#### 26. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH

| NO | URAIAN                                   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 26 | <b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH</b> | OB     | 400.000            |     |

Penjelasan :

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

#### 27. HONORARIUM/JASA PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, DAN PETUGAS FRONT DESK/PETUGAS FRONT OFFICE/RESEPSIONIS.

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 27 | <b>HONORARIUM/JASA PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, DAN PETUGAS FRONT DESK/PETUGAS FRONT OFFICE/RESEPSIONIS.</b> |        |                    |     |

|  |             |  |   |    |           |  |
|--|-------------|--|---|----|-----------|--|
|  | <b>27.1</b> | <b>Honorarium/Jasa Pengemudi/Sopir</b>                                 |   |    |           |  |
|  |             | a.   | Sopir Bupati/Setingkat                                  | OB | 2.800.000 |  |
|  |             | b.   | Sopir Wakil Bupati                                      | OB | 2.500.000 |  |
|  |             | c.   | Sopir Sekda/Kepala Perangkat Daerah/setingkat Eselon II | OB | 1.000.000 |  |
|  |             | d.   | Sopir Kendaraan Operasional                             | OB | 1.000.000 |  |
|  | <b>27.2</b> | <b>Honorarium Pramubakti/Pramusaji/Juru Masak</b>                      |   |    |           |  |
|  |             | a.   | Pramubakti/Pramusaji Bupati/Wakil Bupati/Sekda          | OB | 800.000   |  |
|  |             | b.   | Pramubakti/Pramusaji Pasien RSUD/Puskesmas              | OB | 1.000.000 |  |
|  |             | c.   | Pramubakti/Pramusaji DPRD                               | OB | 500.000   |  |
|  |             | d.   | Juru masak RSUD   | OB | 1.200.000 |  |
|  | <b>27.3</b> | <b>Honorarium Petugas Front Desk/Petugas Front Office/ Resepsionis</b> |   |    |           |  |
|  |             | a.   | Petugas Front Desk                                      | OB | 700.000   |  |
|  |             | b.   | Petugas Front Office/Resepsionis                        | OB | 500.000   |  |

Penjelasan :

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti/pramusaji, Petugas Front Desk/Petugas Front Office/Resepsionis diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai pengemudi, pramubakti/pramusaji, petugas kebersihan dan Petugas Front Desk/Petugas Front Office/Resepsionis berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

- Untuk pengemudi, Pramubakti/Pramusaji yang melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, dapat ditambah paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- Khusus Untuk Pramubakti/Pramusaji DPRD maksimal 6 (enam) orang.
- Khusus untuk Non Pegawai negeri Sipil, dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari keagamaan.
- Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka atas honorarium, pengemudi, dan pramubakti satuan biaya/upah minimum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

## **28. HONORARIUM AJUDAN, ASISTEN PRIBADI DAN PENGAMANAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

| NO        | URAIAN   |   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2  |   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>28</b> | <b>HONORARIUM AJUDAN, ASISTEN PRIBADI DAN PENGAMANAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b> |   |        |                    |     |
|           | 28.1   | Honorarium Asisten Pribadi                                | OB     | 1.500.000          |     |
|           | 28.2   | Honorarium Koordinator Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati | OB     | 1.500.000          |     |
|           | 28.3   | Honorarium Ajudan   | OB     | 1.000.000          |     |
|           | 28.4   | Honorarium Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati             | OB     | 1.000.000          |     |

Penjelasan :

Honorarium ajudan, asisten pribadi dan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati diberikan tiap bulan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bupati/Wakil Bupati. Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

## **29. HONORARIUM PROTOKOL**

| NO        | URAIAN                     |   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|----------------------------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2                          |   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>29</b> | <b>HONORARIUM PROTOKOL</b> |   |        |                    |     |
|           | 29.1                       | Honorarium Protokol Bupati/Wakil Bupati | OB     | 800.000            |     |
|           | 29.2                       | Honorarium Protokol Sekretaris Daerah   | OB     | 750.000            |     |



Penjelasan :

Honorarium protokol diberikan tiap bulan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan keprotokoleran. Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

### 30. HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN KANTOR JAKARTA

| NO | URAIAN                                       |                                       | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|---------------------------------------|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  |                                       | 3      | 4                  | 5   |
| 30 | HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN KANTOR JAKARTA |                                       |        |                    |     |
|    | 30.1   | Koordinator Kantor Perwakilan Jakarta | OB     | 2.500.000          |     |

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Koordinator pada Kantor Perwakilan Jakarta.

### 31. HONORARIUM TENAGA AHLI

| NO | URAIAN                 |                                       | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2                      |                                       | 3      | 4                  | 5   |
| 31 | HONORARIUM TENAGA AHLI |                                       |        |                    |     |
|    | 31.1                   | Konsultan Keuangan/Perencanaan        | OB     | 2.500.000          |     |
|    | 31.2                   | Konsultan Hukum                       | OB     | 2.500.000          |     |
|    | 31.3                   | Tenaga GIS                            | OB     | 3.500.000          |     |
|    | 31.4                   | Instruktur/Pelatih/Penguji/Juri/Wasit | OK     | 1.500.000          |     |
|    | 31.5                   | Tenaga Ahli Hukum                     | OB     | 2.500.000          |     |
|    | 31.6                   | Tenaga Ahli Ekonomi                   | OB     | 2.500.000          |     |
|    | 31.7                   | Staf Ahli Fraksi                      | OB     | 1.300.000          |     |
|    | 31.8                   | Tenaga Ahli Psikologi                 | OB     | 2.000.000          |     |
|    | 31.9                   | Tenaga Ahli Konselor                  | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 31.10                  | Tenaga Ahli Cagar Budaya              | OK     | 1.000.000          |     |
|    | 31.11                  | Tenaga Ahli Perencanaan               | OB     | 2.500.000          |     |
|    | 31,12                  | Tenaga Pendamping                     | OB     | 1.000.000          |     |

Penjelasan :

Honorarium Konsultan adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli yang ditetapkan sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya. Tenaga GIS adalah orang yang menguasai sistem informasi geografis, yang digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Tenaga GIS Non PNS yang dikontrak dalam jangka waktu tertentu untuk membuat suatu data base (jalan lingkungan, drainase, kawasan permukiman dan sebagainya), diberikan honorarium per bulan. Instruktur/pelatih/Penguji/Juri/Wasit adalah orang yang digunakan jasanya dalam pelaksanaan kegiatan Perlombaan/Seleksi. Penguji Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat diberikan honorarium berdasarkan jumlah peserta.

Honorarium Tenaga Ahli Hukum dan Tenaga Ahli Ekonomi diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maros terutama fungsi legislasi dan Staf Ahli Fraksi diberikan untuk membantu tugas-tugas pada setiap fraksi DPRD Kabupaten Maros. Honorarium Tenaga Ahli Psikologi dan Konselor diberikan kepada orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan Bupati sebagai tenaga ahli profesional yang menyediakan layanan psikologi dan konseling. Honorarium diberikan kepada Tenaga Ahli Cagar Budaya yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya. Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan diberikan kepada tenaga ahli dibidang perencanaan pembangunan daerah dan Tenaga pendamping diberikan kepada orang yang ditunjuk sebagai tenaga pendamping untuk tenaga ahli.

### 32. HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA DAN ASISTEN

| NO | URAIAN  |  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   |  | 3      | 4                  | 5   |
| 32 | HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA DAN ASISTEN |  | OB     | 850.000            |     |

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, pengadministrasian dan pengaturan serta pelayanan tamu-tamu pimpinan.

**33. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN , UPAH ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN LINGKUP PEMKAB MAROS**

| NO        | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>33</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, UPAH ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN LINGKUP PEMKAB MAROS</b> |        |                    |     |
|           | 33.1 Tenaga Administrasi SETDA   |        |                    |     |
|           | a. Tenaga Administrasi   | OB     | 850.000            |     |
|           | b. Registrasi  | OB     | 650.000            |     |
|           | c. Pengarsipan   | OB     | 500.000            |     |
|           | 33.2 Tenaga Administrasi Perangkat Daerah selain SETDA   | OB     | 500.000            |     |
|           | 33.3 Tenaga Kebersihan SETDA   |        |                    |     |
|           | a. Supervisor Petugas Kebersihan   | OB     | 1.200.000          |     |
|           | b. Kebersihan Lingkungan Kantor Bupati   | OB     | 1.150.000          |     |
|           | c. Kebersihan Rumah Jabatan  | OB     | 1.000.000          |     |
|           | d. Kebersihan Mushallah  | OB     | 1.150.000          |     |
|           | 33.4 Honorarium Petugas Kebersihan Kantor  |        |                    |     |
|           | a. Petugas Kebersihan Kantor   | OB     | 650.000            |     |
|           | b. Petugas Pengawas Kebersihan RSUD  | OB     | 1.800.000          |     |
|           | c. Petugas Kebersihan Kantor (RSUD & Puskesmas)  | OB     | 1.500.000          |     |
|           | d. Petugas Laundry (RSUD)  | OB     | 1.500.000          |     |
|           | 33.5 Petugas Kebersihan Pasar  | OB     | 1.150.000          |     |
|           | 33.6 Petugas Kebersihan Lingkungan   |        |                    |     |
|           | a. Buruh Kebersihan Lingkungan   | OB     | 1.200.000          |     |
|           | b. Petugas Kebersihan Drainase   | OB     | 1.300.000          |     |
|           | c. Petugas TPA Perempuan   | OB     | 800.000            |     |
|           | d. Petugas TPA Laki-laki   | OB     | 1.100.000          |     |
|           | e. Tunjangan Hari Raya   | OK     | 500.000            |     |
|           | 33.7 Petugas Kebersihan Kawasan Wisata   | OB     | 750.000            |     |
|           | 33.8 Petugas Kebersihan Show Room  | OB     | 600.000            |     |
|           | 33.9 Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan (TMP)   | OB     | 650.000            |     |
|           | 33.10 Kebersihan Pusat Ole - Ole   | OB     | 1.500.000          |     |
|           | 33.11 Petugas Kebersihan Pengajian Rutin   | Orang  | 300.000            |     |

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengadministrasian dan terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan.

**34. HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR/PETUGAS STNK DAN SERVICE KENDARAAN DINAS/CARAKA/PENGANTAR IZIN.**

| NO         | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|------------|--|--------|--------------------|-----|
| 1          | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>34.</b> | <b>HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/OPERATOR KOMPUTER/ PETUGAS STNK DAN SERVICE KENDARAAN DINAS/CARAKA/PENGANTAR IZIN.</b> |        |                    |     |
|            | 34.1 Honorarium Staf Pengelola Keuangan/Operator Komputer  | OB     | 500.000            |     |
|            | 34.2 Honorarium Petugas STNK, Service Kendaraan Dinas  | OB     | 600.000            |     |
|            | 34.3 Honorarium Caraka   | OB     | 750.000            |     |
|            | 34.4 Honorarium Pengantar Izin   | OB     | 750.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan/operator komputer, pendamping BPK, petugas STNK, Service Kendaraan Dinas, Caraka (pengantar Surat) dan Pengantar Perizinan.

Catatan :

- a. untuk jumlah Staf Pengelola Keuangan dan Operator Komputer pada masing-masing Perangkat Daerah menyesuaikan dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah.
- b. untuk Caraka (Pengantar Surat) Sekretariat Daerah paling banyak 3 (tiga) orang dan Perangkat Daerah lainnya 1 (satu) Orang.

**35. HONORARIUM/JASA SATUAN PENGAMANAN/SECURITY, PETUGAS PENGENDALI PARKIR DAN PETUGAS PENGATUR LALU LINTAS.**

| NO | URAIAN  |                                | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------------------------------|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   |                                | 3      | 4                  | 5   |
| 35 | <b>HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN/SECURITY, PETUGAS PENGENDALI PARKIR DAN PETUGAS PENGATUR LALU LINTAS.</b> |                                |        |                    |     |
|    | 35.1  | Honorarium Pengamanan/Security | OB     | 2.000.000          |     |
|    | 35.2  | Honorarium Pengendali Parkir   | OB     | 250.000            |     |
|    | 35.3  | Petugas Pengatur Lalu Lintas   | OB     | 1.000.000          |     |

Penjelasan :

- a. Honorarium/jasa pengamanan/security yang diberikan kepada Pegawai/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan pada area tertentu secara berkelanjutan.
- b. Honorarium/jasa Pengendali Parkir yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas sebagai pengendali parkir dalam melaksanakan pengaturan kelancaran arus kendaraan, mengarahkan kendaraan ketempat parkir dan menjaga keamanan kendaraan yang parkir serta memungut retribusi parkir.
- c. Honorarium/Jasa Petugas Pengatur Lalu Lintas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang bertugas mengatur lalu lintas angkutan jalan mengingat tingginya resiko kecelakaan kerja sehingga perlu diberikan Jasa/Upah kerja bagi petugas lapangan pengawasan dan pengatur lalu lintas angkutan jalan.

**36. HONORARIUM/JASA PETUGAS PASAR**

| NO | URAIAN                                |  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---------------------------------------|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2                                     |  | 3      | 4                  | 5   |
| 36 | <b>HONORARIUM/JASA PETUGAS PASAR.</b> |  |        |                    |     |
|    | 36.1                                  | Kepala Pasar Kecamatan                       | OB     | 500.000            |     |
|    | 36.2                                  | Pengawas Pasar BSM                           | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 36.3                                  | Penagih Retribusi Pasar (Kolektor)           | OB     | 250.000            |     |
|    | 36.4                                  | Petugas Keamanan Pasar BSM                   | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 36.5                                  | Petugas Teknisi Perawatan                    | OK     | 500.000            |     |
|    | 36.6                                  | Operator Alat Kesehatan Ruangan dan Sanitasi | OK     | 500.000            |     |

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas kepala Pasar, Pengawas Pasar BSM, Penagih retribusi Pasar (kolektor), Petugas Keamanan Pasar BSM, Petugas Teknisi Perawatan dan Operator Alat Kesehatan Ruangan dan Sanitasi dalam wilayah Kabupaten Maros.

**37. HONORARIUM/JASA PETUGAS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DAN BALAI BENIH IKAN (BBI)**

| NO | URAIAN   |                             | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|-----------------------------|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  |                             | 3      | 4                  | 5   |
| 37 | <b>HONORARIUM/JASA PETUGAS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DAN BALAI BENIH IKAN (BBI)</b> |                             |        |                    |     |
|    | 37.1   | Honorarium/Jasa Petugas TPI | OB     | 2.000.000          |     |

|  |      |                             |    |         |  |
|--|------|-----------------------------|----|---------|--|
|  | 37.2 | Honorarium/Jasa Petugas BBI | OB | 500.000 |  |
|--|------|-----------------------------|----|---------|--|

Penjelasan :

- a. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas yang berada di Tempat Pelelangan Ikan
- b. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas yang berada di Balai Benih Ikan

**38. HONORARIUM OPERATOR IPAL, LIMBAH B3 DAN INSENERATOR/TEKNISI**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 38 | HONORARIUM OPERATOR IPAL, LIMBAH B3 DAN INSENERATOR/TEKNISI | OB     | 1.300.000          |     |

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas Operator IPAL, Limbah B3 dan Insenerator/Teknisi pada RSUD dr. La Palaloi.

**39. HONORARIUM PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD).**

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 39 | HONORARIUM PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD). | OB     | 850.000            |     |

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas pada Unit Transfusi Darah (UTD) pada RSUD dr. La Palaloi.

**40. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TENAGA PELAYANAN KESEHATAN RSUD dr. LA PALALOI/PUSKESMAS DINAS KESEHATAN.**

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 40 | HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TENAGA PELAYANAN KESEHATAN RSUD dr. LA PALALOI/PUSKESMAS DINAS KESEHATAN. |        |                    |     |
|    | 40.1 Kurir/penyimpan rekam medis   | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 40.2 Petugas Admisi/Pendaftaran Pasien   | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 40.3 Insentif kepala ruangan   | OB     | 750.000            |     |
|    | 40.4 IPCN  | OB     | 2.000.000          |     |
|    | 40.5 Satuan Pengawas Internal (SPI)  | OB     | 2.500.000          |     |
|    | 40.6 Petugas Jenazah   | OB     | 850.000            |     |
|    | 40.7 Pendorong Oksigen   | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 40.8 Petugas Air   | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 40.9 Evakuator Pasien  | OB     | 800.000            |     |
|    | 40.10 IPCO   | OB     | 2.000.000          |     |
|    | 40.11 MPP/Case Manager   | OB     | 2.000.000          |     |
|    | 40.12 Tenaga Perawat/Bidan   | OB     | 1.500.000          |     |
|    | 40.13 Pejabat Pengelola BLUD   | OB     | 3.500.000          |     |
|    | 40.14 Insentif PIC Data  | OB     | 250.000            |     |
|    | 40.15 Tenaga Farmasi   | OB     | 850.000            |     |
|    | 40.16 Tenaga Analist Laboratorium  | OB     | 850.000            |     |
|    | 40.17 Tenaga Radiologi   | OB     | 850.000            |     |
|    | 40.18 Tenaga Fisioterapi   | OB     | 850.000            |     |
|    | 40.19 Tenaga Rekam Medik   | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 40.20 Tenaga Administrasi Bidang Pelayanan Medik   | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 40.21 Tenaga Ahli Gizi/Teknikal Registered Dietisien   | OB     | 1.000.000          |     |

|       |  |                     |           |  |
|-------|--|---------------------|-----------|--|
| 40.22 | Tenaga Elektomedis   | OB                  | 1.700.000 |  |
| 40.23 | Tenaga Listrik dan Bangunan                                | OB                  | 1.800.000 |  |
| 40.24 | Tim Teknis   | OB                  | 500.000   |  |
| 40.25 | Analisa Program dan BLUD dr. La Palaloi                    | OB                  | 1.000.000 |  |
| 40.26 | Petugas kebersihan ruangan isolasi/ covid-19               | OB                  | 1.500.000 |  |
| 40.27 | Petugas pengelola Aspak                                    | OB                  | 2.000.000 |  |
| 40.28 | Petugas K3RS   | OB                  | 1.300.000 |  |
| 40.29 | Pengurus Komite Keperawatan/Medik/Tenaga Kesehatan Lainnya |                     |           |  |
|       | a. Ketua   | OB                  | 1.500.000 |  |
|       | b. Sekretaris  | OB                  | 1.200.000 |  |
|       | c. Ka. Sub Komite  | OB                  | 1.000.000 |  |
|       | d. Anggota   | OB                  | 750.000   |  |
| 40.30 | Pengendali Resistensi Anti Mikroba                         |                     |           |  |
|       | a. Ketua   | OB                  | 1.500.000 |  |
|       | b. Sekertaris  | OB                  | 1.200.000 |  |
|       | c. Anggota   | OB                  | 1.000.000 |  |
| 40.31 | Insentif Tim Assesor Keperawatan                           | Orang               | 50.000    |  |
| 40.32 | Insentif Petugas Limbah B3 Covid-19                        | OB                  | 1.000.000 |  |
| 40.33 | Insentif Petugas CSSD                                      | OB                  | 1.000.000 |  |
| 40.34 | Insentif Vaksinator ASN                                    | OB                  | 700.000   |  |
| 40.35 | Insentif Vaksinator Non ASN                                | OB                  | 550.000   |  |
| 40.36 | Honor Tracer   | OB                  | 325.000   |  |
| 40.37 | Insentif Tracer  | per org kontak erat | 15.000    |  |
| 40.38 | Honor Petugas Surveilans/pengelola data                    | OB                  | 1.000.000 |  |
| 40.39 | Jasa Petugas PSC   | OH                  | 100.000   |  |
| 40.40 | Rapid Test Anti Gent-Swab                                  | Org/Kali            | 200.000   |  |
| 40.41 | Tarif PCR  | Org/Kali            | 1.000.000 |  |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja Tenaga Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Non PNS berdasarkan Surat Tugas atau Surat Keputusan Direktur RSUD dr. La Palaloi dan Surat Tugas atau Surat Keputusan Dinas Kesehatan . Jasa upah Pengurus Komite Keperawatan di bayarkan apabila bekerja purnawaktu. Dan Tarif Rapid Tes Anti Gent-Swab, Tarif PCR adalah batas tertinggi dan menyesuaikan tarif terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

**41. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)**

| NO | URAIAN   | SATUAN         | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|----------------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3              | 4                  | 5   |
| 41 | <b>SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)</b> | Orang/<br>Kali | 50.000             |     |

**Penjelasan :**

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di dalam kantor. Uang saku rapat di dalam kantor dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan peserta rapat non Pegawai Negeri Sipil

**Catatan :**

Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

**42. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 42 | <b>SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</b> |        |                    |     |

|  |   |    |           |  |
|--|---|----|-----------|--|
|  | <b>42.1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II</b> |    |           |  |
|  | a. Halfday  | OP | 206.000   |  |
|  | b. Fullday  | OP | 320.000   |  |
|  | c. Fullboard  | OP | 1.127.000 |  |
|  | <b>42.2. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah</b>  |    |           |  |
|  | a. Halfday  | OP | 180.000   |  |
|  | b. Fullday  | OP | 300.000   |  |
|  | c. Fullboard  | OP | 720.000   |  |
|  | <b>42.3. Uang Harian Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor</b>  |    |           |  |
|  | a. Fullboard di Luar Kota   | OH | 150.000   |  |
|  | b. Fullboard di Dalam kota  | OH | 120.000   |  |
|  | c. Fullday/Halfday di dalam kota  | OH | 100.000   |  |
|  | <b>42.4. Paket Kegiatan Workshop/Bimbingan Teknis/Pelatihan Teknis</b>  |    |           |  |
|  | a. Halfday  | OP | 180.000   |  |
|  | b. Fullday  | OP | 300.000   |  |
|  | c. Fullboard  | OP | 720.000   |  |

**Penjelasan :**

42.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan Biaya Paket kegiatan rapat/Pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/Instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari Eselon II lainnya/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan dan atau sejenisnya di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan dan atau sejenisnya di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

- a. Paket Halfday  
Satuan biaya paket Halfday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan dan atau sejenisnya yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen);
- b. Paket Fullday  
Satuan biaya paket Fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan dan atau sejenisnya yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen);
- c. Paket Fullboard  
Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan dan atau sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen).

Akomodasi paket Fullboard diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
- b. Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Negara/Daerah.

42.2 Uang harian kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor merupakan satuan biaya digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan Fullboard diluar kota, kegiatan Fullboard dan kegiatan Fullday/Halfday didalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor

Catatan :

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

**43. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, PAKAIAN KERJA, DAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU.**

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 43 | <b>SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, PAKAIAN KERJA, DAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU.</b> |        |                    |     |
|    | <b>43.1 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>   |        |                    |     |
|    | <b>a. Pejabat Negara</b>   |        |                    |     |
|    | - PDU dan PSL  | Ops    | 7.500.000          |     |
|    | - PSR  | Ops    | 5.000.000          |     |
|    | - PSH  | Ops    | 5.000.000          |     |
|    | - PDH  | Ops    | 5.000.000          |     |
|    | - Batik  | Ops    | 5.000.000          |     |
|    | <b>b. Sekda, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD</b>  |        |                    |     |
|    | - PSL  | Ops    | 2.000.000          |     |
|    | - PSR  | Ops    | 1.850.000          |     |
|    | - PSH  | Ops    | 1.850.000          |     |
|    | - PDH  | Ops    | 1.500.000          |     |
|    | <b>c. Pegawai Negeri Sipil</b>   |        |                    |     |
|    | Eselon II.b  |        |                    |     |
|    | - PSL  | Ops    | 1.250.000          |     |
|    | - PSR  | Ops    | 1.000.000          |     |
|    | - PSH  | Ops    | 1.000.000          |     |
|    | - PDL  | Ops    | 850.000            |     |
|    | - PDH  | Ops    | 450.000            |     |
|    | Eselon III   |        |                    |     |
|    | - PDU dan PSL  | Ops    | 1.000.000          |     |
|    | - PSR  | Ops    | 800.000            |     |
|    | - PSH  | Ops    | 800.000            |     |
|    | - PDL  | Ops    | 750.000            |     |
|    | - PDH  | Ops    | 450.000            |     |
|    | Eselon IV  |        |                    |     |
|    | - PDL  | Ops    | 750.000            |     |
|    | - PSH  | Ops    | 500.000            |     |
|    | - PDH  | Ops    | 450.000            |     |
|    | Staf   |        |                    |     |
|    | - PDL  | Ops    | 750.000            |     |
|    | - PDH  | Ops    | 450.000            |     |
|    | Baret/Embleem/Kopel (PDL)  | Set    | 200.000            |     |
|    | Atribut PDU (Bupati/Wakil Bupati)  | Set    | 5.000.000          |     |
|    | Atribut Kelengkapan Pakaian Paskibraka   | Set    | 650.000            |     |
|    | Atribut Kelengkapan Pakaian Pasukan Pengapit, Komandan Pasukan dan Komandan Upacara                            | Set    | 800.000            |     |

|  |             |  |                          |           |  |
|--|-------------|--|--------------------------|-----------|--|
|  |             | Make Up  | Org/Kali                 | 75.000    |  |
|  |             | Cukur Rambut   | OK                       | 20.000    |  |
|  | <b>43.2</b> | <b>Belanja Pakaian Kerja</b>                                   |                          |           |  |
|  |             | - Pakaian Kerja Dokter   | Orang / Stell            | 600.000   |  |
|  |             | - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat                                | Orang / Stell            | 450.000   |  |
|  |             | - Pakaian Seragam Kegiatan                                     | Orang / Stell            | 500.000   |  |
|  |             | - Pakaian Seragam Muspida                                      | Orang / Stell            | 1.000.000 |  |
|  |             | - Pakaian Kerja Satpam   | Orang / Stell            | 900.000   |  |
|  |             | - Pakaian/baju Kerja Lapangan                                  | Org/Pcs                  | 350.000   |  |
|  |             | - Topi Kerja Lapangan  | Buah                     | 65.000    |  |
|  |             | - Mantel Hujan   | Setel                    | 400.000   |  |
|  |             | - Sewa Baju Adat   | Pasang                   | 2.500.000 |  |
|  | <b>43.3</b> | <b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu</b>           |                          |           |  |
|  |             | Pakaian KORPRI/Batik   | Orang/Stell              | 550.000   |  |
|  |             | Pakaian Batik Hari-hari tertentu                               | Orang/Stell              | 1.000.000 |  |
|  |             | Pakaian Jas Khalifah   | Orang/Stell              | 900.000   |  |
|  |             | Pakaian Olah Raga  | Orang/Stell<br>1/Pcs/lbr | 500.000   |  |
|  |             | Sepatu   |                          |           |  |
|  |             | a. Sepatu Kerja  | Ops                      | 250.000   |  |
|  |             | b. Sepatu Olah Raga  | Ops                      | 150.000   |  |
|  |             | c. Sepatu PDL/Laras  | Ops                      | 500.000   |  |
|  |             | Pakaian Paskibraka   | Orang/Stell              | 750.000   |  |
|  |             | Belanja Pakaian Batik Forkopimda                               | Orang/Stell              | 1.800.000 |  |
|  |             | Pakaian Khusus (Toga)  | Pasang                   | 1.000.000 |  |
|  |             | Pakaian Jas/Safari   | Stell/Pcs                | 1.000.000 |  |
|  |             | Rompi  | Pasang                   | 250.000   |  |
|  |             | Pakaian Adat Daerah  | Pasang                   | 5.000.000 |  |
|  |             | PDU (Pengapit, Komandan Pasukan, Komandan Upacara dan Panitia) | Stell/Pcs                | 1.000.000 |  |
|  |             | Pakaian Siaga Pramuka  | Pasang                   | 450.000   |  |

Penjelasan :

- Satuan biaya Pakaian Dinas dan Atribut Pejabat negara, Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil yaitu satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil.
- Satuan biaya Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Kerja Laboratorium, dan Pakaian Kerja Bengkel yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- Satuan biaya Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu ; Pakaian KORPRI, Pakaian Adat Daerah, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga, Pakaian Paskibraka dan Pakaian Jas/Safari.

**44. HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/TV MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>44</b> | <b>HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/ TV MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAROS</b> |        |                    |     |
|           | 44.1 Badan Pengawas   | OB     | 750.000            |     |
|           | 44.2 Direktur   | OB     | 1.500.000          |     |
|           | 44.3 Koordinator Bidang   | OB     | 550.000            |     |
|           | 44.4 Penyiar  | OB     | 500.000            |     |

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas pada LPP Radio dan/TV Milik Pemkab Maros.



**45. HONORARIUM PENGAWAS/PELAKSANA PEMELIHARAAN MESIN DAN PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR LAINNYA**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 45 | <b>HONORARIUM PENGAWAS/ PELAKSANA PEMELIHARAAN MESIN DAN PERLENGKAPAN/ PERALATAN KANTOR LAINNYA</b> |        |                    |     |
|    | 45.1 Pengawas   | OB     | 1.200.000          |     |
|    | 45.2 Pelaksana  | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 45.3 Operator Genset  | OB     | 800.000            |     |
|    | 45.4 Petugas Sound System   | OB     | 800.000            |     |

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pemeliharaan Mesin dan Perlengkapan/Peralatan kantor lainnya.

**46. HONORARIUM/JASA PETUGAS LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM, PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU), KOORDINATOR LAPANGAN, PEMADAM KEBAKARAN/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA, DAN TUNJANGAN LAINNYA.**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 46 | <b>HONORARIUM/JASA LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM, PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU), KOORDINATOR LAPANGAN, PEMADAM KEBAKARAN/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA, DAN TUNJANGAN LAINNYA.</b> |        |                    |     |
|    | 46.1 Petugas Lampu Median Jalan   |        |                    |     |
|    | a. Pengawas   | OB     | 750.000            |     |
|    | b. Teknisi Lampu  | OB     | 1.500.000          |     |
|    | c. Helper   | OB     | 500.000            |     |
|    | 46.2 Petugas Pengelola Laboratorium   |        |                    |     |
|    | a. Pengarah/Penanggung Jawab  | OB     | 700.000            |     |
|    | b. Ketua  | OB     | 600.000            |     |
|    | c. Analis   | OB     | 500.000            |     |
|    | d. Pengambil Sampel   | OB     | 500.000            |     |
|    | 46.3 Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU)  |        |                    |     |
|    | a. Sopir/Kernek Ambulance   | OB     | 500.000            |     |
|    | b. Petugas TPU  | OB     | 500.000            |     |
|    | 46.4 Koordinator Lapangan   | OB     | 750.000            |     |
|    | 46.5 Pemadam Kebakaran  | OB     | 750.000            |     |
|    | 46.6 Satuan Tugas Penanggulangan Bencana  | OB     | 700.000            |     |
|    | 46.7 TAGANA (Taruna Siaga Bencana)  | OB     | 250.000            |     |
|    | 46.8 Jasa Pengamanan (Provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran  | OB     | 350.000            |     |
|    | 46.9 Belanja Premi Asuransi (BPJS) Satpol PP dan DAMKAR   | OB     | 15.000             |     |
|    | 46.10 Jasa Upah Petugas Pemeliharaan Lapangan, Alat dan Taman Olahraga.   | OB     | 300.000            |     |

Penjelasan :

46.1 Honorarium Petugas Lampu Median Jalan.

Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Personil/Petugas Lampu Median Jalan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Lampu Median Jalan.

46.2 Honorarium Petugas Pengelola Laboratorium.

Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Personil/Petugas Pengelola Laboratorium yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.

- 46.3 Honorarium/Jasa Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU)  
Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Personil/Petugas Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
- 46.4 Honorarium Koordinator Lapangan.  
Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Koordinator Lapangan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemantauan secara berkala atas kegiatan kebersihan lingkungan, Pengelolaan Lampu Median Jalan, Pengelolaan Laboratorium, Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Pemadam Kebakaran.
- 46.5 Honorarium/Jasa Petugas Pemadam Kebakaran  
Honorarium/Jasa Petugas Pemadam Kebakaran yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas pemadam kebakaran.
- 46.6 Honorarium/jasa Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas penanggulangan bencana.
- 46.7 TAGANA (Taruna Siaga Bencana) merupakan tenaga profesional yang berperan pada penanggulangan bencana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas penanggulangan bencana.
- 46.8 Honorarium/jasa Pengamanan (Provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas Pengamanan (Provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- 46.9 Premi Asuransi diberikan kepada tenaga teknis SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran.
- 46.10 Jasa Upah Petugas Pemeliharaan Lapangan, Alat dan Taman Olahraga diberikan kepada Petugas Pemeliharaan Taman Bugar, Taman Alun-alun dan Lapangan Merdeka Kassi Kebo.

**47. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>47</b> | <b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b> |        |                    |     |
|           | 47.1 Pengarah   | OK     | 1.700.000          |     |
|           | 47.2 Penanggung Jawab                                       | OK     | 1.500.000          |     |
|           | 47.3 Ketua  | OK     | 1.000.000          |     |
|           | 47.4 Sekretaris   | OK     | 900.000            |     |
|           | 47.5 Anggota  | OK     | 750.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium yang diberikan kepada Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Susunan Keanggotaan Tim terdiri dari : Pengarah adalah Bupati, Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah, Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Penyusunan Ranperda, Sekretaris adalah Kepala Bagian Hukum dan Anggota adalah Pegawai Negeri Sipil dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Bidang yang membidangi pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah terkait (jumlah maksimal anggota 7 orang).

**48. HONORAIUM JASA PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN.**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>48</b> | <b>HONORAIUM JASA PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN</b>  |        |                    |     |
|           | <b>48.1 Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan</b> |        |                    |     |
|           | a. Pembantu Peneliti/Perekayasa                           | OJ     | 25.000             |     |
|           | b. Koordinator Peneliti/ Perekayasa                       | OB     | 420.000            |     |
|           | c. Sekretariat Peneliti/Perekayasa                        | OB     | 300.000            |     |
|           | d. Pengolah Data  | OK     | 1.540.000          |     |
|           | e. Petugas Survey   | OR     | 10.000             |     |
|           | f. Pembantu Lapangan                                      | OH     | 80.000             |     |
|           | <b>48.2 Honorarium Kelebihan Jam Peneliti/Perekayasa</b>  |        |                    |     |
|           | a. Peneliti/Perekayasa Utama                              | OJ     | 60.000             |     |

|  |                                |    |        |  |
|--|--------------------------------|----|--------|--|
|  | b. Peneliti/Perekayasa Madya   | OJ | 50.000 |  |
|  | c. Peneliti/Perekayasa Muda    | OJ | 40.000 |  |
|  | d. Peneliti/Perekayasa Pertama | OJ | 35.000 |  |

**Penjelasan :**

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa sebagai pembantu peneliti/ perekayasa, koordinator peneliti/ perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Dalam hal pembantu peneliti/ perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/ perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

**Catatan :**

Dalam hal penelitian/ perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/ perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/ perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

**49. JASA PENUNJANG KEGIATAN/TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA RT/RW/KEPALA LINGKUNGAN/DUSUN**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 49 | <b>JASA PENUNJANG KEGIATAN/ TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA RT/RW/ KEPALA LINGKUNGAN /DUSUN</b> |        |                    |     |
|    | <b>49.1 Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/RW/ Kepala Lingkungan/ Dusun</b>                   |        |                    |     |
|    | a. Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RW/Kepala Lingkungan                                       | OB     | 1.000.000          |     |
|    | b. Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/Kepala Dusun  | OB     | 500.000            |     |

**Penjelasan :**

Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/RW/Kepala Lingkungan/Dusun diberikan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga dan menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

**50. HONORARIUM/JASA PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI.**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 50 | <b>HONORARIUM/JASA PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI</b> |        |                    |     |
|    | Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji                                      | OJH    | 100.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Penunjang Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah Jasa yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan setiap Jemaah Haji yang meliputi pengelolaan Aplikasi Siskohatkes, Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi calon Jemaah Haji untuk menghindari kemungkinan calon Jemaah Haji terserang penyakit menular.

**51. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 51 | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)</b> |        |                    |     |
|    | 51.1 Jasa Guru Utama   | OB     | 1.000.000          |     |

|  |      |  |    |         |  |
|--|------|--|----|---------|--|
|  | 51.2 | Jasa Pengelola Pengasuh TPA Pemerintah Daerah          | OB | 600.000 |  |
|  | 51.3 | Jasa Pengelola Kelompok Bermain                        | OB | 500.000 |  |
|  | 51.4 | Jasa Guru/Pendidik Kelompok Bermain PAUD (TK, KB, TPA) | OB | 500.000 |  |
|  | 51.5 | Jasa Penjaga Sekolah PAUD                              | OB | 600.000 |  |
|  | 51.6 | Jasa Kerja Kader PAUD HI                               | OB | 400.000 |  |
|  | 51.7 | Jasa Kerja Guru Bantu                                  | OB | 700.000 |  |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional Pendidikan Anak Usia Dini adalah Jasa yang kepada Guru/Guru Bantu, Pengelola Pengasuh TPA Pemerintah Daerah, Pengelola Kelompok Bermain, Guru/Pendidik Kelompok Bermain/PAUD/TK dan Penjaga Sekolah PAUD dan Kader PAUD dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

**52. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL TIM KESENIAN DAERAH.**

| NO        | URAIAN   | SATUAN              | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET       |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-----------|
| 1         | 2  | 3                   | 4                  | 5         |
| <b>52</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL TIM KESENIAN DAERAH.</b> |                     |                    |           |
|           | 52.1   | Tim Kesenian Daerah | Kegiatan           | 2.000.000 |
|           | 52.2   | Penari              | OK                 | 200.000   |
|           | 52.3   | Paduan Suara        | OK                 | 200.000   |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional Tim Kesenian Daerah, Penari dan Paduan Suara adalah Honorarium/Jasa yang diberikan Tim Kesenian Daerah, Penari dan Paduan Suara dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Maros.

**53. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PETUGAS KAWASAN WISATA.**

| NO        | URAIAN   | SATUAN   | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET       |
|-----------|--|--|--------------------|-----------|
| 1         | 2  | 3  | 4                  | 5         |
| <b>53</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PETUGAS KAWASAN WISATA</b> |  |                    |           |
|           | 53.1   | Pengarah Pengawas PAD  | OB                 | 1.500.000 |
|           | 53.2   | Pengawas PAD   | OB                 | 1.000.000 |
|           | 53.3   | Petugas Hotel Bantimurung                                      | OB                 | 1.000.000 |
|           | 53.4   | Petugas Museum   | OK                 | 600.000   |
|           | 53.5   | Kurator Museum   | OK                 | 1.000.000 |
|           | 53.6   | Satuan Pengamanan I  | OB                 | 2.000.000 |
|           | 53.7   | Satuan Pengamanan II   | OB                 | 1.500.000 |
|           | 53.8   | Satuan Pengamanan III  | OB                 | 700.000   |
|           | 53.9   | Petugas Waterpark  | OB                 | 1.000.000 |
|           | 53.10  | Operator Publikasi Pariwisata                                  | OB                 | 500.000   |
|           | 53.11  | Petugas Hotel PTB  | OB                 | 1.500.000 |
|           | 53.12  | Petugas Keamanan Museum  | OB                 | 600.000   |
|           | 53.13  | Petugas Balla Mabbalanca                                       |                    |           |
|           |  | a. Kasir   | OB                 | 1.500.000 |
|           |  | b. Supervisor  | OB                 | 1.500.000 |
|           |  | c. Petugas Kebersihan  | OB                 | 1.500.000 |
|           |  | d. Petugas Keamanan  | OB                 | 1.500.000 |
|           | 53.14  | Pengelola Kawasan Kuliner                                      | OB                 | 1.000.000 |
|           | 53.15  | Petugas Kesehatan  | OB                 | 750.000   |
|           | 53.16  | Petugas Pol. PP  | OB                 | 800.000   |
|           | 53.17  | Petugas Dishub/Pol. PP/Basarnas/Taman Nasional/Staf Pariwisata | OK                 | 250.000   |
|           | 53.18  | Sopir Shuttle Bus  | OB                 | 500.000   |
|           | 53.19  | Tenaga Operasional Retribusi/Petugas Kebersihan Leang-leang    | OB                 | 750.000   |

|  |       |                        |    |           |  |
|--|-------|------------------------|----|-----------|--|
|  | 53.20 | Tenaga Pendamping      | OB | 1.500.000 |  |
|  | 53.21 | Koordinator Pendamping | OB | 2.000.000 |  |
|  | 53.22 | Awak Perahu            | OB | 500.000   |  |
|  | 53.23 | Awak Mesin Perahu      | OB | 500.000   |  |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional Petugas Kawasan Wisata adalah Honorarium/ Jasa Tenaga Operasional yang diberikan kepada Petugas Kawasan Wisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**54. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN KEAGAMAAN**

| NO        | URAIAN   |   | SATUAN     | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|---|------------|--------------------|-----|
| 1         | 2  |   | 3          | 4                  | 5   |
| <b>54</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN KEAGAMAAN</b> |   |            |                    |     |
|           | 54.1   | Jasa Upah Penunjang/Keamanan/Pembantu Umum Kegiatan Keagamaan Tk. Kabupaten | Org/Kali   | 500.000            |     |
|           | 54.2   | Jasa Penceramah Kegiatan Keagamaan  | OK         | 1.500.000          |     |
|           | 54.3   | Jasa Khatib Sholat Idul Fitri dan Idul Adha                                 | OK         | 3.500.000          |     |
|           | 54.4   | Jasa Khatib Shalat Jumat Mushallah Kantor Bupati                            | OK         | 500.000            |     |
|           | 54.5   | Honorarium Muadzim Rumah Jabatan.   | OB         | 1.000.000          |     |
|           | 54.6   | Jasa Imam Sholat Idul Fitri dan Idul Adha                                   | OK         | 2.000.000          |     |
|           | 54.7   | Jasa Imam Rumah Jabatan.  | OB         | 1.000.000          |     |
|           | 54.8   | Imam Mesjid/Guru Mengaji  | OB         | 250.000            |     |
|           | 54.9   | Imam Lingkungan/Dusun   | OB         | 400.000            |     |
|           | 54.10  | Imam Kelurahan/Desa/Pastor/Pendeta  | OB         | 500.000            |     |
|           | 54.11  | Jasa Penceramah safari Ramadhan   | Kecamatan  | 1.000.000          |     |
|           | 54.12  | Jasa Upah Petugas Kurban  | Ekor       | 150.000            |     |
|           | 54.13  | Pembawa Acara Pengajian Rutin   | OK         | 250.000            |     |
|           | 54.14  | Biaya Petugas Pencatat KUA  | Orang      | 300.000            |     |
|           | 54.15  | Biaya Petugas Pencatat DUKCAPIL   | OK         | 300.000            |     |
|           | 54.16  | Biaya Sidang Isbat Nikah  | OK         | 200.000            |     |
|           | 54.17  | Tim Koordinasi Isbat Nikah Kabupaten  | OK         | 350.000            |     |
|           | 54.18  | Petugas Pencatat Isbat Nikah  | OK         | 300.000            |     |
|           | 54.19  | Pembacaan Ayat Suci Alquran Kegiatan Keagamaan Tk. Kabupaten                | Orang      | 750.000            |     |
|           | 54.20  | Dewan Hakim STQ/MTQ Tingkat Kab. Maros                                      | OK         | 3.000.000          |     |
|           | 54.21  | Seksi Lomba Kegiatan Keagamaan  | OK         | 1.000.000          |     |
|           | 54.22  | Tim/Penilai Juri Kendaraan Hias & Takbir Keliling                           | Orang/Kali | 1.200.000          |     |
|           | 54.23  | Pembawa Acara Lomba Kendaraan Hias & Takbir Keliling                        | Orang/Kali | 500.000            |     |
|           | 54.24  | Jasa Pelatih TC Kabupaten Kegiatan Keagamaan Tk. Kabupaten                  | OK         | 2.000.000          |     |
|           | 54.25  | Uang Saku Peserta Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi                           | OK         | 1.500.000          |     |
|           | 54.26  | Jasa Pelatih TC Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi                             | Orang      | 2.500.000          |     |
|           | 54.27  | Uang Saku Peserta Qori /Qoriah Kegiatan STQ Tk. Nasional                    | Orang      | 3.500.000          |     |
|           | 54.28  | Uang Saku pendamping peserta Qori/Qoriah Kegiatan STQ Tk. Nasional          | Orang      | 5.000.000          |     |
|           | 54.29  | Jasa petugas tim jemaah haji  | Orang      | 1.000.000          |     |
|           | 54.30  | Jasa Tim penguji pelayanan TPHPD Jemaah Haji                                | Orang      | 1.000.000          |     |
|           | 54.31  | Jasa upah pengangkutan koper jemaah haji                                    | Orang      | 500.000            |     |

|  |       |   |            |            |  |
|--|-------|---|------------|------------|--|
|  | 54.32 | Hadiah Juara yang masuk 10 besar Tadarrus tk. Kabupaten                 | Orang      | 500.000    |  |
|  | 54.33 | - Bonus Lomba STQ Tk. Propinsi (Juara Harapan III)                      | OK         | 1.500.000  |  |
|  |       | - Bonus Lomba STQ Tk. Propinsi (Juara III)                              | OK         | 2.500.000  |  |
|  |       | - Bonus Lomba STQ Tk. Propinsi (Juara II)                               | OK         | 3.500.000  |  |
|  |       | - Bonus Lomba STQ Tk. Propinsi (Juara I)                                | OK         | 5.000.000  |  |
|  | 54.34 | - Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara Favorit)                           | Kendaraan  | 7.000.000  |  |
|  |       | - Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara III)                               | Kendaraan  | 8.000.000  |  |
|  |       | - Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara II)                                | Kendaraan  | 9.000.000  |  |
|  |       | - Hadiah Lomba Kendaraan Hias (Juara I)                                 | Kendaraan  | 10.000.000 |  |
|  | 54.35 | - Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara Harapan III) | Orang      | 500.000    |  |
|  |       | - Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara Harapan II)  | Orang      | 750.000    |  |
|  |       | - Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara Harapan I)   | Orang      | 1.000.000  |  |
|  |       | - Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara III)         | Orang      | 1.500.000  |  |
|  |       | - Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara II)          | Orang      | 2.000.000  |  |
|  |       | - Hadiah Lomba Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten (Juara I)           | Orang      | 2.500.000  |  |
|  | 54.36 | Tim Penguji BTQ dan Alkitab   | OK         | 500.000    |  |
|  | 54.37 | Pembacaan Doa Kegiatan Keagamaan Tk. Kabupaten                          | Orang/Kali | 700.000    |  |
|  | 54.38 | Jasa Pelatih/Official Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi                   | Orang      | 2.000.000  |  |
|  | 54.39 | Jasa Pendamping Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi                         | Orang      | 1.500.000  |  |
|  | 54.40 | Belanja akomodasi Kegiatan Keagamaan Tk. Propinsi                       | Hari       | 400.000    |  |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keagamaan.

**55. HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN KEPASKIBRAKAAN DAN OLAH RAGA**

| NO        | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>55</b> | <b>HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN KEPASKIBRAKAAN/ UANG PENGHARGAAN DAN OLAH RAGA</b> |        |                    |     |
| 55.1      | Narasumber/Pembahas  | OK     | 1.000.000          |     |
| 55.2      | Pendamping Pelatih, Spiritual dan Medis  | OK     | 1.500.000          |     |
| 55.3      | Pendamping Paskibraka Tingkat Provinsi   | OK     | 1.000.000          |     |
| 55.4      | Tim seleksi Tingkat Kabupaten Maros  | OK     | 600.000            |     |
| 55.5      | Pendamping asrama  | OK     | 400.000            |     |
| 55.6      | Instruktur Senam   | OB     | 1.500.000          |     |
| 55.7      | Petugas Lapangan dan pengamanan gerak jalan  | OK     | 300.000            |     |
| 55.8      | Petugas pengamanan penyelenggaraan senam kesegaran jasmani dan rohani di area car free day                   | OB     | 500.000            |     |
| 55.9      | Pengamanan Kegiatan Bupati Cup   | OH     | 75.000             |     |
| 55.10     | Pengawasan senjata pengapit, tali sandang dan sangkur pengapit   | OK     | 250.000            |     |
| 55.11     | Jasa pemasangan scotlite   | OK     | 250.000            |     |

|  |       |  |    |           |  |
|--|-------|--|----|-----------|--|
|  | 55.12 | Jasa Upah Dan Up dan Perwira Upacara                                     | OK | 1.000.000 |  |
|  | 55.13 | Paskibraka Kabupaten   | OK | 2.000.000 |  |
|  | 55.14 | Paskibraka Provinsi (Utusan Kabupaten)/Cadangan Paskibraka Kabupaten     | OK | 1.500.000 |  |
|  | 55.16 | Pembantu umum  | OK | 300.000   |  |
|  | 55.17 | Pelatih, Komandan Pasukan dan Pengapit                                   | OK | 3.000.000 |  |
|  | 55.18 | Atlet Cabor Binaan Dispora (Pencak Silat, Tinju, Bola Volly dan Panahan) | OB | 500.000   |  |
|  | 55.19 | Tim Pengamanan   | OK | 1.000.000 |  |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Honorarium Narasumber/Pembahas berasal dari TNI , Polri dan Purna Paskibraka Indonesia. Dan honorarium instruktur dan pengamanan diberikan pada kegiatan olah raga serta Honorarium diberikan kepada Non PNS yang di beri tugas Musik Pengiring dalam Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional, dalam setiap Upacara lain di Kab.Maros dan Tugas lain yang diperintahkan atasan.

**56. JASA TENAGA OPERASIONAL PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)**

| NO        | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>56</b> | <b>JASA TENAGA OPERASIONAL PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)</b> |        |                    |     |
|           | Tenaga Pendamping Lokal Desa (PDL)                         | OB     | 500.000            |     |

**Penjelasan :**

Jasa Tenaga Pendamping Lokal Desa (PDL) adalah jasa yang diberikan kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) yang selama ini memberikan bantuan pendampingan secara purna waktu bagi desa-desa di Kabupaten Maros.

**57. UPACARA PERSEMAYAMAN/PELEPASAN JENAZAH BAGI ANGGOTA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA.**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>57</b> | <b>UPACARA PERSEMAYAMAN/PELEPASAN JENAZAH BAGI ANGGOTA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA.</b> |        |                    |     |
|           | 57.1 Petugas Upacara  |        |                    |     |
|           | a. Protokol   | OK     | 100.000            |     |
|           | b. Pembaca DRH  | OK     | 100.000            |     |
|           | c. Pembina Upacara  | OK     | 150.000            |     |
|           | d. Pembaca Do'a   | OK     | 150.000            |     |
|           | e. Komandan dan Anggota (Satpol PP)   | OK     | 100.000            |     |
|           | 57.2 Sewa Peralatan dan Perlengkapan.   |        |                    |     |
|           | a. Sewa Tenda   | Hari   | 300.000            |     |
|           | b. Sewa Kursi   | Unit   | 10.000             |     |
|           | c. Sewa Mobil Jenazah   | Hari   | 150.000            |     |
|           | 57.3 Kelengkapan Jenazah  | OK     | 1.000.000          |     |
|           | 57.4 Karangan Bunga   | OK     | 500.000            |     |
|           | 57.5 Biaya lainnya  |        |                    |     |
|           | a. Biaya Bahan Bakar (BBM) Dalam Daerah   | Kali   | 100.000            |     |
|           | b. Biaya Bahan Bakar (BBM) Luar Daerah  | Kali   | 200.000            |     |
|           | c. Sopir kegiatan Dalam Daerah  | Kali   | 100.000            |     |
|           | d. Sopir kegiatan Luar Daerah   | Kali   | 200.000            |     |
|           | e. Biaya Taksyah (Penceramah)   | Kali   | 250.000            |     |
|           | f. Biaya Taksyah (Snack)  | Dos    | 10.000             |     |

**Penjelasan :**

Biaya Upacara Persemayaman/Pelepasan Jenazah bagi Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil adalah Standar Biaya yang diberikan/dikeluarkan sebagai bantuan Sosial kepada Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil yang meninggal/wafat sejak upacara persemayaman/pelepasan sampai dengan acara taksiyah.

**58. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN UJIAN SEKOLAH.**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>58</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN UJIAN SEKOLAH.</b> |        |                    |     |
| 58.1      | Jasa Upah Penyusunan Kisi-Kisi dan Penulisan Soal Ujian                           | OH     | 150.000            |     |
| 58.2      | Jasa Upah Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah   | OH     | 150.000            |     |
| 58.3      | Jasa Upah Narasumber Sosialisasi Ujian Akhir SD                                   | OK     | 450.000            |     |
| 58.4      | Jasa Petugas Scanner  | OK     | 3.000.000          |     |
| 58.5      | Jasa Upah Pendataan Peserta Ujian Akhir SD  | OK     | 1.500.000          |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja yang diberikan dalam rangka penyusunan Kisi-Kisi Ujian Akhir Sekolah Dasar, Pendataan Peserta, Sosialisasi, Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah. Waktu penyusunan kisi-kisi dan penulisan Soal Ujian dan Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah maksimal 10 (sepuluh) Hari.

**59. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

| NO        | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>59</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.</b> |        |                    |     |
| 59.1      | Koordinator  | OB     | 300.000            |     |
| 59.2      | Bhabinkamtibmas/Babinsa  | OB     | 200.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka membantu camat merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat dan memfasilitasi hubungan kerja dengan Pemerintah Kecamatan.

**60. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KORPS MUSIK**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>60</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KORPS MUSIK</b> |        |                    |     |
| 60.1      | Penanggung Jawab  | OB     | 500.000            |     |
| 60.2      | Anggota Tim Korps Musik   | OB     | 500.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja diberikan kepada Petugas Korps Musik dalam pelaksanaan tugas sebagai musik pengiring dalam upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya.

**61. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PETUGAS SHOW ROOM INDUSTRI KECIL MENENGAH.**

| NO        | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>61</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PETUGAS SHOW ROOM INDUSTRI KECIL MENENGAH.</b> |        |                    |     |
|           | Petugas Show Room  | OB     | 600.000            |     |



**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja diberikan kepada Petugas Show Room Industri Kecil Menengah yang mempunyai tugas memberikan Penjelasan, menata Produk Industri Kecil Menengah yang dipajang di Showroom dan membuat laporan perkembangan Produk Industri Kecil Menengah.

**62. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PELAKSANAAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

| NO        | URAIAN   | SATUAN   | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET       |
|-----------|--|--|--------------------|-----------|
| 1         | 2  | 3  | 4                  | 5         |
| <b>62</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PELAKSANAAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL.</b> |  |                    |           |
|           | 62.1   | Jasa Tutor Kesetaraan                                | OB                 | 300.000   |
|           | 62.2   | Jasa Penyelenggaraan                                 | OB                 | 250.000   |
|           | 62.3   | Jasa Penyelenggaraan                                 | OJ                 | 50.000    |
|           | 62.4   | Jasa Tutor Keaksaraan                                | OK                 | 1.800.000 |
|           | 62.5   | Jasa Tutor Keaksaraan                                | OJ                 | 20.000    |
|           | 62.6   | Jasa Penyelenggara                                   | OK                 | 900.000   |
|           | 62.7   | Jasa Penyusunan Soal Penuntasan Buta Aksara          | OK                 | 200.000   |
|           | 62.8   | Jasa Petugas Identifikasi data                       | OK                 | 450.000   |
|           | 62.9   | Jasa Penulisan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) | Orang              | 7.000     |
|           | 62.10  | Jasa Pengolahan Hasil Ujian Keaksaraan               | Orang              | 100.000   |
|           | 62.11  | Jasa Penyusunan Bahan Ajar Penuntasan Buta Aksara    | OK                 | 200.000   |
|           | 62.12  | Jasa Petugas Evaluasi Penutasan Buta Aksara          | OK                 | 150.000   |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja Pelaksanaan Kesetaraan dan Keaksaraan Pendidikan Non Formal diberikan kepada Tutor dan Penyelenggara Pelaksanaan Paket A, Paket B dan Paket C.

**63. HONORARIUM/JASA UPAH KERJA TEKNISI/MEKANIK/OPERATOR ALAT BERAT**

| NO        | URAIAN  | SATUAN                                      | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET       |
|-----------|---|---|--------------------|-----------|
| 1         | 2   | 3   | 4                  | 5         |
| <b>63</b> | <b>HONORARIUM/JASA UPAH KERJA TEKNISI/MEKANIK/OPERATOR ALAT BERAT</b> |   |                    |           |
|           | 63.1  | Petugas Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat | OB                 | 1.200.000 |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Upah Kerja Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat diberikan kepada Petugas Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang yang melaksanakan tugas sebagai Teknisi/Mekanik/Operator Alat Berat.

**64. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PENGOLAH/PENYUSUN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN.**

| NO        | URAIAN  | SATUAN   | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET     |
|-----------|---|--|--------------------|---------|
| 1         | 2   | 3  | 4                  | 5       |
| <b>64</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PENGOLAH/PENYUSUN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN.</b> |  |                    |         |
|           | 64.1  | Petugas Recording/Reporting Klinik KB                            | OB                 | 200.000 |
|           | 64.2  | Petugas Recording /Reporting Kecamatan                           | OB                 | 250.000 |
|           | 64.3  | Petugas Pengolah, Analisis Data Laporan dan Pengendalian Laporan | OB                 | 400.000 |
|           | 64.4  | Petugas Pengolah, Analisis Pendataan Mutasi Kependudukan         | Orang/<br>Triwulan | 750.000 |

|  |      |  |          |         |  |
|--|------|--|----------|---------|--|
|  | 64.5 | Jasa pendata Mutasi Data Keluarga (MDK)                                | OKK      | 300     |  |
|  | 64.6 | Jasa Bidan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | OK       | 500.000 |  |
|  | 64.7 | Fasilitator Kegiatan BOKB  | Kegiatan | 800.000 |  |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja Pengolah/Penyusun Laporan Informasi Kependudukan diberikan kepada Petugas Recording/Reporting Klinik KB dan Kecamatan dan Petugas Pengolah, Analis Data Laporan dan Pengendalian Laporan Mutasi Kependudukan dalam melaksanakan pengolahan dan penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja diberikan kepada petugas pendataan dalam kegiatan pemutakhiran basis data keluarga dan jasa bidan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang bertugas untuk melayani calon akseptor KB dan Fasilitator Kegiatan BOKB

**65. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TIM ENUMERATOR DAN PENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALIS PERKEMBANGAN HARGA PANGAN.**

| NO | URAIAN   |  | SATUAN             | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--|--------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2  |  | 3                  | 4                  | 5   |
| 65 | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TIM ENUMERATOR DAN PENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALIS PERKEMBANGAN HARGA PANGAN.</b> |  |                    |                    |     |
|    | 65.1   | Tim Enumerator   | Orang/<br>Triwulan | 300.000            |     |
|    | 65.2   | Tim Penyusun Laporan Pemantauan dan Analis Perkembangan Harga Pangan |                    |                    |     |
|    |  | a. Ketua   | Orang/<br>Triwulan | 400.000            |     |
|    |  | b. Sekretaris  | Orang/<br>Triwulan | 350.000            |     |
|    |  | c. Anggota   | Orang/<br>Triwulan | 300.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja Pengolah/Penyusun Laporan Informasi Kependudukan diberikan kepada Petugas Recording/Reporting Klinik KB dan Kecamatan dan Petugas Pengolah, Analis Data Laporan dan Pengendalian Laporan Mutasi Kependudukan dalam melaksanakan pengolahan dan penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja diberikan kepada petugas pendataan dalam kegiatan pemutakhiran basis data keluarga dan jasa bidan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang bertugas untuk melayani calon akseptor KB.

**66. TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS, PENATA ANASTESI, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN DOKTER HEWAN.**

| NO | URAIAN  |   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   |   | 3      | 4                  | 5   |
| 66 | <b>TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS, PENATA ANASTESI, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN DOKTER HEWAN.</b> |   |        |                    |     |
|    | 66.1  | Dokter Spesialis                            | OB     | 2.500.000          |     |
|    | 66.2  | Penata Anastesi                             | OB     | 2.000.000          |     |
|    | 66.3  | Dokter Umum IGD                             | OB     | 1.500.000          |     |
|    | 66.4  | Dokter Umum Polik/Bangsai                   | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 66.5  | Dokter Gigi                                 | OB     | 1.500.000          |     |
|    | 66.6  | Komite Mutu Rumah Sakit                     | OB     | 2.000.000          |     |
|    | 66.7  | Tim Verifikator Internal/ Pengurus Insentif | OB     | 1.500.000          |     |
|    | 66.8  | Tenaga Dokter Umum/Gigi Non PNS             | OB     | 2.000.000          |     |
|    | 66.9  | Tenaga Dokter Spesialis Non PNS             | OB     | 2.500.000          |     |
|    | 66.10   | Teknikal Registered Dietisien               | OB     | 1.500.000          |     |

**Penjelasan :**

Tambahan Penghasilan/Insentif bagi Dokter Spesialis, Penata Anestesi, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Hewan, Komite Mutu RS, Tim Verivikator/Pengusul Insentif dan Tenaga Dokter Non PNS diberikan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dan melaksanakan tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. LA PALALOI dan Dokter Hewan pada dinas terkait

**67. HONORARIUM/JASA PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 67 | <b>HONORARIUM/JASA PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.</b> |        |                    |     |
|    | 67.1 Tim Teknis Perizinan  | OB     | 1.000.000          |     |
|    | 67.2 Operator Perizinan  | OB     | 500.000            |     |
|    | 67.3 Tim Pengawasan  | OB     | 500.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sesuai dengan bidang atau tugas masing-masing.

**68. HONORARIUM/JASA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 68 | <b>HONORARIUM/JASA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.</b> |        |                    |     |
|    | 68.1 Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah               | OB     | 5.000.000          |     |
|    | 68.2 Pengelola Barang Milik Daerah                        | OB     | 4.000.000          |     |
|    | 68.3 Pejabat Penatausahaan Barang                         | OB     | 3.500.000          |     |
|    | 68.4 Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah                |        |                    |     |
|    | a. Ketua  | OB     | 3.000.000          |     |
|    | b. Sekretaris   | OB     | 2.500.000          |     |
|    | c. Anggota  | OB     | 2.000.000          |     |

**Penjelasan :**

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah.

Honorarium yang diberikan adalah sebagai insentif sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab dalam tim penatausahaan barang milik daerah.

**69. HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 69 | <b>HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU.</b> |        |                    |     |
|    | 69.1 HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU    | OB     | 500.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium diberikan setiap bulan kepada tenaga non PNS Pengelola PBB, BPHTB dan Retribusi tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

**70. HONORARIUM/JASA PANITIA SELEKSI/PENGUJI JABATAN PIMPINAN TINGGI**

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 70 | <b>HONORARIUM/JASA PANITIA SELEKSI/PENGUJI JABATAN PIMPINAN TINGGI</b> |        |                    |     |
|    | 70.1 Ketua Panitia Seleksi   | OB     | 5.000.000          |     |
|    | 70.2 Anggota Panitia Seleksi   | OB     | 4.000.000          |     |

|  |      |         |             |           |  |
|--|------|---------|-------------|-----------|--|
|  | 70.3 | Penguji | Per Peserta | 1.000.000 |  |
|--|------|---------|-------------|-----------|--|

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari Lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan, Pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan akademisi, pakar atau profesional yang dibentuk oleh PPK. Kegiatan dimaksud adalah menyesuaikan dengan tahapan/tugas. Honorarium Penguji diberikan kepada orang yang bertugas untuk menguji dalam pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan keputusan Bupati.

**71. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN CALON ANGGOTA POLRI**

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 71 | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN CALON ANGGOTA POLRI</b> |        |                    |     |
|    | Panitia Kegiatan Pembinaan Calon Anggota Polri   | OK     | 1.500.000          |     |

**Penjelasan :**

Pemberian Honorarium ini diberikan kepada Penyelenggara Kegiatan pada Lembaga Eksternal untuk melaksanakan Kegiatan atas dasar Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

**72. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL /JASA UPAH KERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 72 | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL /JASA UPAH KERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)</b> |        |                    |     |
|    | 72.1 Pemantau pelaksanaan seleksi penerimaan calon ASN   | OK     | 1.000.000          |     |
|    | 72.2 Petugas Keamanan dari eksternal   | OK     | 500.000            |     |
|    | 72.3 Petugas Keamanan Internal   | OK     | 300.000            |     |
|    | 72.4 Petugas Medis   | OK     | 300.000            |     |
|    | 72.5 Teknisi Operasional Komputer  | OK     | 300.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/jasa tenaga operasional/jasa upah kerja diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan calon ASN sehingga diharapkan kegiatan penyelenggaraan penerimaan calon ASN dapat berjalan lancar.

**73. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL /JASA UPAH KERJA TENAGA FOGGING (PENGASAPAN)**

| NO | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|---|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| 73 | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TENAGA FOGGING (PENGASAPAN)</b> |        |                    |     |
|    | Tenaga Fogging  | OK     | 300.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja Tenaga Fogging (Pengasapan) diberikan kepada petugas fogging. Fogging atau Pengasapan merupakan salah satu cara membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Pengasapan ini dapat membuat nyamuk Aedes Aegypti yang bersarang didalam rumah mati.

**74. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TENAGA SUPERVISOR DAN FASILITATOR SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)**

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--------|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2      | 3      | 4                  | 5   |

|           |   |              |    |         |  |
|-----------|---|--------------|----|---------|--|
| <b>74</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TENAGA SUPERVISOR DAN FASILITATOR SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)</b> |              |    |         |  |
|           | 74.1.   | Supervisor   | OB | 500.000 |  |
|           | 74.2.   | Fasilitator  | OB | 300.000 |  |
|           | 74.3.   | Back Office  | OB | 500.000 |  |
|           | 74.4.   | Front Office | OB | 500.000 |  |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja Tenaga Supervisor, Fasilitator, Back Office dan Front Office Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu diberikan kepada Pegawai Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

**75. BIAYA OPERASIONAL PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)**

| NO        | URAIAN   |  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|--|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2  |  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>75</b> | <b>BIAYA OPERASIONAL PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)</b> |  |        |                    |     |
|           | a.   | Nilai Pengembalian s/d Rp. 500 juta                      | OK     | 3.000.000          |     |
|           | b.   | Nilai Pengembalian di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar | OK     | 5.000.000          |     |
|           | c.   | Nilai Pengembalian di atas Rp. 2 miliar                  | OK     | 7.000.000          |     |

**Penjelasan :**

Biaya operasional diberikan kepada pendamping dari pihak berwenang setelah adanya pengembalian ganti kerugian daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) petugas pengawas fungsional daerah dengan melampirkan bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS) dan rekening koran dari Bank.

**76. UANG SAKU PENGAWASAN**

| NO        | URAIAN                      |                        | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|-----------------------------|------------------------|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2                           |                        | 3      | 4                  | 5   |
| <b>76</b> | <b>UANG SAKU PENGAWASAN</b> |                        |        |                    |     |
|           | a.                          | Penanggung Jawab       | OH     | 325.000            |     |
|           | b.                          | Wakil Penanggung Jawab | OH     | 300.000            |     |
|           | c.                          | Pengendali Teknis      | OH     | 275.000            |     |
|           | d.                          | Ketua Tim              | OH     | 250.000            |     |
|           | e.                          | Anggota                | OH     | 225.000            |     |

**Penjelasan :**

Uang saku pengawasan diberikan berdasarkan kedudukan dalam Tim.

**77. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU DAN LABELISASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT**

| NO        | URAIAN   |                                      | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2  |                                      | 3      | 4                  | 5   |
| <b>77</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU DAN LABELISASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT</b> |                                      |        |                    |     |
|           | a.   | Petugas Penginputan Data             | ORt    | 1.900              |     |
|           | b.   | Petugas Validasi dan Verifikasi Data | ORt    | 12.000             |     |

|  |    |                    |     |       |  |
|--|----|--------------------|-----|-------|--|
|  | c. | Petugas Labelisasi | ORt | 2.800 |  |
|--|----|--------------------|-----|-------|--|

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa diberikan kepada petugas penginput data/petugas validasi dan verifikasi yang diberikan oleh pejabat kepada Non PNS dengan mendatangi setiap Kepala Keluarga untuk membantu pelaksanaan pemutakhiran data dan labelisasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

| <b>78. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PENGELOLAAN DAN PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN</b> |  |  |        |                    |     |
|--|--|--|--------|--------------------|-----|
| NO   | URAIAN   |  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
| 1  | 2  |  | 3      | 4                  | 5   |
| 78   | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PENGELOLAAN DAN PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN</b> |  |        |                    |     |
|  | a.   | Belanja Bahan Perlengkapan Jenazah         | OK     | 1.000.000          |     |
|  | b.   | Pembaca Talkim                             | OK     | 300.000            |     |
|  | c.   | Pembersih Makam                            | OB     | 300.000            |     |
|  | d.   | Penggali Makam                             | OB     | 500.000            |     |
|  | e.   | Pemulasaran Jenazah dan Pengawetan Jenazah | OK     | 500.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Upah Kerja Pembaca Talkim, Pembersih Makam, Penggali Makam, Pemulasaran Jenazah dan Pengawetan Jenazah diberikan dalam rangka Pemakamam PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) atau jenazah terlantar.

| <b>79. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PENGURUS TIM PROFESI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (TKS)</b> |  |   |        |                    |     |
|--|--|---|--------|--------------------|-----|
| NO   | URAIAN   |   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
| 1  | 2  |   | 3      | 4                  | 5   |
| 79   | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PENGURUS TIM PROFESI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (TKS)</b> |   |        |                    |     |
|  | 79.1. Jasa Upah Kerja Pengurus dan Tim Profesi LK3   |   |        |                    |     |
|  | a.   | Ketua LK3   | OB     | 600.000            |     |
|  | b.   | Sekretaris LK3                                      | OB     | 500.000            |     |
|  | c.   | Bendahara LK3                                       | OB     | 300.000            |     |
|  | d.   | Pekerja Sosial (Peksos)                             | OB     | 500.000            |     |
|  | e.   | Polisi  | OK     | 500.000            |     |
|  | 79.2. Jasa Upah Kerja Tim Rehabilitasi Sosial  |   |        |                    |     |
|  | a.   | Ketua   | OK     | 600.000            |     |
|  | b.   | Sekretaris  | OK     | 500.000            |     |
|  | c.   | Anggota   | OK     | 300.000            |     |
|  | d.   | Satuan Polisi pamong Praja                          | OK     | 300.000            |     |
|  | 79.3. Jasa Upah Tenaga Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial   |   |        |                    |     |
|  | a.   | TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)        | OB     | 600.000            |     |
|  | b.   | Tali asih Taruna Siaga Bencana (TAGANA)             | OB     | 600.000            |     |
|  | c.   | Petugas Logistik                                    | OK     | 500.000            |     |
|  | d.   | Petugas Tim Reaksi Cepat (RC)                       | OB     | 500.000            |     |
|  | e.   | Petugas Admin Data Jaminan Sosial                   | OB     | 500.000            |     |
|  | f.   | Petugas Admin Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) | OB     | 600.000            |     |
|  | g.   | Petugas Posko Siaga bencana Alam                    | OB     | 500.000            |     |
|  | h.   | Petugas Admin Informasi Linjamsos                   | OB     | 500.000            |     |

|  |  |    |         |  |
|--|--|----|---------|--|
|  | i. Petugas Pengawas Penyaluran Bantuan Sosial dan Logistik   | OK | 600.000 |  |
|  | j. Petugas Verifikasi dan Validasi Data  | OK | 600.000 |  |
|  | k. Petugas Fasilitator dan Supervisor Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  | OB | 600.000 |  |
|  | l. Jasa Assesment (Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial)  | OB | 100.000 |  |
|  | 79.4. Jasa Kerja Tenaga Layanan Administrasi Perkantoran/Tenaga Operasional Petugas Siaga Bencana/Jasa Upah Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pengelola Data dan SLRT |    |         |  |
|  | a. Operasional SDM PKH   | OB | 500.000 |  |
|  | b. Koordinator TKS   | OB | 750.000 |  |
|  | 79.5. Pekerja Sosial Profesional/Jasa Assesment Pendamping PMKS dan Anak yang berhadapan dengan hukum  | OK | 750.000 |  |
|  | 79.6. Jasa Tenaga Operasional Pendampingan Program Bantuan Sosial  |    |         |  |
|  | a. Operator Koordinator TKS  | OB | 700.000 |  |
|  | b. Administrator   | OB | 600.000 |  |
|  | 79.7. Jasa Fasilitator Musrenbang (Khusus Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas)  | OK | 700.000 |  |

**Penjelasan :**

- 79.1. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, LK3 merupakan Lembaga konsultasi yang menangani Kasus keluarga atau KDRT
- 79.2. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, ditugaskan sesuai beban kerja masing-masing.
- 79.3. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, pada Penginput, Pengelola Data Sistem Peleayanan Rujukan Terpadu (SLRT)
- 79.4. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, Jasa Assesment merupakan upah Pendamping terhadap PMKS atau Anak yang berhadapan dengan Hukum, Pendampingan di Kepolisian sampai dengan Pengadilan.
- 79.5. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, yang menangani Penyaluran dan Program Bantuan Sosial.
- 79.6. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros untuk menangani Penyaluran dan Program Bantuan Sosial.
- 79.7. Honorarium/Jasa Upah Kerja diberikan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Khusus Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas.

**80. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL GURU MENGAJI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

| NO | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| 80 | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL GURU MENGAJI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.</b> |        |                    |     |
|    | Guru Mengaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros  | OB     | 800.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional Guru Mengaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros diberikan kepada guru mengaji ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

**81. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PETUGAS IRIGASI DAN DAERAH RAWA TAMBAK (DRT).**

| NO        | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>81</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PETUGAS IRIGASI DAN DAERAH RAWA TAMBAK (DRT)</b> |        |                    |     |
|           | Petugas Irigasi dan Daerah Rawa Tambak (DRT)   | OB     | 750.000            |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional Petugas Irigasi dan Daerah Rawa Tambak (DRT) diberikan kepada petugas irigasi dan daerah rawa tambak.

**82. INSENTIF TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19.**

| NO        | URAIAN   | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2  | 3      | 4                  | 5   |
| <b>82</b> | <b>INSENTIF TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19</b> |        |                    |     |
|           | 82.1 Tenaga Kesehatan  |        |                    |     |
|           | a. Dokter Spesialis  | OB     | 15.000.000         |     |
|           | b. Dokter Umum   | OB     | 10.000.000         |     |
|           | c. Perawat/Bidan   | OB     | 7.500.000          |     |
|           | d. Radiografer   | OB     | 5.000.000          |     |
|           | e. Laboratorium  | OB     | 5.000.000          |     |
|           | f. Apoteker  | OB     | 5.000.000          |     |
|           | g. Surveilans  | OB     | 5.000.000          |     |
|           | h. Elektromedik  | OB     | 5.000.000          |     |
|           | i. Nutrisionis   | OB     | 5.000.000          |     |
|           | 82.2 Tenaga Kesehatan Lainnya  | OB     | 5.000.000          |     |
|           | 82.3 Supir Ambulance/Puskesmas Keliling  | OB     | 1.500.000          |     |
|           | 82.4 Petugas Kebersihan COVID-19   | OB     | 1.200.000          |     |
|           | 82.5 Petugas Laundry COVID-19  | OB     | 1.000.000          |     |
|           | 82.6 Pendorong O2  | OB     | 750.000            |     |
|           | 82.7 Pemulasaran Jenazah Pasien COVID-19   | OK     | 500.000            |     |
|           | 82.8 - Petugas Ambulance Pasien COVID-19   | OB     | 750.000            |     |
|           | - Mengantar/menjemput pasien COVID-19 dari IGD ke ruang perawatan (area RSUD)                                      | OK     | 50.000             |     |
|           | - Merujuk pasien COVID-19 RSUD ke RS. Rujukan  | OK     | 200.000            |     |
|           | - Mengantar Jenazah COVID-19 dari RSUD ke Pemakaman  | OK     | 250.000            |     |
|           | 82.9 Petugas Limbah B3 COVID-19  | OB     | 1.000.000          |     |
|           | 82.10 Petugas Bangunan dan Listrik di ruangan COVID-19   | OB     | 1.800.000          |     |

**Penjelasan :**

Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Non Teknis Kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19

**83. SATUAN BIAYA UANG PEMBINAAN/HADIAH/LOMBA/PENGHARGAAN**

| NO          | URAIAN   | SATUAN  | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-------------|--|---------|--------------------|-----|
| 1           | 2  | 3       | 4                  | 5   |
| <b>83.1</b> | <b>Pemenang lomba Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat SD/SMP</b> |         |                    |     |
|             | a. Juara 1   | Org     | 1.000.000          |     |
|             | b. Juara 2   | Org     | 750.000            |     |
|             | c. Juara 3   | Org     | 500.000            |     |
| <b>83.2</b> | <b>Pemenang Lomba UKS Tingkat SD/SMP</b>                                       |         |                    |     |
|             | a. Juara 1   | Sekolah | 5.000.000          |     |
|             | b. Juara 2   | Sekolah | 3.500.000          |     |
|             | c. Juara 3   | Sekolah | 2.000.000          |     |



|  |              |   |                                    |            |
|--|--------------|---|------------------------------------|------------|
|  | <b>83.3</b>  | <b>Pemenang lomba Cerdas Cermat Tingkat SD/SMP</b>  |                                    |            |
|  |              | a. Juara 1  | Org                                | 1.500.000  |
|  |              | b. Juara 2  | Org                                | 1.200.000  |
|  |              | c. Juara 3  | Org                                | 800.000    |
|  |              | d. Juara Harapan 1  | Org                                | 500.000    |
|  | <b>83.4</b>  | <b>Pemenang lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)/Pemenang lomba Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tingkat SD/SMP</b> |                                    |            |
|  |              | a. Juara 1  | Org                                | 1.000.000  |
|  |              | b. Juara 2  | Org                                | 750.000    |
|  |              | c. Juara 3  | Org                                | 500.000    |
|  | <b>83.5</b>  | <b>Hadiah/Uang Penghargaan/Uang Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi</b>                                       |                                    |            |
|  |              | a. Juara 1  | Org                                | 1.500.000  |
|  |              | b. Juara 2  | Org                                | 1.250.000  |
|  |              | c. Juara 3  | Org                                | 1.000.000  |
|  | <b>83.6</b>  | <b>Hadiah Dara Daeng</b>  |                                    |            |
|  |              | a. Juara 1  | Org                                | 5.000.000  |
|  |              | b. Juara 2  | Org                                | 4.000.000  |
|  |              | c. Juara 3  | Org                                | 3.000.000  |
|  |              | d. Juara Favorit  | Org                                | 2.000.000  |
|  | <b>83.7</b>  | <b>Lomba Kelurahan</b>  |                                    |            |
|  |              | a. Juara 1  | Kel                                | 20.000.000 |
|  |              | b. Juara 2  | Kel                                | 15.000.000 |
|  |              | c. Juara 3  | Kel                                | 10.000.000 |
|  |              | d. Juara Harapan I  | Kel                                | 7.000.000  |
|  |              | e. Juara Harapan II   | Kel                                | 5.000.000  |
|  |              | f. Juara Harapan III  | Kel                                | 3.000.000  |
|  | <b>83.8</b>  | <b>Hadiah Futsal</b>  |                                    |            |
|  |              | a. Juara 1  | Tim                                | 4.000.000  |
|  |              | b. Juara II   | Tim                                | 3.000.000  |
|  |              | c. Juara III  | Tim                                | 2.000.000  |
|  |              | d. Juara Harapan IV   | Tim                                | 1.000.000  |
|  | <b>83.9</b>  | <b>Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Bulu tangkis antar Kecamatan</b>   |                                    |            |
|  |              | a. Juara I  | Ganda Dewasa Pa/Pi                 | 1.500.000  |
|  |              | Juara II  |                                    | 1.000.000  |
|  |              | Juara III   |                                    | 600.000    |
|  |              | Juara IV  |                                    | 600.000    |
|  |              | b. Juara I  | Ganda Campuran Taruna              | 1.500.000  |
|  |              | Juara II  |                                    | 1.000.000  |
|  |              | Juara III   |                                    | 600.000    |
|  |              | Juara IV  |                                    | 600.000    |
|  |              | c. Juara I  | Tunggal Taruna Putra               | 750.000    |
|  |              | Juara II  |                                    | 500.000    |
|  |              | Juara III   |                                    | 300.000    |
|  |              | Juara IV  |                                    | 300.000    |
|  | <b>83.10</b> | <b>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional</b>   |                                    |            |
|  |              | Hadiah Juara Favorit  | OK                                 | 750.000    |
|  | <b>83.11</b> | <b>Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Tenis Meja</b>   |                                    |            |
|  |              | a. Juara I  | Kadet U - 14 kebawah Tunggal Pa/Pi | 1.000.000  |
|  |              | Juara II  |                                    | 550.000    |
|  |              | Juara III   |                                    | 350.000    |
|  |              | Juara IV  |                                    | 350.000    |

|  |  |   |            |  |
|--|--|---|------------|--|
|  | b. Juara I   | Kategori Yuniior Pa/Pi U-18                       | 1.500.000  |  |
|  | Juara II   |   | 1.000.000  |  |
|  | Juara III  | tahun   | 500.000    |  |
|  | Juara IV   | kebawah Tunggal                                   | 500.000    |  |
|  | c. Juara I   | Kategori Senior Tunggal Pa/Pi                     | 1.500.000  |  |
|  | Juara II   |   | 1.000.000  |  |
|  | Juara III  |   | 500.000    |  |
|  | Juara IV   |   | 500.000    |  |
|  | d. Juara I   | Kategori Ganda Senior Putra                       | 2.000.000  |  |
|  | Juara II   |   | 1.500.000  |  |
|  | Juara III  |   | 750.000    |  |
|  | Juara IV   |   | 750.000    |  |
|  | e. Juara I   | Kategori Veteran U-45 tahun ke atas Tunggal Putra | 1.500.000  |  |
|  | Juara II   |   | 1.000.000  |  |
|  | Juara III  |   | 500.000    |  |
|  | Juara IV   |   | 500.000    |  |
|  | f. Juara I   | Kategori Ganda Veteran Putra                      | 2.000.000  |  |
|  | Juara II   |   | 1.500.000  |  |
|  | Juara III  |   | 750.000    |  |
|  | Juara IV   |   | 750.000    |  |
|  | <b>83.12 Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Sepak Bola</b>                    |   |            |  |
|  | a. Juara I   | Tim   | 15.000.000 |  |
|  | Juara II   | Tim   | 12.000.000 |  |
|  | Juara III  | Tim   | 8.000.000  |  |
|  | Juara IV   | Tim   | 5.000.000  |  |
|  | <b>83.13 Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Bola Volly</b>                    |   |            |  |
|  | a. Juara I   | Tim   | 5.000.000  |  |
|  | Juara II   | Tim   | 4.000.000  |  |
|  | Juara III  | Tim   | 3.000.000  |  |
|  | <b>83.14 Hadiah/uang pembinaan kejuaraan Sepak Takraw</b>                  |   |            |  |
|  | a. Juara I   | Tim   | 4.000.000  |  |
|  | Juara II   | Tim   | 3.000.000  |  |
|  | Juara III  | Tim   | 2.000.000  |  |
|  | <b>83.15 Hadiah/uang Penghargaan Individual (Pemain Terbaik/Top Score)</b> | OK  | 500.000    |  |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa, hadiah, Pembinaan dan penghargaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perlombaan/Kejuaraan.

**84. SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA/NON APARATUR SIPIL NEGARA, UANG LEMBUR DAN MAKAN KEGIATAN LAINNYA.**

| NO        | URAIAN  | SATUAN    | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|-----------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3         | 4                  | 5   |
| <b>84</b> | <b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA/NON APARATUR SIPIL NEGARA, UANG LEMBUR DAN MAKAN KEGIATAN LAINNYA.</b> |           |                    |     |
| 84.1      | Makan Minum Pendamping BPK  | OH        | 50.000             |     |
| 84.2      | Makan Minum Bumil/Bufas dan Pendamping Bumil/Bufas di RTK   | OK        | 50.000             |     |
| 84.3      | Makan Minum Petugas ASN/Honorer Kawasan Wisata  | OH        | 50.000             |     |
| 84.4      | Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan:  |           |                    |     |
|           | a. Prasmanan VIP (Pimpinan)   | Org/Paket | 100.000            |     |
|           | b. Snack VIP (Pimpinan)   | Org/Paket | 40.000             |     |

|  |      |  |          |        |  |
|--|------|--|----------|--------|--|
|  |      | c. Nasi Dos                              | Dos      | 25.000 |  |
|  |      | d. Kudapan (Snack)                       | Dos      | 15.000 |  |
|  |      | e. Kue Bosara                            | Biji     | 5.000  |  |
|  |      | f. Prasmanan Biasa                       | Org/Kali | 40.000 |  |
|  | 84.5 | Makan Minuman Tenaga Teknis Lapangan PJU | OH       | 10.000 |  |
|  | 84.6 | Uang Makan PNS                           | OH       | 10.000 |  |
|  | 84.7 | Uang Makan Lembur ASN/Non ASN            | OH       | 10.000 |  |
|  | 84.8 | Uang Lembur Non ASN                      | OJ       | 5.000  |  |
|  | 84.9 | Uang Lembur PNS                          |          |        |  |
|  |      | a. Golongan I                            | OJ       | 10.000 |  |
|  |      | b. Golongan II                           | OJ       | 13.000 |  |
|  |      | c. Golongan III                          | OJ       | 17.000 |  |
|  |      | d. Golongan IV                           | OJ       | 20.000 |  |

Penjelasan :

- a. Uang Makan diberikan kepada ASN/NON ASN dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah
- b. Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.  
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang.  
Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - uang makan lembur diperuntukkan bagi semua pegawai dengan besaran yang bervariasi, dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari.
  - batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.

#### 85. HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>85</b> | <b>HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI</b>                |        |                    |     |
| 85.1      | Tim Pengelola Aplikasi Kabupaten  |        |                    |     |
|           | a. Penanggung jawab   | OB     | 1.500.000          |     |
|           | b. Tenaga Ahli  | OB     | 1.400.000          |     |
|           | c. Administrator  | OB     | 1.050.000          |     |
|           | d. Operator   | OB     | 1.000.000          |     |
|           | e. Tim Teknis   | OB     | 900.000            |     |
| 85.2      | Unit Pengelola Aplikasi Tingkat Perangkat Daerah                        |        |                    |     |
|           | a. Penanggung jawab   | OB     | 550.000            |     |
|           | b. Administrator  | OB     | 500.000            |     |
|           | c. Operator   | OB     | 500.000            |     |
| 85.3      | Honorarium/Jasa Upah Kerja Pendukung IT                                 | OB     | 2.500.000          |     |
| 85.4      | Honorarium/Jasa Upah Kerja Tenaga Teknisi Jaringan                      | OB     | 2.000.000          |     |
| 85.5      | Honorarium/Jasa Upah Kerja Tenaga Peliputan                             | OB     | 1.500.000          |     |
| 85.6      | Jasa Teknologi Informasi/Jasa Media Elektronik Informasi (Siaran Radio) | Kali   | 250.000            |     |

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk mengelola kegiatan pelaksanaan Aplikasi dan Implementasi Teknologi Informasi pada tingkat kabupaten dan tingkat Perangkat Daerah.

#### 86. HONORARIUM OPERATOR SIM-HP PEMDA, SIPTL BPK DAN LAYANAN BEBAS TEMUAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|----|--------|--------|--------------------|-----|
| 1  | 2      | 3      | 4                  | 5   |

|           |   |  |    |           |  |
|-----------|---|--|----|-----------|--|
| <b>86</b> | <b>HONORARIUM OPERATOR SIM-HP PEMDA, SIPTL BPK DAN LAYANAN BEBAS TEMUAN</b> |  |    |           |  |
|           | 86.1  | Honorarium Operator SIM-HP PEMDA dan SIPTL BPK | OB | 1.000.000 |  |
|           | 86.1  | Honorarium Operator Bebas Temuan               | OB | 700.000   |  |

**Penjelasan :**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk sebagai operator di aplikasi SIM-HP PEMDA, SIPTL BPK dan Layanan Bebas Temuan di Lingkup Inspektorat.

**87. HONORARIUM/JASA TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN**

| NO        | URAIAN  |                           | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|---------------------------|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   |                           | 3      | 4                  | 5   |
| <b>87</b> | <b>HONORARIUM/JASA TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN</b> |                           |        |                    |     |
|           | a.  | Pengarah (Bupati)         | OB     | 5.000.000          |     |
|           | b.  | Penanggung Jawab (Sekda)  | OB     | 4.500.000          |     |
|           | c.  | Ketua (Kepala BPKPD)      | OB     | 4.000.000          |     |
|           | d.  | Sekretaris (Inspektur)    | OB     | 3.900.000          |     |
|           | e.  | Anggota (Kabid & Kasubid) | OB     | 3.000.000          |     |
|           | f.  | Anggota (Staf PNS)        | OB     | 2.000.000          |     |
|           | g.  | Anggota (Staf Non PNS)    | OB     | 1.000.000          |     |

**Penjelasan :**

Honorarium/Jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang masuk sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

**88. HONORARIUM/JASA PETUGAS UPTD PUSKESWAN**

| NO        | URAIAN  |   | SATUAN       | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|---|--------------|--------------------|-----|
| 1         | 2   |   | 3            | 4                  | 5   |
| <b>88</b> | <b>HONORARIUM/JASA PETUGAS UPTD PUSKESWAN</b> |   |              |                    |     |
|           | <b>88.1</b>                                   | <b>Jasa Petugas UPTD Puskesmas</b>                        |              |                    |     |
|           |   | a. Tenaga Paramedis Veteriner                             | OB           | 1.000.000          |     |
|           |   | b. Tenaga Paramedis Reproduksi                            | OB           | 1.500.000          |     |
|           |   | c. Tenaga Pemeriksa Kebuntingan                           | OB           | 1.000.000          |     |
|           |   | d. Tenaga Inseminator                                     | Orang / Ekor | 1.000.000          |     |
|           |   | e. Tenaga Administrator Lapangan                          | OB           | 750.000            |     |
|           | <b>88.2</b>                                   | <b>Jasa Petugas UPTD Pengelolaan Agribisnis Pertanian</b> |              |                    |     |
|           |   | a. Tenaga Operator Alat Mesin Pertanian                   | OB           | 750.000            |     |
|           |   | b. Tenaga Mekanik Alat Mesin Pertanian                    | OB           | 1.000.000          |     |
|           |   | c. Penjaga Gudang Alat Mesin Pertanian                    | OB           | 500.000            |     |

**Penjelasan :**

88.1 Honorarium/Jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai tenaga pelaksana Kegiatan di UPT PUSKESWAN.

88.2 Honorarium/Jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai tenaga pelaksana Kegiatan di UPT Agribisnis Pertanian.

**89. SATUAN BIAYA VISUM**

| NO        | URAIAN                    |  | SATUAN    | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---------------------------|--|-----------|--------------------|-----|
| 1         | 2                         |  | 3         | 4                  | 5   |
| <b>89</b> | <b>SATUAN BIAYA VISUM</b> |  | Per Orang | 300.000            |     |

**Penjelasan :**

Biaya Visum diberikan untuk penanganan korban kasus kekerasan yang memerlukan Visum.

**90. HONORARIUM/JASA PENERANGAN JALAN UMUM (PJU), PETUGAS E-MONITORING DAN PETUAS SIPDJD.**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>90</b> | <b>HONORARIUM/JASA PENERANGAN JALAN UMUM (PJU), PETUGAS E-MONITORING DAN PETUAS SIPDJD.</b> |        |                    |     |
|           | 89.1 Petugas PJU  | OB     | 1.500.000          |     |
|           | 89.2 Petugas E-Monitoring   | OB     | 800.000            |     |
|           | 89.3 Petugas SIPDJD   | OB     | 800.000            |     |

Penjelasan :

Honorarium/Jasa diberikan Kepada Petugas PJU, Petugas E-Monitoring dan Petugas SIPDJD sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.

**91. HONORARIUM/JASA TENAGA AHLI DARI UNIVERSITAS YANG DILAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DAN TANPA PERJANJIAN KERJASAMA.**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>91</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA AHLI DARI UNIVERSITAS YANG DILAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)</b> |        |                    |     |
|           | 91.1 AHLI MUDA  |        |                    |     |
|           | a. Ahli Muda (S1/Setara)  | OB     | 12.000.000         |     |
|           | b. Ahli Muda (S2/Setara)  | OB     | 15.000.000         |     |
|           | c. Ahli Muda (S3/Setara)  | OB     | 20.000.000         |     |
|           | 91.2 AHLI MADYA   |        |                    |     |
|           | a. Ahli Madya (S1/Setara)   | OB     | 14.000.000         |     |
|           | b. Ahli Madya (S2/Setara)   | OB     | 18.000.000         |     |
|           | c. Ahli Madya (S3/Setara)   | OB     | 24.000.000         |     |
|           | 91.3 AHLI UTAMA   |        |                    |     |
|           | a. Ahli Utama (S1/Setara)   | OB     | 17.000.000         |     |
|           | b. Ahli Utama (S2/Setara)   | OB     | 20.000.000         |     |
|           | c. Ahli Utama (S3/Setara)   | OB     | 28.000.000         |     |

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Ahli dari Universitas yang dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dibayarkan berdasarkan Nota Kesepahaman/MOU yang dibuat antara Bupati Maros dengan Rektor Universitas yang terakreditasi minimal "B"

**92. HONORARIUM/JASA TENAGA AHLI/PENELITI (YANG MEMILIKI SKA/SKK)**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET          |
|-----------|---|--------|--------------------|--------------|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5            |
| <b>92</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA AHLI/PENELITI (YANG MEMILIKI SKA/SKK)</b> |        |                    | (Masa Kerja) |
|           | <b>92.1 AHLI MUDA S1/SETARA</b>                                     | OB     | 17.955.000         | 1 Tahun      |
|           |   |        | 19.372.500         | 2 Tahun      |
|           |   |        | 20.790.000         | 3 Tahun      |
|           |   |        | 22.207.500         | 4 Tahun      |
|           |   |        | 23.625.000         | 5 Tahun>     |
|           |   | OM     | 4.379.268          | 1 Tahun      |
|           |   |        | 4.725.000          | 2 Tahun      |
|           |   |        | 5.070.732          | 3 Tahun      |
|           |   |        | 5.416.463          | 4 Tahun      |
|           |   |        | 5.762.195          | 5 Tahun>     |
|           |   | OH     | 897.750            | 1 Tahun      |

|  |             |                             |    |            |          |
|--|-------------|-----------------------------|----|------------|----------|
|  |             |                             |    | 968.625    | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.039.500  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.110.375  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.181.250  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OJ | 145.884    | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 157.402    | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 168.919    | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 180.436    | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 191.953    | 5 Tahun> |
|  | <b>92.2</b> | <b>AHLI MUDA S2/SETARA</b>  | OB | 26.696.250 | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 28.350.000 | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 30.240.000 | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 31.893.750 | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 33.783.750 | 5 Tahun> |
|  |             |                             |    | 6.511.280  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 6.914.634  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 7.375.610  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 7.778.963  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 8.239.939  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OH | 1.334.813  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.417.500  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.512.000  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.594.688  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.689.188  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OJ | 216.907    | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 230.344    | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 245.700    | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 259.137    | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 274.493    | 5 Tahun> |
|  | <b>92.3</b> | <b>AHLI MUDA S3/SETARA</b>  | OB | 33.547.500 | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 35.437.500 | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 37.327.500 | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 39.217.500 | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 41.107.500 | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OM | 8.182.317  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 8.643.293  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 9.104.268  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 9.565.244  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 10.026.220 | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OH | 1.677.375  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.771.875  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.866.375  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.960.875  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 2.055.375  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OJ | 272.573    | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 287.930    | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 303.286    | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 318.642    | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 333.998    | 5 Tahun> |
|  | <b>92.4</b> | <b>AHLI MADYA S1/SETARA</b> | OB | 20.790.000 | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 22.207.500 | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 23.625.000 | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 25.042.500 | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 26.460.000 | 5 Tahun> |

|  |             |                             |    |            |          |
|--|-------------|-----------------------------|----|------------|----------|
|  |             |                             | OM | 5.070.732  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 5.416.463  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 5.762.195  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 6.107.927  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 6.453.659  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OH | 1.039.500  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.110.375  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.181.250  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.252.125  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.323.000  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OJ | 168.919    | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 180.436    | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 191.953    | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 203.470    | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 214.988    | 5 Tahun> |
|  | <b>92.5</b> | <b>AHLI MADYA S2/SETARA</b> | OB | 30.240.000 | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 31.893.750 | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 33.783.750 | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 35.437.500 | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 37.091.250 | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OM | 7.375.610  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 7.778.963  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 8.239.939  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 8.643.293  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 9.046.646  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OH | 1.512.000  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.594.688  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.689.188  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.771.875  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.854.563  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OJ | 245.700    | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 259.137    | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 274.493    | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 287.930    | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 301.366    | 5 Tahun> |
|  | <b>92.6</b> | <b>AHLI MADYA S3/SETARA</b> | OB | 37.327.500 | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 39.217.500 | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 41.107.500 | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 42.997.500 | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 44.887.500 | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OM | 9.104.268  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 9.565.244  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 10.026.220 | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 10.487.195 | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 10.948.171 | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OH | 1.866.375  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.960.875  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 2.055.375  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 2.149.875  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 2.244.375  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OJ | 303.286    | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 318.642    | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 333.998    | 3 Tahun  |

|  |             |                             |    |            |          |
|--|-------------|-----------------------------|----|------------|----------|
|  |             |                             |    | 349.355    | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 364.711    | 5 Tahun> |
|  | <b>92.7</b> | <b>AHLI UTAMA S1/SETARA</b> | OB | 25.042.500 | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 26.460.000 | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 27.877.500 | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 29.295.000 | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 30.712.500 | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OM | 6.107.927  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 6.453.659  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 6.799.390  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 7.145.122  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 7.490.854  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OH | 1.252.125  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.323.000  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.393.875  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.464.750  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.535.625  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OJ | 203.470    | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 214.988    | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 226.505    | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 238.022    | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 249.539    | 5 Tahun> |
|  | <b>92.8</b> | <b>AHLI UTAMA S2/SETARA</b> | OB | 35.437.500 | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 37.091.250 | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 38.981.250 | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 40.635.000 | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 42.288.750 | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OM | 8.643.293  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 9.046.646  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 9.507.622  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 9.910.976  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 10.314.329 | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OH | 1.771.875  | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.854.563  | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 1.949.063  | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 2.031.750  | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 2.114.438  | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OJ | 287.930    | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 301.366    | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 316.723    | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 330.159    | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 343.596    | 5 Tahun> |
|  | <b>92.9</b> | <b>AHLI UTAMA S3/SETARA</b> | OB | 42.997.500 | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 44.887.500 | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 46.777.500 | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 48.667.500 | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 50.557.500 | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OM | 10.487.195 | 1 Tahun  |
|  |             |                             |    | 10.948.171 | 2 Tahun  |
|  |             |                             |    | 11.409.146 | 3 Tahun  |
|  |             |                             |    | 11.870.122 | 4 Tahun  |
|  |             |                             |    | 12.331.098 | 5 Tahun> |
|  |             |                             | OH | 2.149.875  | 1 Tahun  |



|  |  |  |    |           |          |
|--|--|--|----|-----------|----------|
|  |  |  |    | 2.244.375 | 2 Tahun  |
|  |  |  |    | 2.338.875 | 3 Tahun  |
|  |  |  |    | 2.433.375 | 4 Tahun  |
|  |  |  |    | 2.527.875 | 5 Tahun> |
|  |  |  | OJ | 349.355   | 1 Tahun  |
|  |  |  |    | 364.711   | 2 Tahun  |
|  |  |  |    | 380.067   | 3 Tahun  |
|  |  |  |    | 395.423   | 4 Tahun  |
|  |  |  |    | 410.780   | 5 Tahun> |

**93. HONORARIUM/JASA TENAGA AHLI/PENELITI (TIDAK ADA SKA/SKK)**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA<br>2022 (Rp) | KET          |
|-----------|---|--------|-----------------------|--------------|
| 1         | 2   | 3      | 4                     | 5            |
| <b>93</b> | <b>HONORARIUM/JASA TENAGA AHLI/PENELITI<br/>TIDAK ADA SKA/SKK</b> |        |                       | (Masa Kerja) |
|           | <b>93.1 S1/SETARA</b>   | OB     | **)                   | 1 Tahun      |
|           |   |        | **)                   | 2 Tahun      |
|           |   |        | 17.955.000            | 3 Tahun      |
|           |   |        | 19.372.500            | 4 Tahun      |
|           |   |        | 20.790.000            | 5 Tahun>     |
|           |   | OM     | **)                   | 1 Tahun      |
|           |   |        | **)                   | 2 Tahun      |
|           |   |        | 4.379.268             | 3 Tahun      |
|           |   |        | 4.725.000             | 4 Tahun      |
|           |   |        | 5.070.732             | 5 Tahun>     |
|           |   | OH     | **)                   | 1 Tahun      |
|           |   |        | **)                   | 2 Tahun      |
|           |   |        | 897.750               | 3 Tahun      |
|           |   |        | 968.625               | 4 Tahun      |
|           |   |        | 1.039.500             | 5 Tahun>     |
|           |   | OJ     | **)                   | 1 Tahun      |
|           |   |        | **)                   | 2 Tahun      |
|           |   |        | 145.884               | 3 Tahun      |
|           |   |        | 157.402               | 4 Tahun      |
|           |   |        | 168.919               | 5 Tahun>     |
|           | <b>93.2 S2 / SETARA</b>   | OB     | 23.152.500            | 1 Tahun      |
|           |   |        | 25.042.500            | 2 Tahun      |
|           |   |        | 26.696.250            | 3 Tahun      |
|           |   |        | 28.350.000            | 4 Tahun      |
|           |   |        | 30.240.000            | 5 Tahun>     |
|           |   | OM     | 5.646.951             | 1 Tahun      |
|           |   |        | 6.107.927             | 2 Tahun      |
|           |   |        | 6.511.280             | 3 Tahun      |
|           |   |        | 6.914.634             | 4 Tahun      |
|           |   |        | 7.375.610             | 5 Tahun>     |
|           |   | OH     | 1.157.625             | 1 Tahun      |
|           |   |        | 1.252.125             | 2 Tahun      |
|           |   |        | 1.334.813             | 3 Tahun      |
|           |   |        | 1.417.500             | 4 Tahun      |
|           |   |        | 1.512.000             | 5 Tahun>     |
|           |   | OJ     | 188.114               | 1 Tahun      |
|           |   |        | 203.470               | 2 Tahun      |
|           |   |        | 216.907               | 3 Tahun      |
|           |   |        | 230.344               | 4 Tahun      |
|           |   |        | 245.700               | 5 Tahun>     |

|  |             |                    |    |            |          |
|--|-------------|--------------------|----|------------|----------|
|  | <b>93.3</b> | <b>S3 / SETARA</b> | OB | 29.767.500 | 1 Tahun  |
|  |             |                    |    | 31.657.500 | 2 Tahun  |
|  |             |                    |    | 33.547.500 | 3 Tahun  |
|  |             |                    |    | 35.437.500 | 4 Tahun  |
|  |             |                    |    | 37.327.500 | 5 Tahun> |
|  |             |                    | OM | 7.260.366  | 1 Tahun  |
|  |             |                    |    | 7.721.341  | 2 Tahun  |
|  |             |                    |    | 8.182.317  | 3 Tahun  |
|  |             |                    |    | 8.643.293  | 4 Tahun  |
|  |             |                    |    | 9.104.268  | 5 Tahun> |
|  |             |                    | OH | 1.488.375  | 1 Tahun  |
|  |             |                    |    | 1.582.875  | 2 Tahun  |
|  |             |                    |    | 1.677.375  | 3 Tahun  |
|  |             |                    |    | 1.771.875  | 4 Tahun  |
|  |             |                    |    | 1.866.375  | 5 Tahun> |
|  |             |                    | OJ | 241.861    | 1 Tahun  |
|  |             |                    |    | 257.217    | 2 Tahun  |
|  |             |                    |    | 272.573    | 3 Tahun  |
|  |             |                    |    | 287.930    | 4 Tahun  |
|  |             |                    |    | 303.286    | 5 Tahun> |

**Penjelasan :**

- Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara
- Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan SKA, perhitungan pengalamannya berdasarkan akumulasi pengalaman profesi yang setara, bukan dihitung sejak kepemilikan SKA
- Ket : Tahun Pengalaman
- SKK/SKA : Sertifikat Kompetensi Kerja / Sertifikat Keahlian
- \*\*) : S1 dengan pengalaman kurang dari 3 Tahun dianggap Sub Profesional
- OB : Orang Perbulan
- OM : Orang Perminggu
- OH : Orang Perhari
- OJ : Orang Perjam

**94. BIAYA SEWA GEDUNG**

| NO        | URAIAN                   | SATUAN   | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------|-----|
| 1         | 2                        | 3        | 4                  | 5   |
| <b>94</b> | <b>BIAYA SEWA GEDUNG</b> |          |                    |     |
| 94.1      | Sewa Gedung Futsal       | Jam      | 250.000            |     |
| 94.2      | Sewa Gedung              | Kegiatan | 5.000.000          |     |
| 94.3      | Sewa Gedung Bulutangkis  | Hari     | 1.000.000          |     |

**Penjelasan :**

- Biaya sewa gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk sewa gedung

**95. HONORARIUM/JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)**

| NO        | URAIAN  | SATUAN      | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|-------------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3           | 4                  | 5   |
| <b>95</b> | <b>HONORARIUM/JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>        |             |                    |     |
| 95.1      | <b>DIKLAT KEPEMIMPINAN</b>  |             |                    |     |
|           | a. Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama | Per Peserta | 1.300.000          |     |
|           | b. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama                       | Per Peserta | 30.261.000         |     |

|  |      |  |             |            |  |
|--|------|--|-------------|------------|--|
|  |      | c. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Administrator                           | Per Peserta | 22.125.000 |  |
|  |      | d. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas                                 | Per Peserta | 20.230.000 |  |
|  | 95.2 | <b>DIKLAT PRAJABATAN</b>   |             |            |  |
|  |      | a. Prajabatan Golongan I dan Golongan II                                   | Per Peserta | 9.296.000  |  |
|  |      | b. Prajabatan Golongan III   | Per Peserta | 9.296.000  |  |
|  |      | c. Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2                                    | Per Peserta | 2.242.000  |  |
|  | 95.3 | <b>DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL</b>  |             |            |  |
|  |      | <b>A. DIKLAT TEKNIS</b>  |             |            |  |
|  |      | 1. Diklat 4 Hari   | Per Peserta | 2.900.000  |  |
|  |      | 2. Diklat 5 Hari   | Per Peserta | 3.200.000  |  |
|  |      | 3. Diklat 7 Hari   | Per Peserta | 4.500.000  |  |
|  |      | 4. Diklat 9 Hari   | Per Peserta | 5.100.000  |  |
|  |      | 5. Diklat 10 Hari  | Per Peserta | 5.500.000  |  |
|  |      | 6. Diklat 14 Hari  | Per Peserta | 6.650.000  |  |
|  |      | <b>B. DIKLAT FUNGSIONAL</b>  |             |            |  |
|  |      | 1. Diklat Calon Widyaiswara dengan Seleksi (29 Hari)                       | Per Peserta | 15.500.000 |  |
|  |      | 2. Diklat Calon Widyaiswara tanpa Seleksi (27 Hari)                        | Per Peserta | 12.650.000 |  |
|  |      | 3. Diklat Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (5 Hari) | Per Peserta | 3.200.000  |  |
|  |      | 4. Diklat Kewidyaiswaraan Ber jenjang Tingkat Lanjutan (15 hari)           | Per Peserta | 6.100.000  |  |
|  |      | 5. Diklat Kewidyaiswaraan Ber jenjang Tingkat Menengah (14 hari)           | Per Peserta | 5.900.000  |  |
|  |      | 6. Diklat Kewidyaiswaraan Ber jenjang Tingkat Tinggi (11 hari)             | Per Peserta | 5.200.000  |  |
|  |      | 7. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi widyaiswara (5 Hari)          | Per Peserta | 3.200.000  |  |
|  |      | 8. Diklat Calon Analis Kebijakan (17 Hari)                                 | Per Peserta | 10.000.000 |  |
|  |      | 9. Diklat Khusus Analis Kebijakan (10 Hari)                                | Per Peserta | 5.500.000  |  |
|  |      | 10. Diklat Lanjutan Analis Kebijakan (9 hari)                              | Per Peserta | 5.100.000  |  |
|  | 95.4 | Kursus Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM                                 | Peserta     | 5.000.000  |  |

**Penjelasan :**

Satuan Biaya diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan Biaya yang digunakan untuk Honorarium/Jasa diberikan kepada Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Kursus Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM diberikan kepada Sekretariat DPRD dan Pimpinan beserta anggota DPRD.

**96. JASA PENILAIAN KOMPETENSI**

| NO        | URAIAN   | SATUAN      | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----|
| 1         | 2  | 3           | 4                  | 5   |
| <b>96</b> | <b>JASA PENILAIAN KOMPETENSI</b>                                     |             |                    |     |
|           | <b>PENILAIAN KOMPETENSI</b>  |             |                    |     |
|           | a. Penilaian Kompetensi Metode Sederhana                             | Per Peserta | 3.500.000          |     |
|           | b. Penilaian Kompetensi Metode Sedang                                | Per Peserta | 5.700.000          |     |
|           | c. Penilaian Kompetensi Metode Kompleks                              | Per Peserta | 7.500.000          |     |
|           | d. Seleksi dan Uji kompetensi Calon Analis Kebijakan                 | Per Peserta | 1.600.000          |     |
|           | e. Seleksi dan Uji kompetensi Calon Widyaiswara                      | Per Peserta | 1.300.000          |     |
|           | f. Uji Kemampuan Teknis Penggunaan Komputer                          |             |                    |     |
|           | a. Penguji dan Pemeriksa   | OK          | 1.000.000          |     |
|           | b. Teknisi Komputer  | OK          | 750.000            |     |
|           | c. Operator Komputer   | OK          | 500.000            |     |
|           | g. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi |             |                    |     |
|           | - Seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT)                 | Per Peserta | 50.000             |     |

**Penjelasan :**

Jasa Penilaian Kompetensi diberikan kepada Lembaga yang melaksanakan Penilaian Kompetensi.

**97. SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/DIKLAT PRAJABATAN DAN DIKLAT CALON PENGAWAS SEKOLAH**

| NO        | URAIAN   | SATUAN  | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|---------|--------------------|-----|
| 1         | 2  | 3       | 4                  | 5   |
| <b>97</b> | <b>SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/DIKLAT PRAJABATAN DAN DIKLAT CALON PENGAWAS SEKOLAH</b> |         |                    |     |
| 96.1      | Diklat Prajabatan  | Peserta | 9.296.000          |     |
| 96.2      | Diklat Calon Pengawas Sekolah  | Peserta | 9.500.000          |     |

**Penjelasan :**

Satuan biaya pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan peserta. Satuan Biaya Diklat Calon Pengawas Sekolah adalah satuan biaya yang digunakan untuk biaya diklat calon pengawas sekolah.

**98. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

| NO        | URAIAN   | SATUAN          | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|--|-----------------|--------------------|-----|
| 1         | 2  | 3               | 4                  | 5   |
| <b>98</b> | <b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b> |                 |                    |     |
| 98.1      | Inventaris Kantor                              | Pegawai / Tahun | 80.000             |     |
| 98.2      | Personal Komputer/Laptop/notebook              | Unit/Tahun      | 730.000            |     |
| 98.3      | Printer  | Unit/Tahun      | 690.000            |     |
| 98.4      | AC Split                                       | Unit/Tahun      | 610.000            |     |
| 98.5      | Genset Lebih Kecil dari 50 KVA                 | Unit/Tahun      | 7.190.000          |     |
| 98.6      | Genset 75 KVA                                  | Unit/Tahun      | 8.640.000          |     |
| 98.7      | Genset 100 KVA                                 | Unit/Tahun      | 10.150.000         |     |
| 98.8      | Genset 125 KVA                                 | Unit/Tahun      | 10.780.000         |     |
| 98.9      | Genset 150 KVA                                 | Unit/Tahun      | 13.260.000         |     |
| 98.10     | Genset 175 KVA                                 | Unit/Tahun      | 14.810.000         |     |
| 98.11     | Genset 200 KVA                                 | Unit/Tahun      | 15.850.000         |     |
| 98.12     | Genset 250 KVA                                 | Unit/Tahun      | 16.790.000         |     |
| 98.13     | Genset 275 KVA                                 | Unit/Tahun      | 17.760.000         |     |
| 98.14     | Genset 300 KVA                                 | Unit/Tahun      | 20.960.000         |     |
| 98.15     | Genset 350 KVA                                 | Unit/Tahun      | 22.960.000         |     |
| 98.16     | Genset 450 KVA                                 | Unit/Tahun      | 25.620.000         |     |
| 98.17     | Genset 500 KVA                                 | Unit/Tahun      | 31.770.000         |     |

**Penjelasan :**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor ( yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), Personal komputer/Notebook, printer AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

**99. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN**

| NO        | URAIAN  | SATUAN | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----------|---|--------|--------------------|-----|
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5   |
| <b>99</b> | <b>SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN</b>   |        |                    |     |
| 99.1      | Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit/ Puskesmas                  | OH     | 36.000             |     |
| 99.2      | Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | OH     | 30.000             |     |
| 99.3      | Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team                                    | OH     | 41.000             |     |

**Penjelasan :**

99.1 Satuan biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit/Puskesmas adalah Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan kepada Pasien Rumah Sakit/Puskesmas.

99.2 Satuan biaya Pengadaan Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial didalam panti sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

99.3 Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

**100. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU.**

| NO  | URAIAN   | SATUAN      | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----|--|-------------|--------------------|-----|
| 1   | 2  | 3           | 4                  | 5   |
| 100 | <b>SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</b> | Peg. /Tahun | 1.610.000          |     |

**Penjelasan :**

Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian/pembelian meja dan kursi pegawai. Penggantian Inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

**101. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS.**

| NO  | URAIAN  | SATUAN     | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----|---|------------|--------------------|-----|
| 1   | 2   | 3          | 4                  | 5   |
| 101 | <b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS.</b> |            |                    |     |
|     | 101.1 Kendaraan Bupati  | Unit/Tahun | 41.900.000,-       |     |
|     | 101.2 Kendaraan Wakil Bupati                                      | Unit/Tahun | 41.900.000,-       |     |
|     | 101.3 Pejabat Eselon I  | Unit/Tahun | 40.000.000,-       |     |
|     | 101.4 Pejabat Eselon II   | Unit/Tahun | 38.630.000,-       |     |
|     | 101.5 Kendaraan Dinas Operasional                                 |            |                    |     |
|     | a. Roda 4   | Unit/Tahun | 33.630.000,-       |     |
|     | b. Double Gardan  | Unit/Tahun | 36.320.000,-       |     |
|     | c. Roda 2   | Unit/Tahun | 3.640.000,-        |     |
|     | 101.6 Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat |            |                    |     |
|     | a. Operasional dalam Lingkungan Kantor                            | Unit/Tahun | 9.750.000,-        |     |
|     | b. Roda 6   | Unit/Tahun | 37.110.000,-       |     |
|     | c. Speed Boat   | Unit/Tahun | 20.240.000,-       |     |

**Penjelasan :**

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan

- Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.
- Khusus untuk kendaraan operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

Satuan Biaya ini tidak diperuntukkan :

- kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

**102. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG**

| NO  | URAIAN  | SATUAN    | BIAYA TA 2022 (Rp) | KET |
|-----|---|-----------|--------------------|-----|
| 1   | 2   | 3         | 4                  | 5   |
| 102 | <b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG</b>                     |           |                    |     |
|     | 102.1 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat       | M2/ Tahun | 209.000,-          |     |
|     | 102.2 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat | M2/ Tahun | 190.000,-          |     |

|  |       |  |           |          |  |
|--|-------|--|-----------|----------|--|
|  | 102.3 | Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor | M2/ Tahun | 11.000,- |  |
|--|-------|--|-----------|----------|--|

**Penjelasan :**

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud

- a. gedung/bangunan milik pemda; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

**103. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR PERWAKILAN/MESS PEMERINTAH DAERAH**

| NO         | URAIAN  | SATUAN   | BIAYA TA 2021 (Rp) | KET |
|------------|---|----------|--------------------|-----|
| 1          | 2   | 3        | 4                  | 5   |
| <b>103</b> | <b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR PERWAKILAN/MESS PEMERINTAH DAERAH</b> |          |                    |     |
| 103.1      | Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Perwakilan/Mess Pemerintah Daerah                     | M2/Tahun | 179.000,-          |     |
| 103.2      | Pemeliharaan Halaman  | M2/Tahun | 10.000,-           |     |

**Penjelasan :**

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor perwakilan/mess Pemerintah Daerah digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan/mess Pemerintah Daerah yang berlokasi di Jakarta agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

**CATATAN UMUM**

Pengertian Istilah

- OJ = Orang/Jam
- OJP = Orang/Jam/Pelajaran
- OH = Orang/Hari
- OB = Orang/Bulan
- OBP = Orang/Bulan/Paket
- OT = Orang/Tahun
- OP = Orang/Paket
- OK = Orang/Kegiatan
- OK = Orang/Kali
- OR = Orang/Responden
- OPs = Orang/Pasang
- OJH = Orang/Jemaah Haji
- OKK = Orang/Kartu Keluarga
- ORt = Orang/Rumah Tangga
- TP = Tim/Tahun

**BUPATI MAROS,**

  
**A. S. CHAIDIR SYAM**



**BUPATI MAROS**  
**KEPUTUSAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR 1008/KPTS/35/VI/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDARISASI BELANJA PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Maros Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros, perlu menetapkan Standarisasi Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Maros Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros (Baik Derah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDARISASI BELANJA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Standarisasi Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Standarisasi Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 4 Juni 2021

**BUPATI MAROS,**



**H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR : 1008/KPTS/035/VI/2021**  
**TANGGAL : 4 Juni 2021**  
**TENTANG : PENETAPAN STANDARISASI**  
**BELANJA PERJALANAN DINAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**MAROS TAHUN 2022**

**A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.**

**1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri.**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk wilayah Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Moncongloe sedangkan uang transportasi lokal diberikan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Wilayah Kecamatan Simbang, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Turikale, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Tanralili. Uang harian perjalanan dinas di luar kota maros diberikan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

**TABEL 1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

| <b>NO.</b> | <b>PROPINSI</b> | <b>SATUAN</b> | <b>LUAR KOTA<br/>Rp.</b> | <b>DALAM<br/>KOTA LEBIH<br/>DARI 8 JAM<br/>Rp.</b> | <b>DIKLAT<br/>Rp.</b> |
|------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>        | <b>3</b>      | <b>4</b>                 | <b>5</b>   | <b>6</b>              |
| 1          | Aceh            | OH            | 360.000                  | -  | 110.000               |
| 2          | Sumatera Utara  | OH            | 370.000                  | -  | 110.000               |
| 3          | Riau            | OH            | 370.000                  | -  | 110.000               |
| <b>NO.</b> | <b>PROPINSI</b> | <b>SATUAN</b> | <b>LUAR KOTA<br/>Rp.</b> | <b>DALAM<br/>KOTA LEBIH</b>                        | <b>DIKLAT<br/>Rp.</b> |

|          |                     |          |          | <b>DARI 8 JAM</b> |          |
|----------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|
|          |                     |          |          | <b>Rp.</b>        |          |
| <b>1</b> | <b>2</b>            | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b>          | <b>6</b> |
| 4        | Kepulauan Riau      | OH       | 370.000  | -                 | 110.000  |
| 5        | Jambi               | OH       | 370.000  | -                 | 110.000  |
| 6        | Sumatera Barat      | OH       | 380.000  | -                 | 110.000  |
| 7        | Sumatera Selatan    | OH       | 380.000  | -                 | 110.000  |
| 8        | Lampung             | OH       | 380.000  | -                 | 110.000  |
| 9        | Bengkulu            | OH       | 380.000  | -                 | 110.000  |
| 10       | Bangka Belitung     | OH       | 410.000  | -                 | 120.000  |
| 11       | Banten              | OH       | 370.000  | -                 | 110.000  |
| 12       | Jawa Barat          | OH       | 430.000  | -                 | 130.000  |
| 13       | D.K.I. Jakarta      | OH       | 530.000  | -                 | 160.000  |
| 14       | Jawa Tengah         | OH       | 370.000  | -                 | 110.000  |
| 15       | D.I. Yogyakarta     | OH       | 420.000  | -                 | 130.000  |
| 16       | Jawa Timur          | OH       | 410.000  | -                 | 120.000  |
| 17       | Bali                | OH       | 480.000  | -                 | 140.000  |
| 18       | Nusa Tenggara Barat | OH       | 440.000  | -                 | 130.000  |
| 19       | Nusa Tenggara Timur | OH       | 430.000  | -                 | 130.000  |
| 20       | Kalimantan Barat    | OH       | 380.000  | -                 | 110.000  |
| 21       | Kalimantan Tengah   | OH       | 360.000  | -                 | 110.000  |
| 22       | Kalimantan Selatan  | OH       | 380.000  | -                 | 110.000  |
| 23       | Kalimantan Timur    | OH       | 430.000  | -                 | 130.000  |
| 24       | Kalimantan Utara    | OH       | 430.000  | -                 | 130.000  |
| 25       | Sulawesi Utara      | OH       | 370.000  | -                 | 110.000  |
| 26       | Gorontalo           | OH       | 370.000  | -                 | 110.000  |
| 27       | Sulawesi Barat      | OH       | 410.000  | -                 | 120.000  |
| 28       | Sulawesi Selatan    | OH       | 430.000  | 170.000           | 130.000  |
| 29       | Sulawesi Tengah     | OH       | 370.000  | -                 | 110.000  |
| 30       | Sulawesi Tenggara   | OH       | 380.000  | -                 | 110.000  |
| 31       | Maluku              | OH       | 380.000  | -                 | 110.000  |
| 32       | Maluku Utara        | OH       | 430.000  | -                 | 130.000  |
| 33       | Papua               | OH       | 580.000  | -                 | 170.000  |
| 34       | Papua Barat         | OH       | 480.000  | -                 | 140.000  |

Luar Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar Kabupaten Maros. Untuk perjalanan dinas di luar kota Provinsi mengikuti standar uang harian di provinsi tujuan.

## 2. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pimpinan DPRD, pejabat eselon II dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, Pimpinan DPRD, pejabat eselon II dan Anggota DPRD dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

**TABEL 2. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.**

| No | URAIAN  | SATUAN | LUAR KOTA<br>Rp. | DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM<br>Rp. |
|----|---|--------|------------------|--|
| 1. | Pejabat Negara/Pejabat Daerah/<br>Pimpinan DPRD | OH     | 250.000          | 125.000  |
| 2. | Pejabat Eselon II & Anggota DPRD                | OH     | 150.000          | 75.000   |

### B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.

**TABEL 3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

| NO. | PROPINSI         | SATUAN | TARIF HOTEL                      |                                    |                                    |                                    |                       |
|-----|------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|     |                  |        | Kepala Daerah /<br>Pimpinan DPRD | Anggota DPRD/<br>Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III/<br>Golongan IV | Pejabat Eselon IV/<br>Golongan III | Golongan I/II/Non ASN |
| 1   | 2                | 3      | 4                                | 5                                  | 6                                  | 7                                  | 8                     |
| 1.  | Aceh             | OH     | 4.420.000                        | 3.526.000                          | 1.294.000                          | 556.000                            | 556.000               |
| 2.  | Sumatera Utara   | OH     | 4.960.000                        | 1.518.000                          | 1.100.000                          | 530.000                            | 530.000               |
| 3.  | Riau             | OH     | 3.820.000                        | 3.119.000                          | 1.650.000                          | 852.000                            | 852.000               |
| 4.  | Kepulauan Riau   | OH     | 4.275.000                        | 1.854.000                          | 1.037.000                          | 792.000                            | 792.000               |
| 5.  | Jambi            | OH     | 4.000.000                        | 3.337.000                          | 1.212.000                          | 580.000                            | 580.000               |
| 6.  | Sumatera Barat   | OH     | 5.236.000                        | 3.332.000                          | 1.353.000                          | 650.000                            | 650.000               |
| 7.  | Sumatera Selatan | OH     | 5.850.000                        | 3.083.000                          | 1.571.000                          | 861.000                            | 861.000               |

|     |                     |    |           |           |           |         |         |
|-----|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 8.  | Lampung             | OH | 4.491.000 | 2.067.000 | 1.140.000 | 580.000 | 580.000 |
| 9.  | Bengkulu            | OH | 2.071.000 | 1.628.000 | 1.546.000 | 630.000 | 630.000 |
| 10. | Bangka Belitung     | OH | 3.827.000 | 2.838.000 | 1.957.000 | 662.000 | 662.000 |
| 11. | Banten              | OH | 5.725.000 | 2.373.000 | 1.000.000 | 718.000 | 718.000 |
| 12. | Jawa Barat          | OH | 5.381.000 | 2.755.000 | 1.006.000 | 570.000 | 570.000 |
| 13. | D.K.I. Jakarta      | OH | 5.850.000 | 1.490.000 | 992.000   | 730.000 | 730.000 |
| 14. | Jawa Tengah         | OH | 4.242.000 | 1.480.000 | 954.000   | 600.000 | 600.000 |
| 15. | D.I. Yogyakarta     | OH | 5.017.000 | 2.695.000 | 1.384.000 | 845.000 | 845.000 |
| 16. | Jawa Timur          | OH | 4.400.000 | 1.605.000 | 1.076.000 | 664.000 | 664.000 |
| 17. | Bali                | OH | 4.890.000 | 1.946.000 | 990.000   | 910.000 | 910.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OH | 3.500.000 | 2.648.000 | 1.418.000 | 580.000 | 580.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OH | 3.000.000 | 1.493.000 | 1.355.000 | 550.000 | 550.000 |
| 20. | Kalimantan Barat    | OH | 2.654.000 | 1.538.000 | 1.125.000 | 538.000 | 538.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah   | OH | 4.901.000 | 3.391.000 | 1.160.000 | 659.000 | 659.000 |
| 22. | Kalimantan Selatan  | OH | 4.797.000 | 3.316.000 | 1.500.000 | 540.000 | 540.000 |
| 23. | Kalimantan Timur    | OH | 4.000.000 | 2.188.000 | 1.507.000 | 804.000 | 804.000 |
| 24. | Kalimantan Utara    | OH | 4.000.000 | 2.188.000 | 1.507.000 | 804.000 | 804.000 |
| 25. | Sulawesi Utara      | OH | 4.919.000 | 2.290.000 | 924.000   | 782.000 | 782.000 |
| 26. | Gorontalo           | OH | 4.168.000 | 2.549.000 | 1.431.000 | 764.000 | 764.000 |
| 27. | Sulawesi Barat      | OH | 4.076.000 | 2.581.000 | 1.075.000 | 704.000 | 704.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan    | OH | 4.820.000 | 1.550.000 | 1.020.000 | 732.000 | 732.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah     | OH | 2.309.000 | 2.027.000 | 1.567.000 | 951.000 | 951.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara   | OH | 2.475.000 | 2.059.000 | 1.297.000 | 786.000 | 786.000 |
| 31. | Maluku              | OH | 3.467.000 | 3.240.000 | 1.048.000 | 667000  | 667000  |
| 32. | Maluku Utara        | OH | 3.440.000 | 3.175.000 | 1.073.000 | 600.000 | 600.000 |
| 33. | Papua               | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 829.000 | 829.000 |
| 34. | Papua Barat         | OH | 3.872.000 | 3.212.000 | 2.056.000 | 718.000 | 718.000 |

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Untuk wilayah Makassar, Pangkep dan Gowa tidak diberikan biaya penginapan.

### **C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling

sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

1. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1.a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2.b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

2. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik

daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

**TABEL 4. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY<br>Rp | FULLDAY<br>Rp | FULLBOARD<br>Rp | RESIDENCE<br>Rp |
|-----|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Aceh                | OP     | 346.000       | 403.000       | 1.075.000       | 749.000         |
| 1.  | Aceh                | OP     | 346.000       | 403.000       | 1.075.000       | 749.000         |
| 2.  | Sumatera Utara      | OP     | 276.000       | 365.000       | 800.000         | 641.000         |
| 3.  | Riau                | OP     | 225.000       | 335.000       | 690.000         | 560.000         |
| 4.  | Kepulauan Riau      | OP     | 230.000       | 360.000       | 790.000         | 590.000         |
| 5.  | Jambi               | OP     | 271.000       | 364.000       | 1.008.000       | 635.000         |
| 6.  | Sumatera Barat      | OP     | 245.000       | 310.000       | 987.000         | 555.000         |
| 7.  | Sumatera Selatan    | OP     | 268.000       | 384.000       | 860.000         | 652.000         |
| 8.  | Lampung             | OP     | 261.000       | 373.000       | 836.000         | 634.000         |
| 9.  | Bengkulu            | OP     | 250.000       | 373.000       | 973.000         | 623.000         |
| 10. | Bangka Belitung     | OP     | 305.000       | 400.000       | 925.000         | 705.000         |
| 11. | Banten              | OP     | 395.000       | 468.000       | 919.000         | 863.000         |
| 12. | Jawa Barat          | OP     | 426.000       | 530.000       | 1.110.000       | 956.000         |
| 13. | D.K.I. Jakarta      | OP     | 433.000       | 510.000       | 1.216.000       | 943.000         |
| 14. | Jawa Tengah         | OP     | 232.000       | 309.000       | 749.000         | 541.000         |
| 15. | D.I. Yogyakarta     | OP     | 250.000       | 405.000       | 963.000         | 655.000         |
| 16. | Jawa Timur          | OP     | 357.000       | 406.000       | 1.784.000       | 763.000         |
| 17. | Bali                | OP     | 375.000       | 490.000       | 1.500.000       | 865.000         |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OP     | 368.000       | 530.000       | 1.001.000       | 898.000         |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OP     | 308.000       | 388.000       | 1.088.000       | 696.000         |
| 20. | Kalimantan Barat    | OP     | 337.000       | 400.000       | 810.000         | 737.000         |
| 21. | Kalimantan Tengah   | OP     | 317.000       | 487.000       | 1.267.000       | 804.000         |
| 22. | Kalimantan Selatan  | OP     | 264.000       | 360.000       | 930.000         | 624.000         |
| 23. | Kalimantan Timur    | OP     | 274.000       | 365.000       | 863.000         | 639.000         |
| 24. | Kalimantan Utara    | OP     | 274.000       | 350.000       | 848.000         | 624.000         |
| 25. | Sulawesi Utara      | OP     | 273.000       | 350.000       | 870.000         | 623.000         |
| 26. | Gorontalo           | OP     | 215.000       | 393.000       | 1.338.000       | 608.000         |
| 27. | Sulawesi Barat      | OP     | 264.000       | 382.000       | 856.000         | 646.000         |
| 28. | Sulawesi Selatan    | OP     | 290.000       | 410.000       | 1.574.000       | 700.000         |

|     |                   |    |         |         |           |         |
|-----|-------------------|----|---------|---------|-----------|---------|
| 29. | Sulawesi Tengah   | OP | 283.000 | 389.000 | 1.013.000 | 672.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OP | 237.000 | 350.000 | 800.000   | 587.000 |
| 31. | Maluku            | OP | 306.000 | 454.000 | 1.300.000 | 760.000 |
| 32. | Maluku Utara      | OP | 316.000 | 498.000 | 850.000   | 814.000 |
| 33. | Papua             | OP | 318.000 | 536.000 | 1.863.000 | 854.000 |
| 34. | Papua Barat       | OP | 292.000 | 526.000 | 1.752.000 | 818.000 |

**TABEL. 5. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II.**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY<br>Rp | FULLDAY<br>Rp | FULLBOARD<br>Rp | RESIDENCE<br>Rp |
|-----|---------------------|--------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Aceh                | OP     | 300.000       | 330.000       | 772.000         | 630.000         |
| 2.  | Sumatera Utara      | OP     | 178.000       | 275.000       | 746.000         | 453.000         |
| 3.  | Riau                | OP     | 185.000       | 245.000       | 591.000         | 430.000         |
| 4.  | Kepulauan Riau      | OP     | 227.000       | 273.000       | 625.000         | 500.000         |
| 5.  | Jambi               | OP     | 215.000       | 301.000       | 840.000         | 516.000         |
| 6.  | Sumatera Barat      | OP     | 173.000       | 240.000       | 663.000         | 413.000         |
| 7.  | Sumatera Selatan    | OP     | 218.000       | 293.000       | 745.000         | 511.000         |
| 8.  | Lampung             | OP     | 216.000       | 270.000       | 640.000         | 486.000         |
| 9.  | Bengkulu            | OP     | 214.000       | 284.000       | 912.000         | 498.000         |
| 10. | Bangka Belitung     | OP     | 299.000       | 385.000       | 804.000         | 684.000         |
| 11. | Banten              | OP     | 275.000       | 354.000       | 837.000         | 629.000         |
| 12. | Jawa Barat          | OP     | 331.000       | 398.000       | 822.000         | 729.000         |
| 13. | D.K.I. Jakarta      | OP     | 354.000       | 433.000       | 1.197.000       | 787.000         |
| 14. | Jawa Tengah         | OP     | 191.000       | 263.000       | 675.000         | 454.000         |
| 15. | D.I. Yogyakarta     | OP     | 210.000       | 310.000       | 750.000         | 520.000         |
| 16. | Jawa Timur          | OP     | 338.000       | 395.000       | 1.352.000       | 733.000         |
| 17. | Bali                | OP     | 330.000       | 441.000       | 1.182.000       | 771.000         |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OP     | 280.000       | 420.000       | 764.000         | 700.000         |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OP     | 271.000       | 377.000       | 825.000         | 648.000         |
| 20. | Kalimantan Barat    | OP     | 250.000       | 331.000       | 664.000         | 581.000         |
| 21. | Kalimantan Tengah   | OP     | 242.000       | 340.000       | 1.031.000       | 582.000         |
| 22. | Kalimantan Selatan  | OP     | 194.000       | 295.000       | 734.000         | 489.000         |
| 23. | Kalimantan Timur    | OP     | 207.000       | 302.000       | 750.000         | 509.000         |
| 24. | Kalimantan Utara    | OP     | 207.000       | 302.000       | 750.000         | 509.000         |
| 25. | Sulawesi Utara      | OP     | 185.000       | 270.000       | 737.000         | 455.000         |
| 26. | Gorontalo           | OP     | 175.000       | 250.000       | 1.299.000       | 425.000         |
| 27. | Sulawesi Barat      | OP     | 235.000       | 323.000       | 792.000         | 558.000         |
| 28. | Sulawesi Selatan    | OP     | 206.000       | 320.000       | 1.127.000       | 526.000         |
| 29. | Sulawesi Tengah     | OP     | 234.000       | 385.000       | 738.000         | 619.000         |
| 30. | Sulawesi Tenggara   | OP     | 195.000       | 295.000       | 688.000         | 490.000         |
| 31. | Maluku              | OP     | 253.000       | 346.000       | 724.000         | 599.000         |
| 32. | Maluku Utara        | OP     | 169.000       | 354.000       | 669.000         | 523.000         |
| 33. | Papua               | OP     | 293.000       | 478.000       | 990.000         | 771.000         |
| 34. | Papua Barat         | OP     | 284.000       | 421.000       | 1.120.000       | 705.000         |



## 2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 6.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

**TABEL. 6. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

| NO  | PROVINSI            | SATUAN | FULLBOARD<br>DI LUAR<br>KOTA Rp. | FULLBOARD<br>DI DALAM<br>KOTA Rp. | FULLDAY/<br>HALFDAY DI<br>DALAM<br>KOTA Rp. | RESIDENCE<br>DI DALAM<br>KOTA Rp |
|-----|---------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1   | 2                   | 3      | 4                                | 5                                 | 6   | 7                                |
| 1.  | Aceh                | OH     | 120.000                          | 120.000                           | 85.000                                      | 120.000                          |
| 2.  | Sumatera Utara      | OH     | 130.000                          | 130.000                           | 95.000                                      | 130.000                          |
| 3.  | Riau                | OH     | 130.000                          | 130.000                           | 85000                                       | 130.000                          |
| 4.  | Kepulauan Riau      | OH     | 130.000                          | 130.000                           | 95.000                                      | 130.000                          |
| 5.  | Jambi               | OH     | 130.000                          | 130.000                           | 95.000                                      | 130.000                          |
| 6.  | Sumatera Barat      | OH     | 120.000                          | 120.000                           | 85000                                       | 120.000                          |
| 7.  | Sumatera Selatan    | OH     | 120.000                          | 120.000                           | 85000                                       | 120.000                          |
| 8.  | Lampung             | OH     | 130.000                          | 130.000                           | 95.000                                      | 130.000                          |
| 9.  | Bengkulu            | OH     | 130.000                          | 130.000                           | 95.000                                      | 130.000                          |
| 10. | Bangka Belitung     | OH     | 130.000                          | 130.000                           | 95.000                                      | 130.000                          |
| 11. | Banten              | OH     | 120.000                          | 120.000                           | 85000                                       | 130.000                          |
| 12. | Jawa Barat          | OH     | 150.000                          | 150.000                           | 105.000                                     | 150.000                          |
| 13. | D.K.I. Jakarta      | OH     | 180.000                          | 180.000                           | 130.000                                     | 180.000                          |
| 14. | Jawa Tengah         | OH     | 130.000                          | 130.000                           | 95.000                                      | 130.000                          |
| 15. | D.I. Yogyakarta     | OH     | 140.000                          | 140.000                           | 100.000                                     | 140.000                          |
| 16. | Jawa Timur          | OH     | 140.000                          | 140.000                           | 100.000                                     | 140.000                          |
| 17. | Bali                | OH     | 160.000                          | 160.000                           | 115.000                                     | 160.000                          |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OH     | 150.000                          | 150.000                           | 105.000                                     | 150.000                          |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OH     | 140.000                          | 140.000                           | 100.000                                     | 140.000                          |
| 20. | Kalimantan Barat    | OH     | 130.000                          | 130.000                           | 95.000                                      | 130.000                          |
| 21. | Kalimantan Tengah   | OH     | 120.000                          | 120.000                           | 85.000                                      | 120.000                          |
| 22. | Kalimantan Selatan  | OH     | 130.000                          | 130.000                           | 95.000                                      | 130.000                          |
| 23. | Kalimantan Timur    | OH     | 150.000                          | 150.000                           | 105.000                                     | 150.000                          |

|     |                   |    |         |         |         |         |
|-----|-------------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 24. | Kalimantan Utara  | OH | 150.000 | 150.000 | 105.000 | 150.000 |
| 25. | Sulawesi Utara    | OH | 130.000 | 130.000 | 95.000  | 130.000 |
| 26. | Gorontalo         | OH | 130.000 | 130.000 | 95.000  | 130.000 |
| 27. | Sulawesi Barat    | OH | 120.000 | 120.000 | 85.000  | 120.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan  | OH | 150.000 | 150.000 | 105.000 | 150.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah   | OH | 130.000 | 130.000 | 95.000  | 130.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OH | 130.000 | 130.000 | 95.000  | 130.000 |
| 31. | Maluku            | OH | 120.000 | 120.000 | 85.000  | 120.000 |
| 32. | Maluku Utara      | OH | 130.000 | 130.000 | 95.000  | 130.000 |
| 33. | Papua             | OH | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 200.000 |
| 34. | Papua Barat       | OH | 160.000 | 160.000 | 115.000 | 160.000 |

#### D. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9, dan Tabel 10.

**TABEL. 7. KENDARAAN DINAS PEJABAT**

| NO | PROVINSI            | SATUAN | BESARAN     |
|----|---------------------|--------|-------------|
| 1  | 2                   | 3      | 4           |
| I  | PEJABAT ESELON I    | Unit   | 702.970.000 |
| II | PEJABAT ESELON II : |        |             |
|    | Sulawesi Selatan    | Unit   | 513.850.000 |

**TABEL.8. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)**

| No. | PROVINSI            | SATUAN | PICK UP<br>Rp | MINIBUS<br>Rp   | DOUBLE<br>GARDAN<br>Rp |
|-----|---------------------|--------|---------------|-----------------|------------------------|
| 1   | 2                   | 3      | 4             | 5               | 6                      |
|     | SULAWESI<br>SELATAN | Unit   | 252.844.000   | 377.950.00<br>0 | 468.830.0<br>00        |

**TABEL. 9. KENDARAAN OPERASIONAL BUS**

| NO | URAIAN                     | SATUAN | BESARAN Rp    |
|----|----------------------------|--------|---------------|
| 1  | 2                          | 3      | 4             |
| 1  | Roda 4 dan/atau Bus Kecil  | Unit   | 360.942.000   |
| 2  | Roda 6 dan/atau Bus Sedang | Unit   | 718.252.000   |
| 3  | Roda 6 dan/atau Bus Besar  | Unit   | 1.184.787.000 |

**TABEL.10. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)**

| NO | URAIAN           | SATUAN | OPERASIONAL | LAPANGAN   |
|----|------------------|--------|-------------|------------|
| 1  | 2                | 3      | 4           | 5          |
|    | SULAWESI SELATAN | Unit   | 30.767.000  | 33.892.000 |

**E. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI****1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Berkaitan dengan pandemi Covid-19, biaya tiket dapat ditambahkan biaya Test PCR atau Antigen selama dipersyaratkan dalam syarat perjalanan. Biaya tiket bisnis hanya diperuntukkan oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 11. Harga tiket disesuaikan dengan harga riil (at cost).

**TABEL. 11. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

| NO | KOTA           |          | SATUAN BIAYA TIKET |           |
|----|----------------|----------|--------------------|-----------|
|    | ASAL           | TUJUAN   | BISNIS             | EKONOMI   |
| 1  | 2              | 3        | 4                  | 5         |
| 1  | Jakarta        | Makassar | 7.444.000          | 3.829.000 |
| 2  | Ambon          | Makassar | 6.022.000          | 3.455.000 |
| 3  | Balikpapan     | Makassar | 12.664.000         | 6.150.000 |
| 4  | Banda Aceh     | Makassar | 12.760.000         | 6.781.000 |
| 5  | Bandar Lampung | Makassar | 8.161.000          | 4.161.000 |
| 6  | Batam          | Makassar | 10.375.000         | 5.337.000 |

|    |                |          |            |           |
|----|----------------|----------|------------|-----------|
| 7  | Denpasar       | Makassar | 4.182.000  | 2.631.000 |
| 8  | Jambi          | Makassar | 9.659.000  | 4.952.000 |
| 9  | Yogyakarta     | Makassar | 6.525.000  | 3.893.000 |
| 10 | Kendari        | Makassar | 7.637.000  | 4.311.000 |
| 11 | Malang         | Makassar | 10.129.000 | 5.166.000 |
| 12 | Mataram        | Makassar | 4.717.000  | 2.909.000 |
| 13 | Medan          | Makassar | 12.514.000 | 6.172.000 |
| 14 | Medan          | Makassar | 10.974.000 | 5.402.000 |
| 15 | Palembang      | Makassar | 9.466.000  | 4.781.000 |
| 16 | Palu           | Makassar | 4.268.000  | 2.578.000 |
| 17 | Pangkal Pinang | Makassar | 9.060.000  | 4.663.000 |
| 18 | Biak           | Makassar | 8.493.000  | 4.931.000 |
| 19 | Jayapura       | Makassar | 10.193.000 | 5.787.000 |
| 20 | Kendari        | Makassar | 2.663.000  | 1.786.000 |
| 21 | Manado         | Makassar | 5.327.000  | 2.909.000 |
| 22 | Timika         | Makassar | 11.723.000 | 6.567.000 |
| 23 | Padang         | Makassar | 10.974.000 | 5.402.000 |
| 24 | Pontianak      | Makassar | 9.915.000  | 5.241.000 |
| 25 | Semarang       | Makassar | 9.466.000  | 4.706.000 |
| 26 | Solo           | Makassar | 9.466.000  | 4.845.000 |
| 27 | Surabaya       | Makassar | 5.936.000  | 3.433.000 |

## **2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

### a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

### b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri terinci pada Tabel 12.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 12, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

**TABEL. 12. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.**

| <b>NO</b> | <b>PROVINSI</b>     | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN (RP)</b> |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>            | <b>3</b>      | <b>4</b>            |
| 1         | Aceh                | Orang/Kali    | 123.000             |
| 2         | Sumatera Utara      | Orang/Kali    | 232.000             |
| 3         | Riau                | Orang/Kali    | 94.000              |
| 4         | Kepulauan Riau      | Orang/Kali    | 137.000             |
| 5         | Jambi               | Orang/Kali    | 147.000             |
| 6         | Sumatera Barat      | Orang/Kali    | 190.000             |
| 7         | Sumatera Selatan    | Orang/Kali    | 128.000             |
| 8         | Lampung             | Orang/Kali    | 167.000             |
| 9         | Bengkulu            | Orang/Kali    | 109.000             |
| 10        | Bangka Belitung     | Orang/Kali    | 90.000              |
| 11        | Banten              | Orang/Kali    | 446.000             |
| 12        | Jawa Barat          | Orang/Kali    | 166.000             |
| 13        | D.K.I. Jakarta      | Orang/Kali    | 256.000             |
| 14        | Jawa Tengah         | Orang/Kali    | 75.000              |
| 15        | D.I. Yogyakarta     | Orang/Kali    | 118.000             |
| 16        | Jawa Timur          | Orang/Kali    | 194.000             |
| 17        | Bali                | Orang/Kali    | 159.000             |
| 18        | Nusa Tenggara Barat | Orang/Kali    | 231.000             |
| 19        | Nusa Tenggara Timur | Orang/Kali    | 108.000             |
| 20        | Kalimantan Barat    | Orang/Kali    | 135.000             |
| 21        | Kalimantan Tengah   | Orang/Kali    | 111.000             |
| 22        | Kalimantan Selatan  | Orang/Kali    | 150.000             |
| 23        | Kalimantan Timur    | Orang/Kali    | 450.000             |
| 24        | Kalimantan Utara    | Orang/Kali    | 102.000             |
| 25        | Sulawesi Utara      | Orang/Kali    | 138.000             |
| 26        | Gorontalo           | Orang/Kali    | 240.000             |
| 27        | Sulawesi Barat      | Orang/Kali    | 313.000             |
| 28        | Sulawesi Selatan    | Orang/Kali    | 145.000             |
| 29        | Sulawesi Tengah     | Orang/Kali    | 65.000              |
| 30        | Sulawesi Tenggara   | Orang/Kali    | 171.000             |
| 31        | Maluku              | Orang/Kali    | 240.000             |
| 32        | Maluku Utara        | Orang/Kali    | 215.000             |
| 33        | Papua               | Orang/Kali    | 431.000             |
| 34        | Papua Barat         | Orang/Kali    | 182.000             |

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 ;

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a) Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b) Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cosf;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

### **3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali perjalanan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/ kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari Ibu kota Provinsi ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi yang sama (One Way atau sekali perjalanan) terinci pada Tabel 13.

**TABEL 13 : SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY).**

| <b>NO</b> | <b>IBUKOTA<br/>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/ KOTA<br/>TUJUAN</b> | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN<br/>(Rp)</b> |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                    | <b>3</b>                          | <b>4</b>      | <b>5</b>                |
|           | <b>ACEH</b>                 |                                   |               |                         |
| 1         | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Barat                   | Orang/Kali    | 275.000                 |
| 2         | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Barat<br>Daya           | Orang/Kali    | 298.000                 |
| 3         | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Besar                   | Orang/Kali    | 183.000                 |
| 4         | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Jaya                    | Orang/Kali    | 238.000                 |
| 5         | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Selatan                 | Orang/Kali    | 325.000                 |
| 6         | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Singkil                 | Orang/Kali    | 420.000                 |
| 7         | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Tamiang                 | Orang/Kali    | 315.000                 |
| 8         | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Tengah                  | Orang/Kali    | 293.000                 |
| 9         | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Tenggara                | Orang/Kali    | 460.000                 |
| 10        | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Timur                   | Orang/Kali    | 289.000                 |
| 11        | Banda Aceh                  | Kab. Aceh Utara                   | Orang/Kali    | 270.000                 |
| 12        | Banda Aceh                  | Kab. Bener Meriah                 | Orang/Kali    | 278.000                 |
| 13        | Banda Aceh                  | Kab . Bireuen                     | Orang/Kali    | 220.000                 |

|    |                           |                              |            |         |
|----|---------------------------|------------------------------|------------|---------|
| 14 | Banda Aceh                | Kab. Gayo Lues               | Orang/Kali | 370.000 |
| 15 | Banda Aceh                | Kab. Nagan Raya              | Orang/Kali | 275.000 |
| 16 | Banda Aceh                | Kab . Pidie                  | Orang/Kali | 190.000 |
| 17 | Banda Aceh                | Kab. Pidie Jaya              | Orang/Kali | 205.000 |
| 18 | Banda Aceh                | Kota Langsa                  | Orang/Kali | 301.000 |
| 19 | Banda Aceh                | Kota Lhokseumawe             | Orang/Kali | 240.000 |
| 20 | Banda Aceh                | Kota Subulussalam            | Orang/Kali | 400.000 |
|    | <b>SUMATERA<br/>UTARA</b> |                              |            |         |
| 21 | Medan                     | Kab. Asahan                  | Orang/Kali | 259.000 |
| 22 | Medan                     | Kab. Batubara                | Orang/Kali | 225.000 |
| 23 | Medan                     | Kab. Dairi                   | Orang/Kali | 270.000 |
| 24 | Medan                     | Kab. Deli Serdang            | Orang/Kali | 186.000 |
| 25 | Medan                     | Kab. Humbang<br>Hasundutan   | Orang/Kali | 300.000 |
| 26 | Medan                     | Kab. Karo                    | Orang/Kali | 200.000 |
| 27 | Medan                     | Kab. Labuhan Batu            | Orang/Kali | 287.000 |
| 28 | Medan                     | Kab. Labuhan Batu<br>Selatan | Orang/Kali | 360.000 |
| 29 | Medan                     | Kab. La buhan Batu<br>Utara  | Orang/Kali | 300.000 |
| 30 | Medan                     | Kab. Langkat                 | Orang/Kali | 186.000 |
| 31 | Medan                     | Kab. Ma ndailing<br>Natal    | Orang/Kali | 420.000 |
| 32 | Medan                     | Kab. Padang Lawas            | Orang/Kali | 420.000 |
| 33 | Medan                     | Kab. Padang Lawas<br>Utara   | Orang/Kali | 420.000 |
| 34 | Medan                     | Kab. Pakpak Bharat           | Orang/Kali | 300.000 |
| 35 | Medan                     | Kab. Samosir                 | Orang/Kali | 330.000 |
| 36 | Medan                     | Kab. Serdang<br>Bedagai      | Orang/Kali | 200.000 |
| 37 | Medan                     | Kab. Simalungun              | Orang/Kali | 264.000 |
| 38 | Medan                     | Kab. Tapanuli<br>Selatan     | Orang/Kali | 328.000 |
| 39 | Medan                     | Kab. Tapanuli<br>Tengah      | Orang/Kali | 345.000 |
| 40 | Medan                     | Kab. Tapanuli Utara          | Orang/Kali | 330.000 |
| 41 | Medan                     | Kab. Toba Samosir            | Orang/Kali | 300.000 |
| 42 | Medan                     | Kota Binjai                  | Orang/Kali | 180.000 |
| 43 | Medan                     | Kota<br>PematangSiantar      | Orang/Kali | 225.000 |
| 44 | Medan                     | Kota Sibolga                 | Orang/Kali | 345.000 |
| 45 | Medan                     | Kota Tanjung Balai           | Orang/Kali | 285.000 |
| 46 | Medan                     | Kota Te bing Tinggi          | Orang/Kali | 203.000 |
|    | <b>RIAU</b>               |                              |            |         |



|    |                       |                            |            |         |
|----|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
| 47 | Pekanbaru             | Kab. Indragiri Hilir       | Orang/Kali | 380.000 |
| 48 | Pekanbaru             | Kab. Indragiri Hulu        | Orang/Kali | 315.000 |
| 49 | Pekanbaru             | Kab. Kampar                | Orang/Kali | 200.000 |
| 50 | Pekanbaru             | Kab. Kuantan Singingi      | Orang/Kali | 300.000 |
| 51 | Pekanbaru             | Kab. Pelalawan             | Orang/Kali | 225.000 |
| 52 | Pekanbaru             | Kab. Rokan Hilir           | Orang/Kali | 350.000 |
| 53 | Pekanbaru             | Kab. Rokan Hulu            | Orang/Kali | 322.000 |
| 54 | Pekanbaru             | Kab. Siak                  | Orang/Kali | 350.000 |
| 55 | Pekanbaru             | Kota Dumai                 | Orang/Kali | 400.000 |
|    | <b>KEPULAUAN RIAU</b> |                            |            |         |
| 56 | Taniung Pinang        | Kab. Bintan                | Orang/Kali | 185.000 |
|    | <b>JAMBI</b>          |                            |            |         |
| 57 | Jambi                 | Kab. Batanghari            | Orang/Kali | 175.000 |
| 58 | Jambi                 | Kab. Bungo                 | Orang/Kali | 270.000 |
| 59 | Jambi                 | Kab. Kerinci               | Orang/Kali | 325.000 |
| 60 | Jambi                 | Kab . Merangin             | Orang/Kali | 260.000 |
| 61 | Jambi                 | Kab. Muaro Jambi           | Orang/Kali | 170.000 |
| 62 | Jambi                 | Sarolangun                 | Orang/Kali | 241.000 |
| 63 | Jambi                 | Kab . Tanjung Jabung Barat | Orang/Kali | 225.000 |
| 64 | Jambi                 | Kab. Tanjung Jabung Timur  | Orang/Kali | 190.000 |
| 65 | Jambi                 | Kab . Tebo                 | Orang/Kali | 250.000 |
| 66 | Jambi                 | Kota Sungai Penuh          | Orang/Kali | 308.000 |
|    | <b>SUMATERA BARAT</b> |                            |            |         |
| 67 | Padang                | Kab . Agam                 | Orang/Kali | 225.000 |
| 68 | Padang                | Kab. Dharmasraya           | Orang/Kali | 250.000 |
| 69 | Padang                | Kab. Lima Puluh Kota       | Orang/Kali | 225.000 |
| 70 | Padang                | Kab. Padang Pariaman       | Orang/Kali | 205.000 |
| 71 | Padang                | Kab. Pasaman               | Orang/Kali | 250.000 |
| 72 | Padang                | Kab. Pasaman Barat         | Orang/Kali | 250.000 |
| 73 | Padang                | Kab. Pesisir Selatan       | Orang/Kali | 205.000 |
| 74 | Padang                | Kab. Sijunjung             | Orang/Kali | 225.000 |
| 75 | Padang                | Kab. Solok                 | Orang/Kali | 210.000 |
| 76 | Padang                | Kab. Solok Selatan         | Orang/Kali | 250.000 |
| 77 | Padang                | Kab. Tanah Datar           | Orang/Kali | 220.000 |
| 78 | Padang                | Kab. Bukit Tinggi          | Orang/Kali | 215.000 |
| 79 | Padang                | Kab. Padang Panjang        | Orang/Kali | 210.000 |

|     |                         |                                |            |         |
|-----|-------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| 80  | Padang                  | Kab. Pariaman                  | Orang/Kali | 200.000 |
| 81  | Padang                  | Kab. Payakumbuh                | Orang/Kali | 225.000 |
| 82  | Padang                  | Kab. Sawahlunto                | Orang/Kali | 215.000 |
| 83  | Padang                  | Kab. Solok                     | Orang/Kali | 210.000 |
|     | <b>SUMATERA SELATAN</b> |                                |            |         |
| 84  | Palembang               | Kab. Banyuasin                 | Orang/Kali | 203.000 |
| 85  | Palembang               | Kab. Empat Lawang              | Orang/Kali | 315.000 |
| 86  | Palembang               | Kab. Lahat                     | Orang/Kali | 250.000 |
| 87  | Palembang               | Kab. Muara Enim                | Orang/Kali | 235.000 |
| 88  | Palembang               | Kab. Musi Banyuasin            | Orang/Kali | 235.000 |
| 89  | Palembang               | Kab. Musi Rawas                | Orang/Kali | 320.000 |
| 90  | Palembang               | Kab. Musi Rawas Utara          | Orang/Kali | 325.000 |
| 91  | Palembang               | Kab. Ogan Ilir                 | Orang/Kali | 205.000 |
| 92  | Palembang               | Kab. Ogan Komering Ilir        | Orang/Kali | 205.000 |
| 93  | Palembang               | Kab. Ogan Komering Ulu         | Orang/Kali | 248.000 |
| 94  | Palembang               | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Orang/Kali | 250.000 |
| 95  | Palembang               | Kab. Ogan Komering Ulu Timur   | Orang/Kali | 245.000 |
| 96  | Palembang               | Kab. Pali                      | Orang/Kali | 265.000 |
| 97  | Palembang               | Kota. Lubuk Linggau            | Orang/Kali | 290.000 |
| 99  | Palembang               | Kota Prabumulih                | Orang/Kali | 205.000 |
|     | <b>LAMPUNG</b>          |                                |            |         |
| 100 | Bandar Lampung          | Kab. Lampung Barat             | Orang/Kali | 270.000 |
| 101 | Bandar Lampung          | Kab. Lampung Selatan           | Orang/Kali | 234.000 |
| 102 | Bandar Lampung          | Kab. Lampung Tengah            | Orang/Kali | 246.000 |
| 103 | Bandar Lampung          | Kab. Lampung Timur             | Orang/Kali | 246.000 |
| 104 | Bandar Lampung          | Kab. Lampung Utara             | Orang/Kali | 252.000 |
| 105 | Bandar Lampung          | Kab. Mesuji                    | Orang/Kali | 276.000 |
| 106 | Bandar Lampung          | Kab. Pesawaran                 | Orang/Kali | 216.000 |
| 107 | Bandar Lampung          | Kab. Pesisir Barat             | Orang/Kali | 200.000 |
| 108 | Bandar Lampung          | Kab. Pringsewu                 | Orang/Kali | 222.000 |
| 109 | Bandar Lampung          | Kab. Tanggamus                 | Orang/Kali | 240.000 |
| 110 | Bandar Lampung          | Kab. Tulang Bawang             | Orang/Kali | 252.000 |
| 111 | Bandar Lampung          | Kab. Tulang Bawang Barat       | Orang/Kali | 267.000 |
| 112 | Bandar Lampung          | Kab. Way Kanan                 | Orang/Kali | 270.000 |
| 113 | Bandar Lampung          | Kab. Metro                     | Orang/Kali | 234.000 |

|     |                            |                        |            |         |
|-----|----------------------------|------------------------|------------|---------|
|     | <b>BENGKULU</b>            |                        |            |         |
| 114 | Bengkulu                   | Kab. Bengkulu Selatan  | Orang/Kali | 344.000 |
| 115 | Bengkulu                   | Kab. Bengkulu Tengah   | Orang/Kali | 232.000 |
| 116 | Bengkulu                   | Kab. Bengkulu Utara    | Orang/Kali | 313.000 |
| 117 | Bengkulu                   | Kab . Kaur             | Orang/Kali | 385.000 |
| 118 | Bengkulu                   | Kab. Kepahiang         | Orang/Kali | 298.000 |
| 119 | Bengkulu                   | Kab . Lebong           | Orang/Kali | 375.000 |
| 120 | Bengkulu                   | Kab . Mukomuko         | Orang/Kali | 423.000 |
| 121 | Bengkulu                   | Kab . Rejang Lebong    | Orang/Kali | 313.000 |
| 122 | Bengkulu                   | Kab. Seluma            | Orang/Kali | 282.000 |
|     | <b>BANGKA<br/>BELITUNG</b> |                        |            |         |
| 123 | Pangkalpinang              | Kab. Bangka            | Orang/Kali | 250.000 |
| 124 | Pangkalpinang              | Kab. Bangka Barat      | Orang/Kali | 275.000 |
| 125 | Pangkalpinang              | Kab. Bangka Selatan    | Orang/Kali | 275.000 |
| 126 | Pangkalpinang              | Kab. Bangka Tengah     | Orang/Kali | 250.000 |
|     | <b>BANTEN</b>              |                        |            |         |
| 127 | Serang                     | Kab. Lebak             | Orang/Kali | 208.000 |
| 128 | Serang                     | Kab. Pandeglang        | Orang/Kali | 138.000 |
| 129 | Serang                     | Kab. Serang            | Orang/Kali | 160.000 |
| 130 | Serang                     | Kab. Tangerang         | Orang/Kali | 254.000 |
| 131 | Serang                     | Kota Cilegon           | Orang/Kali | 160.000 |
| 132 | Serang                     | Kota Tangerang         | Orang/Kali | 313.000 |
| 133 | Serang                     | Kota Tangerang Selatan | Orang/Kali | 347.000 |
|     | <b>JAWA BARAT</b>          |                        |            |         |
| 134 | Bandung                    | Kab. Bandung           | Orang/Kali | 183.000 |
| 135 | Bandung                    | Kab. Bandung Barat     | Orang/Kali | 275.000 |
| 136 | Bandung                    | Kab. Bekasi            | Orang/Kali | 265.000 |
| 137 | Bandung                    | Kab. Bogor             | Orang/Kali | 185.000 |
| 138 | Bandung                    | Kab. Ciamis            | Orang/Kali | 245.000 |
| 139 | Bandung                    | Kab. Cianjur           | Orang/Kali | 215.000 |
| 140 | Bandung                    | Kab . Cirebon          | Orang/Kali | 280.000 |
| 141 | Bandung                    | Kab . Garut            | Orang/Kali | 243.000 |
| 142 | Bandung                    | Kab. Indramayu         | Orang/Kali | 275.000 |
| 143 | Bandung                    | Kab. Karawang          | Orang/Kali | 248.000 |
| 144 | Bandung                    | Kab. Kuningan          | Orang/Kali | 275.000 |
| 145 | Bandung                    | Kab. Majalengka        | Orang/Kali | 235.000 |

|     |                    |                   |            |         |
|-----|--------------------|-------------------|------------|---------|
| 146 | Bandung            | Kab. Pangadaran   | Orang/Kali | 283.000 |
| 147 | Bandung            | Kab. Purwakarta   | Orang/Kali | 218.000 |
| 148 | Bandung            | Kab . Subang      | Orang/Kali | 208.000 |
| 149 | Bandung            | Kab. Sukabumi     | Orang/Kali | 245.000 |
| 150 | Bandung            | Kab. Sumedang     | Orang/Kali | 230.000 |
| 151 | Bandung            | Kab. Tasikmalaya  | Orang/Kali | 245.000 |
| 152 | Bandung            | Kota Banjar       | Orang/Kali | 283.000 |
| 153 | Bandung            | Kota Bekasi       | Orang/Kali | 265.000 |
| 154 | Bandung            | Kota Bogor        | Orang/Kali | 285.000 |
| 155 | Bandung            | Kota Cimahi       | Orang/Kali | 168.000 |
| 156 | Bandung            | Kota Cirebon      | Orang/Kali | 270.000 |
| 157 | Bandung            | Kota Depok        | Orang/Kali | 275.000 |
| 158 | Bandung            | Kota Sukabumi     | Orang/Kali | 226.000 |
| 159 | Bandung            | Kota Tasikmalaya  | Orang/Kali | 245.000 |
|     | <b>JAWA TENGAH</b> |                   |            |         |
| 160 | Semarang           | Kab. Banjarnegara | Orang/Kali | 260.000 |
| 161 | Semarang           | Kab. Banyumas     | Orang/Kali | 257.000 |
| 162 | Semarang           | Kab. Batang       | Orang/Kali | 240.000 |
| 163 | Semarang           | Kab. Elora        | Orang/Kali | 270.000 |
| 164 | Semarang           | Kab. Boyolali     | Orang/Kali | 240.000 |
| 165 | Semarang           | Kab. Brebes       | Orang/Kali | 263.000 |
| 166 | Semarang           | Kab. Cilacap      | Orang/Kali | 280.000 |
| 167 | Semarang           | Kab. Demak        | Orang/Kali | 230.000 |
| 168 | Semarang           | Kab. Grobogan     | Orang/Kali | 235.000 |
| 169 | Semarang           | Kab. Jepara       | Orang/Kali | 240.000 |
| 170 | Semarang           | Kab. Karanganyar  | Orang/Kali | 250.000 |
| 171 | Semarang           | Kab. Kebumen      | Orang/Kali | 260.000 |
| 172 | Semarang           | Kab. Kendal       | Orang/Kali | 230.000 |
| 173 | Semarang           | Kab. Klaten       | Orang/Kali | 250.000 |
| 174 | Semarang           | Kab. Kudus        | Orang/Kali | 235.000 |
| 175 | Semarang           | Kab . Magelang    | Orang/Kali | 240.000 |
| 176 | Semarang           | Kab. Pati         | Orang/Kali | 240.000 |
| 177 | Semarang           | Kab . Pekalongan  | Orang/Kali | 245.000 |
| 178 | Semarang           | Kab . Pemalang    | Orang/Kali | 250.000 |
| 179 | Semarang           | Kab . Purbalingga | Orang/Kali | 270.000 |
| 180 | Semarang           | Kab. Purworejo    | Orang/Kali | 250.000 |
| 181 | Semarang           | Kab. Rembang      | Orang/Kali | 250.000 |

|     |                   |                   |            |         |
|-----|-------------------|-------------------|------------|---------|
| 182 | Semarang          | Kab. Semarang     | Orang/Kali | 230.000 |
| 183 | Semarang          | Kab. Sragen       | Orang/Kali | 250.000 |
| 184 | Semarang          | Kab. Sukoharjo    | Orang/Kali | 250.000 |
| 185 | Semarang          | Kab. Tega!        | Orang/Kali | 260.000 |
| 186 | Semarang          | Kab. Temanggung   | Orang/Kali | 240.000 |
| 187 | Semarang          | Kab. Wonogiri     | Orang/Kali | 250.000 |
| 188 | Semarang          | Kab. Wonosobo     | Orang/Kali | 250.000 |
| 189 | Semarang          | Kota Magelang     | Orang/Kali | 240.000 |
| 190 | Semarang          | Kota Pekalongan   | Orang/Kali | 245.000 |
| 191 | Semarang          | Kota Salatiga     | Orang/Kali | 235.000 |
| 192 | Semarang          | Kota Surakarta    | Orang/Kali | 245.000 |
| 193 | Semarang          | Kota Tega!        | Orang/Kali | 260.000 |
|     | <b>YOGYAKARTA</b> |                   |            |         |
| 194 | Yogyakarta        | Kab. Bantul       | Orang/Kali | 250.000 |
| 195 | Yogyakarta        | Kab. Gunung Kidul | Orang/Kali | 350.000 |
| 196 | Yogyakarta        | Kab. Kulon Progo  | Orang/Kali | 350.000 |
| 197 | Yogyakarta        | Kab. Steman       | Orang/Kali | 200.000 |
|     | <b>JAWA TIMUR</b> |                   |            |         |
| 198 | Surabaya          | Kab. Bangkalan    | Orang/Kali | 225.000 |
| 199 | Surabaya          | Kab. Banyuwangi   | Orang/Kali | 285.000 |
| 200 | Surabaya          | Kab. Blitar       | Orang/Kali | 255.000 |
| 201 | Surabaya          | Kab. Bojonegoro   | Orang/Kali | 225.000 |
| 202 | Surabaya          | Kab. Bondowoso    | Orang/Kali | 255.000 |
| 203 | Surabaya          | Kab. Gresik       | Orang/Kali | 225.000 |
| 204 | Surabaya          | Kab . Jember      | Orang/Kali | 261.000 |
| 205 | Surabaya          | Kab . Jombang     | Orang/Kali | 235.000 |
| 206 | Surabaya          | Kab. Kediri       | Orang/Kali | 235.000 |
| 207 | Surabaya          | Kab. Lamongan     | Orang/Kali | 225.000 |
| 208 | Surabaya          | Kab. Lumajang     | Orang/Kali | 261.000 |
| 209 | Surabaya          | Kab. Madiun       | Orang/Kali | 245.000 |
| 210 | Surabaya          | Kab. Magetan      | Orang/Kali | 253.000 |
| 211 | Surabaya          | Kab . Malang      | Orang/Kali | 228.000 |
| 212 | Surabaya          | Kab. Mojokerto    | Orang/Kali | 225.000 |
| 213 | Surabaya          | Kab. Nganjuk      | Orang/Kali | 245.000 |
| 214 | Surabaya          | Kab. Ngawi        | Orang/Kali | 253.000 |
| 215 | Surabaya          | Kab. Pacitan      | Orang/Kali | 285.000 |
| 216 | Surabaya          | Panlekasan        | Orang/Kali | 243.000 |

|     |                                |                           |            |         |
|-----|--------------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 217 | Surabaya                       | Pasuruan                  | Orang/Kali | 228.000 |
| 218 | Surabaya                       | Kab. Ponorogo             | Orang/Kali | 255.000 |
| 219 | Surabaya                       | Kab. Probolinggo          | Orang/Kali | 228.000 |
| 220 | Surabaya                       | Kab. Sampang              | Orang/Kali | 235.000 |
| 221 | Surabaya                       | Kab. Sidoarjo             | Orang/Kali | 240.000 |
| 222 | Surabaya                       | Kab. Situbondo            | Orang/Kali | 255.000 |
| 223 | Surabaya                       | Kab. Sumenep              | Orang/Kali | 255.000 |
| 224 | Surabaya                       | Kab. Trenggalek           | Orang/Kali | 245.000 |
| 225 | Surabaya                       | Kab. Tuban                | Orang/Kali | 245.000 |
| 226 | Surabaya                       | Kab. Tulungagung          | Orang/Kali | 245.000 |
| 227 | Surabaya                       | Kata Batu                 | Orang/Kali | 242.000 |
| 228 | Surabaya                       | Kata Blitar               | Orang/Kali | 255.000 |
| 229 | Surabaya                       | Kata Bojonegoro           | Orang/Kali | 225.000 |
| 230 | Surabaya                       | Kata Kediri               | Orang/Kali | 235.000 |
| 231 | Surabaya                       | Kata Madiun               | Orang/Kali | 245.000 |
| 232 | Surabaya                       | Kata Malang               | Orang/Kali | 228.000 |
| 233 | Surabaya                       | Kata Mojokerto            | Orang/Kali | 225.000 |
| 234 | Surabaya                       | Kata Probolinggo          | Orang/Kali | 228.000 |
|     | <b>BALI</b>                    |                           |            |         |
| 235 | Denpasar                       | Kab. Badung               | Orang/Kali | 188.000 |
| 236 | Denpasar                       | Kab. Bangli               | Orang/Kali | 225.000 |
| 237 | Denpasar                       | Kab. Buleleng             | Orang/Kali | 265.000 |
| 238 | Denpasar                       | Kab. Gianyar              | Orang/Kali | 225.000 |
| 239 | Denpasar                       | Kab. Jembrana             | Orang/Kali | 270.000 |
| 240 | Denpasar                       | Kab. Karangasem           | Orang/Kali | 263.000 |
| 241 | Denpasar                       | Kab. Tabanan              | Orang/Kali | 225.000 |
|     | <b>NUSA TENGGARA<br/>BARAT</b> |                           |            |         |
| 242 | Mataram                        | Kab. Lombok Barat         | Orang/Kali | 325.000 |
| 243 | Mataram                        | Kab. Lombok Tengah        | Orang/Kali | 450.000 |
| 244 | Mataram                        | Kab. Lombok Timur         | Orang/Kali | 350.000 |
|     | <b>NUSA TENGGARA<br/>TIMUR</b> |                           |            |         |
| 245 | Kupang                         | Kab. Belu                 | Orang/Kali | 325.000 |
| 246 | Kupang                         | Kab. Kupang               | Orang/Kali | 175.000 |
| 247 | Kupang                         | Kab. Timar Tengah Selatan | Orang/Kali | 218.000 |
| 248 | Kupang                         | Kab. Timar Tengah Utara   | Orang/Kali | 275.000 |
|     | <b>KALIMANTAN<br/>BARAT</b>    |                           |            |         |

|     |                               |                          |            |         |
|-----|-------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 249 | Pontianak                     | Kab . Bengkayang         | Orang/Kali | 270.000 |
| 250 | Pontianak                     | Kab. Kapuas Hulu         | Orang/Kali | 550.000 |
| 251 | Pontianak                     | Kab . Kayong Utara       | Orang/Kali | 550.000 |
| 252 | Pontianak                     | Kab. Ketapang            | Orang/Kali | 550.000 |
| 253 | Pontianak                     | Kab . Kubu Raya          | Orang/Kali | 185.000 |
| 254 | Pontianak                     | Kab. Landak              | Orang/Kali | 270.000 |
| 255 | Pontianak                     | Kab. Melawi              | Orang/Kali | 430.000 |
| 256 | Pontianak                     | Kab. Mempawah            | Orang/Kali | 230.000 |
| 257 | Pontianak                     | Kab. Sambas              | Orang/Kali | 300.000 |
| 258 | Pontianak                     | Kab. Sanggau             | Orang/Kali | 303.000 |
| 259 | Pontianak                     | Kab. Sekadau             | Orang/Kali | 343.000 |
| 260 | Pontianak                     | Kab . Sintang            | Orang/Kali | 392.000 |
| 261 | Pontianak                     | Kata Singkawang          | Orang/Kali | 257.000 |
|     | <b>KALIMANTAN<br/>TENGAH</b>  |                          |            |         |
| 262 | Palangkaraya                  | Kab. Barito Selatan      | Orang/Kali | 290.000 |
| 263 | Palangkaraya                  | Kab . Barito Timur       | Orang/Kali | 333.000 |
| 264 | Palangkaraya                  | Kab. Barito Utara        | Orang/Kali | 425.000 |
| 265 | Palangkaraya                  | Kab. Gunung Mas          | Orang/Kali | 300.000 |
| 266 | Palangkaraya                  | Kab. Kapuas              | Orang/Kali | 275.000 |
| 267 | Palangkaraya                  | Kab . Katingan           | Orang/Kali | 250.000 |
| 268 | Palangkaraya                  | Kab. Kotawaringin Barat  | Orang/Kali | 425.000 |
| 269 | Palangkaraya                  | Kab. Kotawaringin Timur  | Orang/Kali | 300.000 |
| 270 | Palangkaraya                  | Kab. Lamandau            | Orang/Kali | 525.000 |
| 271 | Palangkaraya                  | Kab. Murung Raya         | Orang/Kali | 448.000 |
| 272 | Palangkaraya                  | Kab. Pulau Pisau         | Orang/Kali | 250.000 |
| 273 | Palangkaraya                  | Kab. Seruyan             | Orang/Kali | 328.000 |
| 274 | Palangkaraya                  | Kab. Sukamara            | Orang/Kali | 525.000 |
|     | <b>KALIMANTAN<br/>SELATAN</b> |                          |            |         |
| 275 | Banjarmasin                   | Kab. Balangan            | Orang/Kali | 230.000 |
| 276 | Banjarmasin                   | Kab. Banjar              | Orang/Kali | 170.000 |
| 277 | Banjarmasin                   | Kab. Barito Kuala        | Orang/Kali | 200.000 |
| 278 | Banjarmasin                   | Kab. Hulu Sungai Selatan | Orang/Kali | 200.000 |
| 279 | Banjarmasin                   | Kab. Hulu Sungai Tengah  | Orang/Kali | 212.000 |
| 280 | Banjarmasin                   | Kab. Hulu Sungai Utara   | Orang/Kali | 218.000 |
| 281 | Banjarmasin                   | Kab. Kota Baru           | Orang/Kali | 290.000 |

|     |                             |                                   |            |           |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 282 | Banjarmasin                 | Kab. Tabalong                     | Orang/Kali | 234.000   |
| 283 | Banjarmasin                 | Kab. Tanah Bumbu                  | Orang/Kali | 300.000   |
| 284 | Banjarmasin                 | Kab . Tanah Laut                  | Orang/Kali | 200.000   |
| 285 | Banjarmasin                 | Kab. Tapin                        | Orang/Kali | 189.000   |
| 286 | Banjarmasin                 | Kota Banjar baru                  | Orang/Kali | 225.000   |
|     | <b>KALIMANTAN<br/>TIMUR</b> |                                   |            |           |
| 287 | Samarinda                   | Kab. Kutai Barat                  | Orang/Kali | 1.500.000 |
| 288 | Samarinda                   | Kab . Kutai<br>Kartanegara        | Orang/Kali | 500.000   |
| 289 | Samarinda                   | Kab. Kutai Timur                  | Orang/Kali | 1.350.000 |
| 290 | Samarinda                   | Kab. Paser                        | Orang/Kali | 1.650.000 |
| 291 | Samarinda                   | Kab. Penajam Paser<br>Utara       | Orang/Kali | 650.000   |
| 292 | Samarinda                   | Kota Balikpapan                   | Orang/Kali | 550.000   |
| 293 | Samarinda                   | Kota Bontang                      | Orang/Kali | 600.000   |
|     | <b>SULAWESI<br/>UTARA</b>   |                                   |            |           |
| 294 | Manado                      | Kab. Bolaang<br>Mongondow         | Orang/Kali | 250.000   |
| 295 | Manado                      | Kab. Bolaang<br>Mongondow Selatan | Orang/Kali | 275.000   |
| 296 | Manado                      | Kab. Bolaang<br>Mongondow Timur   | Orang/Kali | 250.000   |
| 297 | Manado                      | Kab. Bolaang<br>Mongondow Utara   | Orang/Kali | 300.000   |
| 298 | Manado                      | Kab. Minahasa                     | Orang/Kali | 180.000   |
| 299 | Manado                      | Kab. Minahasa<br>Selatan          | Orang/Kali | 180.000   |
| 300 | Manado                      | Kab. Minahasa<br>Tenggara         | Orang/Kali | 200.000   |
| 301 | Manado                      | Kab. Minahasa Utara               | Orang/Kali | 175.000   |
| 302 | Manado                      | Kota Bitung                       | Orang/Kali | 175.000   |
| 303 | Manado                      | Kota Kotamobagu                   | Orang/Kali | 250.000   |
| 304 | Manado                      | Kota Tomohon                      | Orang/Kali | 170.000   |
|     | <b>GORONTALO</b>            |                                   |            |           |
| 305 | Gorontalo                   | Kab. Boalemo                      | Orang/Kali | 400.000   |
| 306 | Gorontalo                   | Kab. Gorontalo                    | Orang/Kali | 300.000   |
| 307 | Gorontalo                   | Kab. Gorontalo Utara              | Orang/Kali | 350.000   |
| 308 | Gorontalo                   | Kab. Pahuwato                     | Orang/Kali | 650.000   |
|     | <b>SULAWESI<br/>BARAT</b>   |                                   |            |           |



|     |                             |                           |            |         |
|-----|-----------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 309 | Mamuju                      | Kab . Majene              | Orang/Kali | 240.000 |
| 310 | Mamuju                      | Kab. Mamasa               | Orang/Kali | 359.000 |
| 311 | Mamuju                      | Kab. Mamuju Tengah        | Orang/Kali | 200.000 |
| 312 | Mamuju                      | Kab. Mamuju utara         | Orang/Kali | 270.000 |
| 313 | Mamuju                      | Kab. Polewali Mandar      | Orang/Kali | 260.000 |
|     | <b>SULAWESI<br/>SELATAN</b> |                           |            |         |
| 314 | Maros                       | Kab. Bantaeng             | Orang/Kali | 235.000 |
| 315 | Maros                       | Kab. Barru                | Orang/Kali | 210.000 |
| 316 | Maros                       | Kab. Bone                 | Orang/Kali | 240.000 |
| 317 | Maros                       | Kab. Bulukumba            | Orang/Kali | 240.000 |
| 318 | Maros                       | Kab. Enrekang             | Orang/Kali | 250.000 |
| 319 | Maros                       | Kab.Gowa                  |            |         |
| 320 | Maros                       | Kab. Jeneponto            | Orang/Kali | 230.000 |
| 321 | Maros                       | Kab. Luwu                 | Orang/Kali | 350.000 |
| 322 | Maros                       | Kab. Luwu Timur           | Orang/Kali | 375.000 |
| 323 | Maros                       | Kab. Luwu Utara           | Orang/Kali | 365.000 |
| 324 | Maros                       | Kota Makassar             |            |         |
| 325 | Maros                       | Kab. Pangkep              |            |         |
| 326 | Maros                       | Kab. Pinrang              | Orang/Kali | 230.000 |
| 327 | Maros                       | Kab. Sidenreng<br>Rappang | Orang/Kali | 230.000 |
| 328 | Maros                       | Kab.Sinjai                | Orang/Kali | 235.000 |
| 329 | Maros                       | Kab. Soppeng              | Orang/Kali | 235.000 |
| 330 | Maros                       | Kab. Takalar              | Orang/Kali | 190.000 |
| 331 | Maros                       | Kab. Tanatoraja           | Orang/Kali | 350.000 |
| 332 | Maros                       | Kab . Toraja Utara        | Orang/Kali | 350.000 |
| 333 | Maros                       | Kab. Wajo                 | Orang/Kali | 230.000 |
| 334 | Maros                       | Kota Palopo               | Orang/Kali | 350.000 |
| 335 | Maros                       | Kota Pare-Pare            | Orang/Kali | 225.000 |
| 336 | Maros                       | Kab. Kepulauan<br>Selayar | Orang/Kali | 400.000 |
|     | <b>SULAWESI<br/>TENGAH</b>  |                           |            |         |
| 337 | Palu                        | Kab. Luwuk                | Orang/Kali | 400.000 |
| 338 | Palu                        | Kab. Buol                 | Orang/Kali | 472.000 |
| 339 | Palu                        | Kab. Donggala             | Orang/Kali | 130.000 |
| 340 | Palu                        | Kab. Morowali             | Orang/Kali | 400.000 |
| 341 | Palu                        | Kab. Morowali Utara       | Orang/Kali | 400.000 |

|     |                              |                        |            |           |
|-----|------------------------------|------------------------|------------|-----------|
| 342 | Palu                         | Kab. Parigi Moutong    | Orang/Kali | 250.000   |
| 343 | Palu                         | Kab. Poso              | Orang/Kali | 280.000   |
| 344 | Palu                         | Kab. Sigi              | Orang/Kali | 219.000   |
| 345 | Palu                         | Kab. Tojouna-Una       | Orang/Kali | 350.000   |
| 346 | Palu                         | Kab. Toli-Toli         | Orang/Kali | 412.000   |
|     | <b>SULAWESI<br/>TENGGARA</b> |                        |            |           |
| 347 | Kendari                      | Kab. Bombana           | Orang/Kali | 355.000   |
| 348 | Kendari                      | Kab. Kolaka            | Orang/Kali | 370.000   |
| 349 | Kendari                      | Kab. Kolaka Timur      | Orang/Kali | 300.000   |
| 350 | Kendari                      | Kab. Kolaka Utara      | Orang/Kali | 425.000   |
| 351 | Kendari                      | Kab. Konawe            | Orang/Kali | 300.000   |
| 352 | Kendari                      | Kab. Konawe Selatan    | Orang/Kali | 305.000   |
| 353 | Kendari                      | Kab. Konawe Utara      | Orang/Kali | 300.000   |
|     | <b>MALUKU UTARA</b>          |                        |            |           |
| 354 | Sofifi                       | Kab. Halmahera Barat   | Orang/Kali | 850.000   |
| 355 | Sofifi                       | Kab. Halmahera Tengah  | Orang/Kali | 1.000.000 |
| 356 | Sofifi                       | Kab. Halmahera Timur   | Orang/Kali | 1.250.000 |
| 357 | Sofifi                       | Kab. Halmahera Utara   | Orang/Kali | 900.000   |
| 358 | Jayapura                     | Kab. Jayapura          | Orang/Kali | 600.000   |
| 359 | Jayapura                     | Kab. Keerom            | Orang/Kali | 900.000   |
| 360 | Jayapura                     | Kab. Sarmi             | Orang/Kali | 2.700.000 |
| 361 | Jayapura                     | Kab. Merauke           | Orang/Kali | 1.134.000 |
|     | <b>PAPUA BARAT</b>           |                        |            |           |
| 362 | Manokwari                    | Kab. Teluk Bintuni     | Orang/Kali | 900.000   |
| 363 | Manokwari                    | Kab. Manokwari Selatan | Orang/Kali | 750.000   |
| 364 | Manokwari                    | Kab. Pegunungan Arfak  | Orang/Kali | 2.650.000 |
| 365 | Manokwari                    | Kota Sorong            | Orang/Kali | 1.000.000 |

#### 4. **SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (ONE WAY).**

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/ kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/ Kota Bekasi, Kabupaten/ Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/ Kota sekitar (One Way) terinci pada Tabel 14.

**TABEL 14 : SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

| <b>No</b> | <b>IBUKOTA<br/>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/ KOTA<br/>TUJUAN</b> | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN<br/>(Rp)</b> |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1         | Jakarta                     | Kota Bekasi                       | Orang/Kali    | 284.000                 |
| 2         | Jakarta                     | Kab. Bekasi                       | Orang/Kali    | 284.000                 |
| 3         | Jakarta                     | Kab. Bogor                        | Orang/Kali    | 300.000                 |
| 4         | Jakarta                     | Kab. Bogor                        | Orang/Kali    | 300.000                 |
| 5         | Jakarta                     | Kota Depok                        | Orang/Kali    | 275.000                 |
| 6         | Jakarta                     | Kota Tangerang                    | Orang/Kali    | 286.000                 |
| 7         | Jakarta                     | Kota Tangerang Selatan            | Orang/Kali    | 286.000                 |
| 8         | Jakarta                     | Kab. Tangerang                    | Orang/Kali    | 310.000                 |
| 9         | Jakarta                     | Kepulauan Seribu                  | Orang/Kali    | 428.000                 |

## **5. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**

Satuan Biaya Sewa Kendaraan

- a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempattujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan setinggitingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan

kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar / bersifat at cost.

- b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku.

**TABEL 15: BIAYA SEWA KENDARAAN**

| <b>NO</b> | <b>PROVINSI</b> | <b>SATUAN</b> | <b>RODA 4<br/>(Rp.)</b> | <b>RODA<br/>6/BUS<br/>SEDANG<br/>(Rp.)</b> | <b>RODA<br/>6/BUS<br/>BESAR<br/>(Rp.)</b> |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|--|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>        | <b>3</b>      | <b>4</b>                | <b>5</b>                                   | <b>6</b>                                  |
| 1         | Aceh            | Per hari      | 930.000                 | 3.282.000                                  | 4.638.000                                 |
| 2         | Sumatra Utara   | Per hari      | 975.000                 | 2.139.000                                  | 3.203.000                                 |
| 3         | Riau            | Per hari      | 978.000                 | 2.606.000                                  | 3.908.000                                 |
| 4         | Kepulauan Riau  | Per hari      | 901.000                 | 2.373.000                                  | 3.910.000                                 |
| 5         | Jambi           | Per hari      | 804.000                 | 3.850.000                                  | 4.601.000                                 |
| 6         | Sumatera Barat  | Per hari      | 800.000                 | 2.124.000                                  | 3.500.000                                 |

|    |                     |          |           |           |           |
|----|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 7  | Sumatera Selatan    | Per hari | 1.375.000 | 2.200.000 | 4.097.000 |
| 8  | Lampung             | Per hari | 846.000   | 3.594.000 | 5.052.000 |
| 9  | Bengkulu            | Per hari | 777.000   | 3.810.000 | 5.159.000 |
| 10 | Bangka Belitung     | Per hari | 1.258.000 | 2.781.000 | 4.273.000 |
| 11 | Banten              | Per hari | 777.000   | 2.512.000 | 3.666.000 |
| 12 | Jawa Barat          | Per hari | 932.000   | 2.563.000 | 3.403.000 |
| 13 | DKI Jakarta         | Per hari | 911.000   | 2.221.000 | 3.439.000 |
| 14 | Jawa Tengah         | Per hari | 1.016.000 | 2.206.000 | 4.237.000 |
| 15 | D.I. Yogyakarta     | Per hari | 905.000   | 2.207.000 | 3.565.000 |
| 16 | Jawa Timur          | Per hari | 966.000   | 2.446.000 | 3.222.000 |
| 17 | Bali                | Per hari | 925.000   | 2.658.000 | 3.536.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Per hari | 882.000   | 2.532.000 | 3.369.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Per hari | 857.000   | 2.548.000 | 3.468.000 |
| 20 | Kalimantan Barat    | Per hari | 868.000   | 2.611.000 | 3.644.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah   | Per hari | 1.177.000 | 3.716.000 | 5.573.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan  | Per hari | 778.000   | 2.630.000 | 3.550.000 |
| 23 | Kalimantan Timur    | Per hari | 1.100.000 | 2.750.000 | 3.863.000 |
| 24 | Kalimantan Utara    | Per hari | 1.100.000 | 2.713.000 | 3.863.000 |
| 25 | Sulawesi Utara      | Per hari | 956.000   | 2.205.000 | 3.722.000 |
| 26 | Gorontalo           | Per hari | 792.000   | 2.504.000 | 3.230.000 |
| 27 | Sulawesi Barat      | Per hari | 772.000   | 2.464.000 | 3.282.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan    | Per hari | 796.000   | 2.708.000 | 3.434.000 |
| 29 | Sulawesi Tengan     | Per hari | 824.000   | 2.422.000 | 3.369.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | Per hari | 839.000   | 2.609.000 | 4.120.000 |
| 31 | Maluku              | Per hari | 947.000   | 2.872.000 | 4.021.000 |
| 32 | Maluku Utara        | Per hari | 965.000   | 3.013.000 | 4.170.000 |
| 33 | Papua               | Per hari | 1.107.000 | 4.082.000 | 5.248.000 |
| 34 | Papua Barat         | Per hari | 1.059.000 | 3.499.000 | 4.547.000 |

## **F. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN.**

### **1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI.**

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau

bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 16.

**TABEL 16. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

| <b>NO</b> | <b>PROVINSI</b>  | <b>SATUAN</b>         | <b>GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp.)</b> | <b>HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp.)</b> |
|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 1         | SULAWESI SELATAN | m <sup>2</sup> /tahun | 190.000                              | 11.000                                       |

## **2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS.**

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ndangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 16, Tabel 17, Tabel 18.

**TABEL 17 : SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT.**

| <b>NO</b> | <b>PROVINSI</b>              | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN (Rp)</b> |
|-----------|------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                     | <b>3</b>      | <b>4</b>            |
| I         | KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD | Unit/Tahun    | 41.900.000          |
| II        | ANGGOTA DPRD                 | Unit/Tahun    | 41.000.000          |
| III       | PEJABAT ESELON II            |               |                     |
|           | SULAWESI SELATAN             | Unit/Tahun    | 38.630.000          |

**TABEL 18. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT.**

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>                       | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN (Rp)</b> |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                            | <b>3</b>      | <b>4</b>            |
| 1         | Operasional dalam Lingkungan Kantor | Unit/Tahun    | 9.750.000           |
| 2         | Roda 6                              | Unit/Tahun    | 37.110.000          |
| 3         | Speed Boat                          | Unit/Tahun    | 20.240.000          |

### **3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR.**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputerf, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 19.

**TABEL 19 : SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR.**

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>                  | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN<br/>(Rp)</b> |
|-----------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                       | <b>3</b>      | <b>4</b>                |
| 1         | Inventaris Kantor              | Pegawai/Tahun | 80.000                  |
| 2         | Personal Computer / Notebook   | Unit/Tahun    | 730.000                 |
| 3         | Printer                        | Unit/Tahun    | 690.000                 |
| 4         | AC Split                       | Unit/Tahun    | 610.000                 |
| 5         | Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun    | 7.190.000               |
| 6         | Genset 75 KVA                  | Unit/Tahun    | 8.640.000               |
| 7         | Genset 100 KVA                 | Unit/Tahun    | 10.150.000              |
| 8         | Genset 125 KVA                 | Unit/Tahun    | 10.780.000              |
| 9         | Genset 150 KVA                 | Unit/Tahun    | 13.260.000              |
| 10        | Genset 175 KVA                 | Unit/Tahun    | 14.810.000              |
| 11        | Genset 200 KVA                 | Unit/Tahun    | 15.850.000              |
| 12        | Genset 250 KVA                 | Unit/Tahun    | 16.790.000              |
| 13        | Genset 275 KVA                 | Unit/Tahun    | 17.760.000              |
| 14        | Genset 300 KVA                 | Unit/Tahun    | 20.960.000              |
| 15        | Genset 350 KVA                 | Unit/Tahun    | 22.960.000              |
| 16        | Genset 450 KVA                 | Unit/Tahun    | 25.620.000              |
| 17        | Genset 500 KVA                 | Unit/Tahun    | 31.770.000              |

**BUPATI MAROS,**

  
**H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H**